



Jokowi Tegaskan Tak Ada Niat Jadi Presiden Tiga Periode



Buwas: Impor 1 Juta Ton Beras Belum Tentu Dilaksanakan

Kadin: 11 Ribu Perusahaan Ikut Vaksinasi Mandiri



INVESTOR DAILY

BERITA SATU MEDIA HOLDINGS

INDONESIA

SELASA 16 MARET 2021

Astra Berkomitmen Produksi Mobil Listrik

Oleh Leonard Cahyoputra dan Triyan Pangastuti

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) berkomitmen memproduksi mobil listrik, walau kini masih berkonsentrasi di mobil *hybrid*. Astra akan mengikuti regulasi yang diberlakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan mobil listrik.

Astra juga telah membicarakan melakukan koordinasi yang intensif antara lain dengan prinsipal Toyota di Jepang. Saat ini, Toyota sudah mempunyai 10 model mobil elektrifikasi.

Para prinsipal mobil Jepang juga telah memiliki pengalaman kuat dalam industri otomotif lebih dari 100 tahun. Mereka juga terus melakukan *research and development* (R&D) di mobil listrik, dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan *demand* dan teknologi terkini.

"Kalau bicara mobil listrik, boleh dikatakan setiap negara juga membicarakan hal yang sama. Indonesia juga membicarakan mobil listrik, karena kita juga mempunyai kewajiban untuk menurunkan angka emisi CO2. Kami di Astra tentunya selalu mendukung kebijakan seperti itu. Indonesia punya komitmen terhadap penurunan angka GHG (*greenhouse gases*), jadi mau tidak mau harus mulai berbenah ke arah sana," kata Presiden Direktur (Presdir) PT Astra International Tbk (ASII) Djony Bunarto Tjondro

saat *media visit* ke BeritaSatu Media Holdings secara virtual, Senin (15/3). Djoni didampingi *Chief of Corporate Affairs* Astra International Riza Deliansyah dan *Head of Corporate Communications* Astra International Boy Kelana Soebroto.

Dari 10 model mobil elektrifikasi Toyota tersebut, kata Djoni, tidak seluruhnya adalah *battery EV* (BEV), tapi raksasa otomotif dunia tersebut termasuk salah satu yang pertama meluncurkan mobil *hybrid* seperti Hybrid Prius. "Sekarang Toyota Prius juga sudah meluncurkan PHEV (*plug-in hybrid electric vehicle*). Kami juga memasukkan *hybrid* ke beberapa model yang lain. Kami punya cetak birunya kapan akan meluncurkan yang *battery EV* (mobil baterai listrik). Hari ini ada sebetulnya mobil *battery EV*, cuma itu Lexus, yang *market*-nya kecil sekali (di Indonesia)," ujar Djoni.

Di Indonesia, pasar mobil mewah seperti Lexus sangat kecil. Sedangkan yang terbesar adalah segmen *middle-low*, sekitar 60%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan usulan



Kunjungan Virtual Astra International

Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjondro (kiri atas), didampingi *Chief of Corporate Affairs* Astra International Riza Deliansyah (kiri bawah), *Head of Corporate Communications* Astra International Boy Kelana Soebroto (kanan atas) diterima secara virtual oleh COO BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Anthony Wonsono, Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu serta Pemimpin Redaksi beritasatu.com Aditya Lakmana Yudha saat kunjungan media secara virtual di Jakarta, Senin (15/3/2021). Dalam kunjungan tersebut dibahas berbagai isu seputar lini bisnis yang dijalani oleh PT Astra International di masa pandemi Covid-19.

mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), kemarin, mengatakan bahwa penjualan *electric vehicle* di Indonesia masih sangat rendah. Pada 2020, penjualan baru 1.108 unit *hybrid electric vehicle* (HEV), 6 unit *plug-in hybrid electric vehicle* atau PHEV, dan 120 unit *battery electric vehicle* (BEV). Menkeu mengusulkan kenaikan tarif PPnBM pada mobil *full hybrid* dan PHEV, namun tidak akan mengubah tarif PPnBM pada BEV, atau tarifnya tetap 0%.

Capex Rp 11-12 Triliun

Djony mengatakan lebih lanjut, emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan sandi saham ASII itu juga berkomitmen menambah investasi di Indonesia.

Astra mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga Rp 11-12 triliun tahun ini. Astra juga masih melihat peluang investasi lain yang memang bagus.

Astra juga memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Seluruh produk mobil dan sepeda motor yang diproduksi Grup Astra sudah di atas 80%. Besarnya TKDN membuktikan produk otomotif Astra memberikan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional, terutama dari sisi penghematan devisa, penerimaan negara, dan penyerapan tenaga kerja.

"Nilai tambah tak hanya dihasilkan Grup Astra, tapi juga industri-industri ikutan perusahaan lain. TKDN semua produk kami sudah di atas 80%, *local content* produk-produk Astra terus meningkat," kata Djony.

Ekspor ke Jepang

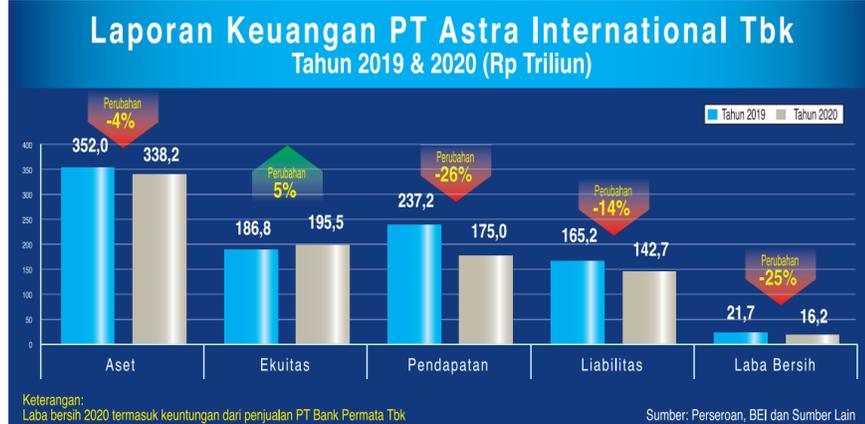
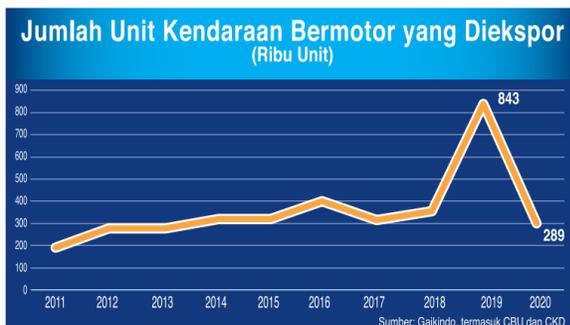
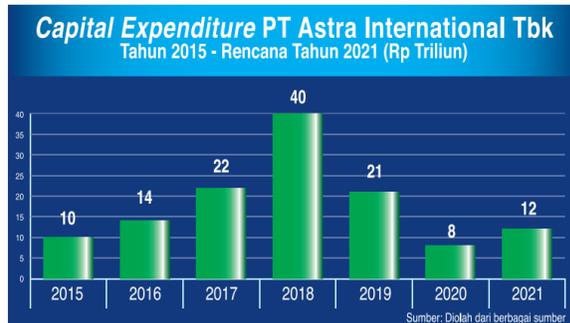
Djony juga menjelaskan, mobil

dan sepeda motor besutan Astra tak hanya dipasarkan di dalam negeri, melainkan juga diekspor ke sekitar 60 negara. Pasar otomotif ekspor Astra antara lain negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia, bahkan termasuk Jepang, negara asal prinsipal mobil-mobil yang diproduksi Astra.

"Ekspor mobil didominasi merek Toyota. Kami ekspor ke lebih dari 60 negara, 80%-nya adalah roda empat (mobil). Kami bahkan ekspor balik ke Jepang, ini menunjukkan bahwa produk Astra memiliki tingkat kualitas yang baik. Produk kami sudah ada yang memakai juga nama Astra," tandas dia.

Bersambung ke hal 2

investor.id



Next Gen Summit 2021

FREE REGISTRATION & LIVE STREAM
nextgen.beritasatu.com

MONEY & BANKING

Darmawan Junaidi

Bank Mandiri Tebar Dividen Rp 10,27 Triliun

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui besaran 60% dari laba bersih 2020 atau sekitar Rp 10,27 triliun sebagai dividen dengan nilai Rp 220 per lembar saham. Dengan pembagian dividen tersebut perseroan mengalami penurunan permaldan, sehingga tahun ini rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) akan dijaga pada kisaran 18-20%.

MATAHARI

MACRO ECONOMICS

Industri dan Investasi Mulai Menggeliat

Nilai impor barang modal Indonesia pada Februari 2021 tercatat sebesar US\$ 2,15 miliar, naik 9,08% dibandingkan periode Januari 2021 (*month to month/mtm*) atau melonjak 17,68% dibandingkan periode sama 2020 (*year on year/yoy*). Kenaikan impor barang modal yang berkontribusi hingga 16,23% terhadap total impor tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi kegiatan industri atau manufaktur dan investasi ke depan.

MARKETS & CORPORATE

Tunas Baru dan Gajah Tunggal Bersiap Rilis Global Bond US\$ 670 Juta

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) menyiapkan rencana penerbitan surat utang global (*global bond*) hingga US\$ 400 juta untuk membiayai kembali (*refinancing*) utang. Aksi serupa juga tengah dirancang oleh PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) dengan target nilai emisi sebesar US\$ 270 juta.

BERITA SATU #BersatuMelawanCorona

#LEBIH AMAN DI RUMAH

Pemerintah akan Naikkan PPnBM Mobil Hybrid

Oleh Triyan Pangastuti

JAKARTA -- Pemerintah akan menaikkan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil hybrid untuk mendorong investasi pada industri mobil listrik yang menggunakan tenaga baterai (*battery electric vehicle/BEV*).

Rencana tersebut diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/3). Menurut Menkeu, usulan tersebut untuk memberikan selisih yang lebih besar antara tarif PPnBM pada BEV dan mobil hybrid.

Usulan perubahan tarif PPnBM ini akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

"Rencana revisi PP untuk memberikan selisih yang lebih besar antara tarif pajak penjualan atas



Sri Mulyani Indrawati

barang mewah (PPnBM) pada mobil listrik (BEV) dan mobil hybrid. Revisi tarif tidak akan mengubah tarif PPnBM pada BEV (Pasal 36) baik skema satu maupun skema dua tarif PPnBM yang dikenakan sebesar 0%, alias tidak naik," kata Menkeu.

Menurut dia, PP 73/2019 ini menyebabkan para investor yang akan membangun pabrik mobil listrik yang *full battery* di Indone-

Tarif Pajak	Sebelumnya (%)	Usul Tarif (%)
Skema Pertama		
PHEV (ps 36)	0	5
Full Hybrid (ps 26)	2	6
Full Hybrid (ps 27)	5	7
Skema Kedua		
PHEV (ps 36)	0	8
Full Hybrid (ps 26)	2	10
Full Hybrid (ps 27)	5	11
Full Hybrid (ps 28)	8	12
Full Hybrid (ps 29)	8	12
Mild Hybrid (ps 30)	10	13
Full Hybrid (ps 31)	12	14

sia merasa tidak cukup kompetitif dibandingkan yang tidak *full battery*.

Ia menjelaskan, otoritas fiskal telah mengatur dua skema tarif PPnBM. Pada skema pertama, tarif PPnBM untuk *plug-in hybrid*

electric vehicle (PHEV) Pasal 36 (Ps 36) sebesar 5% dari sebelumnya 0%, *full-hybrid* (Ps 26) sebesar 6% dari sebelumnya 2%, dan *full-hybrid* (Ps 27) sebesar 7% dari sebelumnya 5%. Sementara itu, skema tarif PPnBM mobil hybrid akan beralih pada

skema kedua jika para investor mobil BEV yang berkomitmen berinvestasi di Indonesia telah merealisasikan penanaman modal minimum Rp 5 triliun dan memproduksi mobil BEV secara komersial. Jika komitmen telah terpenuhi, maka pemerintah akan menaikkan tarif PPnBM pada PHEV dan mobil hybrid untuk menarik investor.

Pada skema kedua, PHEV (Ps 36) menjadi 8%, *full-hybrid* (Ps 26) 10%, *full-hybrid* (Ps 27) 11% dari sebelumnya 7%, *full-hybrid* (Ps 28) 12% dari sebelumnya 8%, *mild-hybrid* (Ps 29) 12% dari sebelumnya 8%, *mild-hybrid* (Ps 30) 13% dari sebelumnya 10%, dan *full-hybrid* (Ps 31) 14% dari sebelumnya 12%.

"Jadi poinnya membedakan antara *full battery electric* dengan *hybrid*, *plug in hybrid*, dan dengan *hybrid* lainnya.

Bersambung ke hal 12

BERITA SATU .COM

Kabut Kuning Selimuti Beijing

Oleh **Grace Eldora**

▶ BEIJING - Beijing diselubungi kabut kuning tebal pada Senin (15/3). Penyebabnya adalah badai pasir, yang disebut terburuk dalam satu dekade, dan berasal dari gurun Gobi. Polusi udara di ibu kota Tiongkok tersebut pun langsung melonjak.

Para penduduk Beijing menggunakan kacamata, masker, dan penutup rambut untuk melindungi diri dari debu dan pasir yang dapat menyebabkan sesak nafas. Bangunan-bangunan penting termasuk Kota Terlarang sebagian terselubungi kabut yang sangat tebal dan pekat.

Pemerintah kota memerintahkan sekolah untuk membatalkan kegiatan olahraga dan acara di luar dan menyarankan masyarakat untuk tetap di dalam ruangan jika memungkinkan. Sementara itu, ratusan penerbangan dibatalkan.

Badai cuaca Tiongkok menyalahkan kualitas udara yang buruk pada badai pasir yang melanda Tiongkok utara dari Mongolia utara. Pihak berwenang di wilayah tersebut mengatakan badai telah menewaskan beberapa orang, sebelum kabut terbawa ke selatan oleh angin dan mengurangi jarak pandang di Beijing hingga kurang dari 500 meter (m).

Di bawah langit tebal, yang menyelimuti bangunan dengan cahaya mena-
kutkan, penduduk Beijing resah akan risiko kesehatan akibat badai. Kabut debu menambah hari-hari polusi PM 2,5 yang berbahaya di ibu kota.

"Saya merasa setiap tarikan napas akan memberi saya masalah paru-paru," kata warga Beijing Zhang Yunya

kepada *AFP*, Senin (15/3).

Ini adalah badai pasir terburuk dalam satu dekade yang melanda ibu kota. Badai semacam ini telah memunculkan harapan untuk membangun kembali hambatan alami terhadap fenomena tersebut, pada penanaman kembali pohon secara intensif di kawasan hutan belantara, juga dikenal sebagai tembok besar hijau.

Otoritas Beijing mengatakan, tahun lalu pihaknya memperkirakan badai pasir yang lebih sedikit dan lebih lemah melanda Tiongkok utara karena upaya reboisasi.

Sebuah studi pada 2019 yang diterbitkan dalam jurnal *Nature Sustainability* menemukan, sekitar dua juta mil persegi vegetasi telah ditambahkan ke permukaan bumi sejak 2000, seperempatnya disumbangkan oleh Tiongkok.

Tetapi dampak dari jalur hijau itu diperdebatkan terhadap pengurangan yang berlaku di Barat laut negara itu.

Sangat Ganas

Pakar kesehatan lingkungan yang berbasis di Beijing Pan Xiaochuan mengatakan kepada *AFP*, hujan atau salju yang jarang terjadi belakangan ini berarti tanah sangat kering dan membuat badai pasir menjadi sangat ganas.

"Jika kelembapan lebih sedikit, lebih banyak debu yang terkikis. Karena badai pasir dihembuskan dari dataran tinggi, sabuk pohon penahan angin yang biasa tidak akan terlalu efektif, jadi itu telah tertiu sangat cepat," katanya.

Badai pasir yang bertuip ke ibu kota adalah akibat dari kondisi cuaca ekstrim dan penggurunan, kata Li Shuo dari Greenpeace Tiongkok.

Namun ia mengatakan kepada *AFP*, aktivitas industri yang intens juga telah menyebabkan udara buruk di Beijing dalam beberapa pekan terakhir. Produksi baja, semen, dan aluminium sudah melampaui tingkat pra-pandemi sementara kegiatan ekonomi bangkit kembali.

Diskusi yang membahas kabut jingga mulai bermunculan secara daring, dengan 230 juta tampilan di platform media sosial Weibo pada Senin sore waktu setempat. "Badai pasir merah jingga ini membuat seolah-olah kiamat," kata salah satu pengguna Weibo.

Polusi di kota itu berada pada tingkat yang berbahaya, menurut situs web pemantauan kualitas udara Aqicn, ketika skala pembacaan melonjak di banyak aplikasi.

Aqicn menyampaikan, tingkat partikel besar PM 10 hampir 20 kali lipat dari paparan maksimum harian yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tetapi, media negara *Global Times* melaporkan, polusi PM 10 di enam distrik pusat kota mencapai lebih dari 8.100 pada Senin pagi. Level tersebut 160 kali lipat lebih tinggi dari batas yang disarankan.

Partikel PM 2,5 yang lebih kecil, yang meresap jauh ke dalam paru-paru manusia dan menyebabkan penyakit pernapasan, juga berada di tingkat berbahaya pada Senin pagi. (afp)



Badai Pasir

Seorang perempuan melewati sebuah jembatan di danau Houhai saat terjadi badai pasir di Beijing, Tiongkok, Senin (15/3).

Menhan dan Menlu AS Melawat ke Asia

TOKYO - Dua pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat (AS), yakni Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menlu Antony Blinken memulai perjalanan luar negeri pertamanya ke Asia pada Senin (15/3). Keduanya akan mendatangi beberapa negara sekutu utama AS di Asia.

Kedua bepergian secara terpisah, tapi dijadwalkan bertemu di Jepang untuk lawatan pertama. Austin dan Blinken dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan menteri pertahanan Jepang serta Perdana Menteri (PM) Yoshihide Suga.

Keduanya kemudian akan melanjutkan kunjungan ke Korea Selatan (Korsel). Sebelum kemudian Austin pergi secara terpisah ke India. Sedangkan Blinken akan mengadakan pembicaraan di AS dengan para pejabat Tiongkok.

Pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joe Biden pelan-pelan memulai perjalanan diplomatik. Lain dari pemerintah AS yang biasanya sibuk untuk menandai pemerintahan baru. Tapi itu bukan tanpa tujuan, karena pemerintah AS hendak memberikan

contoh tentang tidak disarankannya bepergian selama pandemi Covid-19.

Tetapi pemerintah AS juga telah menjelaskan keinginan untuk mengatur ulang hubungan AS dengan seluruh dunia. Terutama dengan sekutu-sekutu tradisional.

Dalam sebuah opini bersama di *Washington Post* pada Senin, Austin dan Blinken mengatakan akan mempertimbangkan revitalisasi hubungan dengan para kolega dan mitra.

Kunjungan tersebut juga akan menampilkan fron persatuan terkait tantangan yang ditimbulkan oleh pemerintah Tiongkok.

"Kekuatan gabungan kami membuat kami lebih kuat, ketika kami harus melawan agresi dan ancaman Tiongkok," tulis keduanya, Senin (15/3).

Keduanya menjelaskan bahwa AS akan meminta pertanggungjawaban Tiongkok ketika Tiongkok melanggar hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang dan Tibet.

Juga secara sistematis mengikis otonomi di Hong Kong, memotong demokrasi di Taiwan, atau menegaskan

klaim maritim di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang melanggar hukum internasional. "Jika kami tidak bertindak tegas dan memimpin, Tiongkok akan melukukannya," tambah Austin dan Blinken.

Berbicara dengan Pejabat Tiongkok

Berbicara di Hawaii sebelum menuju ke wilayah tersebut, Austin mengatakan dirinya dan Blinken akan meningkatkan dan belajar, serta ingin meningkatkan kapasitas militer AS dengan sekutu untuk meningkatkan apa yang disebutnya keunggulan kompetitif atas Tiongkok.

"Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa kami memiliki kemampuan dan rencana operasional untuk dapat menawarkan pencegahan yang layak ke Tiongkok atau siapa pun yang ingin melawan AS," ungkap Austin.

Seorang pejabat senior pertahanan AS, berbicara kepada wartawan yang bepergian dengan Austin, mengatakan diskusi dengan pejabat Jepang akan memasukkan pembicaraan tentang peran dan perilaku pemerintah Tiongkok di kawasan. (afp/eld)

Astra Berkomitmen Produksi Mobil Listrik

Sumbangan dari hal 1

Ekosistem Harus Mendukung

Meski Toyota sudah memiliki cetak biru mobil listrik dan tidak sulit membuat mobil listrik lewat Astra di Indonesia, namun perlu lebih dulu disiapkan ekosistem yang mendukung di Tanah Air. Selain itu, jumlah konsumen mobil listrik ini juga harus sudah memungkinkan produksi massal.

Peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Riyanto mengatakan, tantangan terbesar mobil listrik di Indonesia adalah harganya yang belum terjangkau kebanyakan masyarakat. Ia menjelaskan, saat ini, harga mobil listrik termurah yang dijual di Indonesia Rp 600 jutaan, yakni Hyundai Kona dan Ioniq. Padahal, pasar mobil terbesar di Indonesia berada di segmen *low MPV*, dengan harga berkisar Rp 200-400 jutaan.

"Jadi, bila memang nanti mobil listrik diproduksi di dalam negeri, sebaiknya menysar ke kelas bawah dahulu. Buatlah mobil listrik keluarga dengan kapasitas penumpang tujuh orang, dengan harga Rp 300-350 juta. Jadi, baru benar-benar bisa mulai beralih ke mobil listrik," kata dia.

Riyanto juga menyarankan pemerintah membuat berbagai jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di ruas-ruas padat lalu lintas dan kafe, sehingga memudahkan pemilik dalam mengisi daya mobil listrik. Kemudian, daya listrik rumah untuk mengisi baterai mobil listrik juga perlu disesuaikan.

Sebab, kata dia, rata-rata daya listrik rumah masyarakat berkisar 450-1.300 watt, sangat jauh dari rekomendasi pabrikan mobil. "Pastinya, saat ini persyaratan 2.200 watt sangat besar (berat) bagi mayoritas warga Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menyambut baik rencana pembangunan pabrik mobil listrik dan baterai mobil listrik di Indonesia. Namun, lanjut dia, jauh lebih penting untuk membangun pabrik komponen utama mobil listrik, salah satunya baterai mobil listrik.

Pasalnya, Indonesia memiliki bahan baku utama untuk pembuatan baterai listrik, yakni nikel. Selain itu, beragam komponen mobil listrik nantinya dapat diekspor ke pabrik-pabrik produsen mobil listrik yang sudah lebih dulu berdiri di luar negeri.

"Kalau komponen dibuat di Indonesia, bisa *supply* ke Tesla, Hyundai, Toyota, BMW, hingga Mercedes Benz. Volumennya jauh lebih besar ketimbang mobil. Jadi itu lebih *global oriented* kalau komponen yang dibuat di Indonesia," kata Kukuh.

Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugianto mengatakan, pihaknya menyambut baik investasi mobil listrik merek

apa pun di Indonesia. Pembangunan industri mobil listrik ini juga akan mengurangi impor BBM Indonesia yang besar.

Pemerintah menargetkan populasi mobil dan sepeda motor listrik masing-masing mencapai 2 juta unit dan 13 juta unit pada 2030. Jumlah itu akan mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) setara 77 ribu *barrel oil per day* (bopd), menghemat devisa hingga sekitar US\$ 1,8 miliar, dan menurunkan emisi karbondioksida hingga 11,1 juta ton.

Target tersebut masuk dalam rencana induk energi yang sedang disusun Kementerian ESDM. Dalam rencana itu disebutkan, pemerintah akan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di 2.400 titik dan stasiun penggantian baterai kendaraan listrik umum (SP-BKLU) di 10 ribu titik sampai tahun 2025 untuk menunjang penggunaan kendaraan listrik.

Produksi Mobil Menggeliat

Djony mengatakan lebih lanjut, kegiatan produksi otomotif Grup Astra kini sudah kembali menggeliat. Produksi sempat anjlok dalam setelah terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia Maret tahun lalu dan diikuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meski belum sepenuhnya normal, utilisasi pabrik otomotif Astra kini angkanya meningkat menjadi 70%. Sedangkan tahun lalu hanya berkisar 40-60% akibat pandemi Covid-19 dan PSBB.

"Kegiatan produksi sudah meningkat pelan-pelan, terutama dalam tiga bulan terakhir. Memang belum sampai level normal, tapi perkembangannya cukup mengembirakan," tutur dia.

Djony mengatakan, insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam bentuk pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil single gardan berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc mulai Maret tahun ini diproyeksikan turut mendorong penjualan mobil. Djony optimistis pejualan mobil di pasar domestik tahun ini mencapai 750 ribu unit, sebagaimana diproyeksikan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Atau bahkan bisa terlampaui bila ekonomi pulih lebih cepat, vaksinasi efektif menanggulangi penyebaran Covid-19, dan stimulus berjalan baik. Jika seperti itu, angka penjualan mobil tahun ini bisa di atas 750 ribu unit," papar dia.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan ritel mobil di Indonesia pada 2020 anjlok 44,7% menjadi 578.327 unit, dibanding tahun sebelumnya 1.045.717 unit. Sedangkan penjualan mobil secara nasional dari pabrikan ke dealer (*wholesales*) mencapai 532.027 unit, menyusut 48,3%.

Tahun lalu, sekitar 50,76% dari total penjualan mobil di pasar domestik dikontribusi Astra, dengan total pen-

Negara Tujuan Ekspor Kendaraan Bermotor dan Spare part

Negara Tujuan	Distribusi (%)
Filipina	18%
Thailand	15%
Arab Saudi	11%
Jepang	9%
Malaysia	7%
Viet Nam	5%
Singapura	4%
Uni Emirat Arab	3%
Meksiko	3%
Amerika Serikat	2%

jualan 270.076 unit. Mobil besutan Astra ini antara lain Toyota, Daihatsu, Isuzu, Peugeot, UD Trucks, BMW, dan Lexus.

Dalam merespons pasar yang kini menggeliat, lanjut Djony Bunarto Tjondro, Astra tidak akan jorjoran menggenjot produksi. "Kami akan menyesuaikan dengan perkembangan *demand*, apalagi kami juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan di unit-unit produksi. Mudah-mudahan *demand* bisa cepat *rebound*, sehingga bisa kami siapkan *supply*-nya," ujar dia.

Dia menambahkan, iklim bisnis pada 2021 masih menantang karena pandemi Covid-19 belum berlalu. Itu sebabnya, Astra yang membawahkan 200 lebih perusahaan dan mempekerjakan sekitar 190 ribu karyawan bakal tetap menajankan bisnis secara hati-hati.

"Di sisi lain, Astra juga akan terus mencermati peluang investasi yang muncul, apalagi tahun ini kondisi membaik. Kami akan hati-hati, tetapi kami juga tidak ingin kehilangan momentum untuk berkembang. Kesempatan investasi akan kami cermati terus, karena kami didukung neraca keuangan yang sehat dan kuat," tandas Djony.

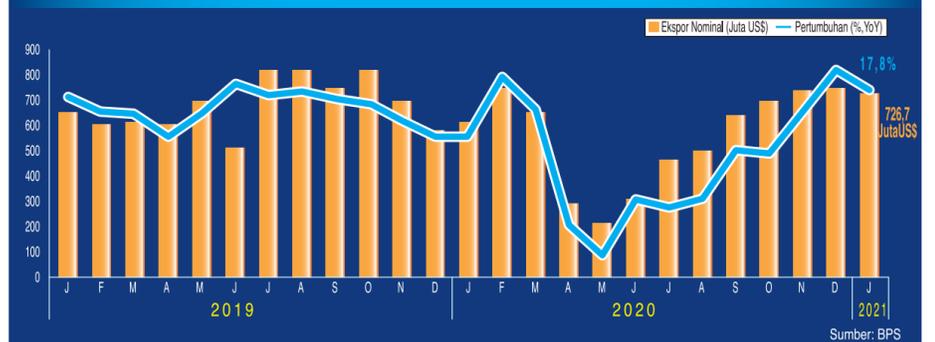
Sementara itu, akibat pandemi, Astra International tahun lalu membukukan penurunan laba bersih sebesar 26% menjadi Rp 16,16 triliun dibandingkan Rp 21,71 triliun pada 2019 (grup). Ini dengan menghitung keuntungan dari penjualan PT Bank Permata Tbk. Sedangkan pendapatan bersih Astra sekitar Rp 175,04 triliun pada 2020, turun sekitar 26% dibandingkan 2019 yang sebesar Rp 237,16 triliun.

Pada perdagangan Senin (15/3), saham ASII ditutup menguat 50 poin (0,09%) ke level Rp 5.525, dengan *market cap* Rp 223,6 triliun. Selama sepekan, harga ASII naik 0,5%, sedang dalam sebulan terakhir melemah 5,6%. ASII tercatat memiliki *price to earnings ratio* (PER) 13,84 kali dan *price to book value* (PBV) 1,14 kali, dengan *return on asset* (RoA) dan *return on equity* (RoE) masing-masing 4,78% dan 8,27%.

Kontribusi Otomotif Besar

Djony mengatakan lebih lanjut,

Kinerja Ekspor Kendaraan Bermotor dan Spare Parts



Penjualan Hybrid EV dan Battery EV di Indonesia (2020)

Bulan	EV	Hybrid	PHEV
Jan	20	15	2
Feb	2	54	2
Mar	0	62	1
Apr	0	10	0
Mei	0	0	0
Jun	0	24	0
Jul	0	56	0
Ags	0	136	0
Sep	1	233	1
Okt	54	195	0
Nov	33	142	0
Des	10	181	0
Total 2020	120	1.108	6

Sumber: Gaikindo

Astra berkomitmen memproduksi mobil listrik ke depan bekerja sama dengan pabrikan otomotif asal Jepang Toyota, karena mobil listrik ini adalah suatu keniscayaan di masa depan. Meski kini otomotif diterjang pandemi Covid-19, lanjut dia, kontribusi Astra terbesar kepada Astra.

"Kontribusi otomotif dan terkait kepada Astra sekitar 55%. Ini bukan hanya otomotif ya, tetapi otomotif dan kaitannya seperti jasa keuangan. Sedangkan puncaknya, seingat saya 20 tahun lalu, kontribusi otomotif itu sekitar 90%. Namun, kemudian, kami *kan* juga melakukan diversifikasi bisnis di Astra," paparnya.

Dalam kontribusi otomotif ini, motor menjadi penyumbang yang besar, karena pasar motor di Indonesia besar sekali. Pada 2011 misalnya, pasar motor baru di Indonesia 8 juta unit. Tahun lalu, diperkirakan masih terjual 3,9 juta motor baru, meski turun dibandingkan 2019 yang 6,5 juta unit.

"Sedangkan kontributor terbesar kedua tentunya UT Group. Ini menangan seperti *equipment, mining, construction*, dan energi," imbuhnya.

Dengan didukung pasar otomotif yang masih besar, lanjut dia, prinsipal seperti Toyota juga terus berkomitmen berinvestasi di Indonesia. Toyota tercatat telah berkomitmen investasi sebesar US\$ 2 miliar di Indonesia.

"Toyota memang sudah ada ko-

Penjualan Mobil BEV berdasarkan Negara Tahun 2013 - 2018 (Ribu Kendaraan)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Australia	0,19	0,37	0,76	0,67	1,21	1,80
Brazil	0,13	0,06	0,06	0,13	0,07	0,09
Kanada	1,64	2,83	4,38	5,22	8,71	22,66
Chile	0,01	0,00	0,01	0,02	0,12	0,11
Tiongkok	14,61	48,91	146,72	257,00	468,00	815,87
Finlandia	0,05	0,18	0,24	0,22	0,50	0,78
Prancis	8,78	10,57	17,27	21,76	25,98	31,06
Jerman	5,31	8,35	12,08	11,32	25,07	36,06
India	0,41	1,00	0,45	2,00	1,20	2,30
Japan	14,76	16,11	10,47	15,46	18,10	26,53
Korea Selatan	0,60	1,31	2,92	5,10	13,30	29,63
Meksiko	0,01	0,05	0,09	0,25	0,23	0,20
Belanda	2,25	2,66	2,54	3,74	8,63	25,07
Selandia Baru	0,03	0,11	0,30	1,16	2,94	4,36
Norwegia	8,20	18,09	25,78	24,22	33,03	46,14
Portugal	0,14	0,19	0,67	0,81	1,89	4,43
Afrika Selatan	0,03	0,01	0,12	0,10	0,07	0,07
Swedia	0,43	1,24	2,96	2,95	4,36	7,15
Thailand	0,01	0,01	0,01	0,00	0,03	0,20
Inggris	2,68	6,81	10,10	10,51	13,55	15,74
Amerika Serikat	47,89	63,42	71,04	86,73	104,49	238,82
Lainnya	5,13	8,72	14,21	14,20	22,86	34,97
Total	113,09	191,00	323,18	463,57	754,34	1345,04
Pertumbuhan	68,9%	69,2%	43,4%	62,7%	78,3%	

Sumber: Global EV Outlook 2019 - International Energy Agency (IEA)

mitmen investasi yang besar, untuk semua grup Toyota yang ada di Indonesia, dari hulu hingga hilir. Ini termasuk di dalamnya pengembangan BEV. Tidak menutup kemungkinan BEV diproduksi di Indonesia, tetapi semua ada hitungan dan skala ekonominya," ucap dia.

Toyota akan memperhitungkan apakah masyarakat Indonesia sudah bisa menerima BEV dengan penuh dan kemudian infrastrukturnya apakah sudah tersedia. Di sisi lain, pihaknya juga tidak mau ketinggalan terkait pengembangan mobil listrik, itulah sebabnya sudah mempunyai *roadmap* untuk mobil listrik, meski belum bisa menyampaikan secara detail.

"Kami *kan* tidak bisa menunggu, ini masalah antara telur sama ayam. Buat kami adalah akan mempersiapkan terus, kalau *timing*-nya tepat, secara bertahap kami akan meluncurkan. Tetapi, Toyota mempunyai

komitmen untuk menyukseskan agenda besar pemerintah, untuk misalnya 3-5 tahun ke depan ikut mempopulerkan penggunaan BEV. Kalau memang 15-20 tahun lagi semuanya harus BEV, saya pastikan bahwa kami harus siap," ucap Djony.

Djony menegaskan pula, meski dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, pihaknya tidak boleh kehilangan pandangan ke arah masa depan. Itulah sebabnya, investasi atau belanja modal yang memang penting untuk masa depan harus dilakukan.

"Ambil contoh pada November tahun lalu, kami masih membeli jalan tol. Kami juga membeli sisa 50% saham dari partner di asuransi jiwa Aviva, nilainya Rp 1,4 triliun. Sedangkan yang jalan tol itu kurang lebih Rp 600 miliar. Tak hanya ekspansi unit bisnis, bahkan bisa saja *bikin* pilar bisnis baru, kami tidak segan-segan mengucurkan investasi di sana," tandasnya. (ac/sny/rid/az/pd/en)

Investor Daily/STR / AFP



Produksi Manufaktur Tiongkok

Para pekerja sedang merakit sebuah truk di pabrik Jianghuai Automobile Group Corp (JAC) di kota Qingzhou, Provinsi Shandong, Tiongkok, Senin (15/3).

Negara-Negara UE Mengeluh Distribusi Vaksin Tidak Merata

Oleh **Happy Amanda Amalia**

► LONDON – Enam negara dari anggota Uni Eropa (UE) menyampaikan kekhawatiran tentang sistem pendistribusian vaksin virus corona Covid-19. Distribusi disebut tidak merata apalagi AstraZeneca – sebagai salah satu produsen vaksin tersebut – kembali memangkas target pengiriman dosis vaksinnya ke UE.

Menurut laporan, Austria, Latvia, Republik Ceko, Bulgaria, Kroasia, dan Slovenia telah menuliskan surat yang ditujukan ke Komisi Eropa pada Sabtu (13/3), untuk menyampaikan keluhan bahwa pemberian vaksin telah dilakukan secara tidak proporsional di antara 27 negara dalam UE. "Jika sistem ini dijalankan, maka akan terus menciptakan dan memperburuk disparitas besar di antara negara-negara anggota pada musim panas ini," demikian surat yang dituliskan para kepala negara, yang diperoleh *CNBC* pada Senin (15/3). Sebagai informasi, pada awalnya telah disepakati bahwa vaksin yang dibeli oleh UE akan dibagikan

secara proporsional sesuai ukuran populasi suatu negara. Tetapi beberapa negara memperkenalkan sistem fleksibilitas sehingga mereka dapat memilih lebih banyak vaksin spesifik berdasarkan harga dan kondisi pemeliharaan atau penyimpanannya. Menanggapi surat dari enam negara anggota UE, Komisi Eropa mengatakan bahwa distribusi adalah proses transparan dan itu merupakan keputusan negara-negara anggota untuk memperkenalkan fleksibilitas ini.

"Di bawah sistem itu, jika sebuah negara anggota memutuskan untuk tidak mengambil alokasi pro rata, dosisnya didistribusikan kembali di

antara negara anggota lain yang tertarik," demikian disampaikan komisi itu dalam sebuah pernyataan.

Menurut laporan media, di Bulgaria, misalnya, memilih untuk menerima lebih sedikit vaksin buatan Pfizer dan BioNTech, vaksin yang paling mahal, dan lebih banyak vaksin yang dikembangkan oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford.

Alhasil, negara-negara UE lainnya dapat membeli kelebihan vaksin buatan Pfizer dan BioNTech.

Namun Pemerintah Bulgaria tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentarnya oleh *CNBC* terkait fleksibilitas pembelian vaksin, pada Senin. Menurut data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Centre for Disease Prevention and Control/CDC) Eropa, Bulgaria dan negara-negara penandatangan lainnya termasuk di antara negara-negara anggota Uni Eropa dengan jumlah penerima vaksin terendah sejauh ini.

"Mereka khawatir bahwa tanpa perubahan apa pun, beberapa negara UE akan dapat mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) dalam beberapa pekan, sementara yang lain akan tertinggal jauh," demikian menurut isi surat.

Keluhan mereka menyusul beredarnya kabar bahwa AstraZeneca

tidak akan memenuhi target pengiriman dosis vaksinnya dalam beberapa bulan mendatang. Perusahaan farmasi Swedia-Inggris tersebut telah mengonfirmasi kepada *CNBC* pada Senin, bahwa akan mengirimkan 30 juta dosis ke UE pada akhir kuartal pertama dan 70 juta dosis lainnya selama kuartal kedua.

Menurut laporan, angka-angka itu berada di bawah perkiraan yang diterima oleh blok itu.

"Mengapa mereka membuat ini sekarang, mengetahui bahwa Austria dapat menjadi dewan pengarah, seperti 26 negara anggota lainnya, dan telah diberitahu tentang alokasi sebelumnya seperti yang lainnya," tutur seorang pejabat Eropa kepada *CNBC* pada Minggu (14/3).

Komentar tersebut menunjukkan bahwa keenam negara itu sebenarnya dapat menangani masalah ini secara internal, daripada menulis surat dan memublikasikannya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Irlandia Pascal Donohoe mengatakan kepada *CNBC* pada Senin bahwa jika bukan karena tugas Komisi Eropa untuk mengawasi distribusi vaksin, maka masalahnya akan menjadi lebih besar. Isu ini diperkirakan masuk dalam pembahasan di pertemuan puncak Eropa berikutnya pada akhir bulan ini. (**sumber lain**)

Penjualan Ritel Indikasikan Pemulihan Ekonomi Tiongkok Berlanjut

BEIJING – Produksi industri dan penjualan ritel Tiongkok melonjak dalam dua bulan pertama tahun ini, data resmi menunjukkan pada Senin (15/3). Hasil tersebut menggarisbawahi pemulihan negara itu dari dampak pandemi virus corona Covid-19.

Produksi industri Tiongkok melonjak 35,1% pada periode tersebut. Ini merupakan kenaikan terbesar dalam beberapa dekade. Sementara itu penjualan ritel melampaui ekspektasi dengan pertumbuhan 33,8%.

Tetapi Biro Statistik Nasional (NBS) mengatakan, lonjakan terbaru itu sebagian dikarenakan distorsi dari basis rendah dalam periode yang sama tahun lalu.

Kedua indikator tersebut anjlok pada bulan-bulan awal 2020, setelah Covid-19 muncul di Tiongkok tengah dan menyebar dengan cepat di seluruh negeri.

Namun, ekonomi terbesar kedua di dunia itu menjadi yang pertama bangkit kembali secara global, setelah memberlakukan penguncian ketat dan langkah-langkah pengendalian virus. Tiongkok mencatat pertumbuhan ekonomi setahun penuh sebesar 2,3%.

"Setelah menghilangkan efek dasar, pertumbuhan indikator utama stabil dan indikator makro berada dalam kisaran yang wajar," kata NBS, Senin (15/3).

Data untuk Januari dan Februari dirilis bersama untuk menghilangkan pengaruh ketidakpastian yang dibawa terkait liburan Tahun Baru Imlek Tiongkok, yang biasanya jatuh dalam periode ini.

Produksi industri dalam dua bulan pertama naik hampir 17% dari periode yang sama pada 2019, menurut pihak berwenang.

Kegiatan industri kemungkinan besar didorong oleh fakta bahwa banyak pekerja imigran yang enggan kembali ke kampung halaman mereka karena pembatasan Covid-19, yang berarti beberapa pabrik tetap

bekerja selama liburan atau dibuka kembali lebih cepat.

"Kami memperkirakan aktivitas akan tetap kuat dalam waktu dekat, karena pelonggaran pembatasan virus meningkatkan konsumsi dan stimulus fiskal di antara mitra dagang utama yang akan menjaga ekspor tetap kuat," kata ekonom senior Capital Economics Tiongkok Julian Evans-Pritchard.

Tingkat pengangguran perkotaan naik menjadi 5,5% pada Februari, naik dari 5,2% pada Desember 2020, data Senin menunjukkan. Tetapi para ahli memperingatkan, level riil mungkin lebih tinggi karena tingginya jumlah pekerja di pekerjaan tidak resmi.

"Meskipun kami melihat perbaikan pada lingkungan ekonomi global, mereka masih sangat berhati-hati," ujar kepala penelitian untuk OCBC Bank Tommy Xie, tentang masalah pengangguran.

Dia mencatat tingkat pengangguran perkotaan tetap dalam target pemerintah. Tommy menambahkan, kehati-hatian mungkin disebabkan rekor jumlah lulusan potensial lainnya yang memasuki pasar kerja tahun ini.

Menurutnya, saat ini ada pemulihan tidak merata yang sedang berlangsung, dengan perusahaan dan industri yang lebih kecil seperti bisnis perjalanan belum sepenuhnya pulih dari dampak serangan virus corona.

"Secara keseluruhan, kumpulan data ini menunjukkan perekonomian Tiongkok pulih dari Covid-19, terutama dalam hal konsumsi. Tetapi basis yang sangat rendah juga menutupi sejauh mana angka-angka kuat ini didorong oleh pertumbuhan yang mendasarinya. Efek dasar rendah ini bisa bertahan hingga April, karena aktivitas ekonomi mulai meningkat pada Mei tahun lalu," kata Iris Pang, kepala ekonom untuk ING untuk Tiongkok. (**afp/eld**)

Singapura dan Australia Rencanakan *Travel Bubble*

SINGAPURA – Saham maskapai Singapore Airlines pada Senin (15/3) melonjak setelah mengonfirmasikan sedang dalam pembicaraan dengan Australia untuk menjalankan skema gelembung perjalanan (*travel bubble*).

Saham Singapore Airlines naik 5,47% dalam sesi perdagangan sore, setelah pada hari sebelumnya melonjak sebanyak 8,49%. Saham terkait maskapai seperti SATS – anak perusahaan yang menyediakan catering dalam penerbangan – juga naik 3,43%; sementara itu, SIA Engineering naik 4,65%.

Maskapai bendera Australia, Qantas turut dikabarkan naik 3,77% pada saat penutupan pasar. Skema gelembung perjalanan udara bakal memungkinkan penduduk Singapura dan Australia melakukan perjalanan antara kedua negara tanpa perlu karantina. Namun, rute perjalanan internasional itu relatif terbatas sejak pembatasan global ditutup tahun lalu, karena pandemi Covid-19.

Baik Singapura dan Australia tampaknya telah mengendalikan infeksi secara relatif, sementara program vaksinasi juga sedang berjalan.

"Singapura saat ini sedang berdiskusi dengan Australia tentang pengakuan bersama atas sertifikat vaksinasi, serta dimulainya kembali perjalanan dengan prioritas bagi pelajar dan pelancong bisnis. Kami juga membahas kemungkinan gelembung perjalanan udara yang akan memungkinkan penduduk Singapura dan Australia melakukan perjalanan antara kedua negara tanpa perlu karantina," demikian pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Singapura,

pada Minggu (14/3).

Pernyataan menambahkan, warga negara Australia dapat transit melalui Singapura tanpa karantina untuk kembali ke rumah jika melakukan perjalanan dengan rute transit yang disetujui, dan mematuhi protokol kesehatan masyarakat negara bagian.

Wakil Perdana Menteri Australia Michael McCormack mengatakan kepada media setempat pada Senin, bahwa Negeri Kangguru ini berpotensi menerapkan gelembung perjalanan dengan Singapura pada Juli.

Tetapi, menurut transkrip sambutan, ia menambahkan bahwa meskipun pembicaraan produktif, pembahasannya masih dalam tahap awal.

Pariwisata Global Terpukul

Seperti diketahui, sektor perjalanan dan pariwisata global terpukul tahun lalu ketika pandemi Covid mendorong penutupan perbatasan, dan menanggulung sebagian besar perjalanan internasional. Bahkan, maskapai-masapai penerbangan harus berjuang untuk tetap bertahan. Tetapi prospek tahun ini masih suram, terutama untuk maskapai besar yang memberikan layanan penuh.

Menurut data dari otoritas pariwisata, sektor pariwisata Singapura mengalami penurunan tajam dalam sembilan bulan pertama 2020. Kedatangan pengunjung internasional pun turun 81,2% menjadi hanya 2,7 juta dari tahun lalu. Sedangkan penerimaan pariwisata turun 78,4% menjadi **Sin\$ 4,4 miliar (US\$ 3,27 miliar)**. (**sumber lain/nya**)

Investor Daily/Patrik Stollarz / AFP



Pembekuan Operasional

Gambar yang diambil pada Senin (15/3) ini memperlihatkan gedung yang menaungi kantor pusat bank Greensill di kota Bremen, Jerman. Pengawas finansial Jerman, Bafin, membekukan kegiatan operasional anak usaha perbankan grup usaha asal Inggris Greensill Capital tersebut, karena lonjakan beban utang.

PENANGGUHAN VAKSIN ASTRAZENECA

Daftar Negara Makin Panjang

BERLIN – Daftar negara yang menanggulung penggunaan vaksin buatan AstraZeneca-Universitas Oxford untuk vaksinasi Covid-19 semakin panjang. Pada Senin (15/3), Jerman, Italia, Prancis, dan juga sebelumnya Irlandia serta Belanda menyusul langkah sejumlah negara Eropa dan dunia, yang menghentikan dulu penggunaan vaksin tersebut. Yang menjadi sumber kekhawatiran adalah beberapa laporan insiden pembekuan darah di antara orang yang sudah mendapatkan vaksin tersebut.

"Menyusul laporan-laporan baru pembekuan darah di pembuluh darah otak yang terkait dengan vaksinasi di Jerman dan Eropa, PEI memandang perlu ada investigasi lebih lanjut," kata Kementerian Kesehatan Jerman, merujuk pada rekomendasi otoritas vaksin Jerman, Paul Ehrlich Institute (PEI).

Regulator di Italia pada Senin mengumumkan hal serupa sebagai langkah pencegahan. Keputusan ini diambil sejalan dengan langkah serupa dari beberapa negara Eropa lainnya.

"AIFA memutuskan untuk memperpanjang larangan penggunaan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca di seluruh Italia sebagai pencegahan tapi sifatnya sementara sambil menunggu putusan Badan Pengawas Obat-Obatan Eropa (EMA)," kata regulator Italia tersebut.

Dari Paris, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya juga menanggulung penggunaan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca.

Diputuskan untuk menanggulung penggunaan vaksin AstraZeneca sebagai pencegahan, tapi kami berharap dapat segera menggunakannya lagi jika EMA memutuskan untuk mengizinkan," kata Macron, dalam konferensi pers.

Ia memperkirakan bahwa keputusan dari EMA keluar pada Selasa (16/3) siang. Sebelumnya, pemerintah Belanda pada Minggu (14/3) memutuskan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca tidak akan digunakan sampai setidaknya 29 Maret 2021.

Sementara Irlandia pada hari yang sama dengan Belanda menyatakan telah menghentikan sementara penggunaan vaksin tersebut sebagai langkah pencegahan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada pekan lalu berusaha meredakan kekhawatiran terhadap masalah keselamatan dari vaksin tersebut. Menurut WHO, tidak ada kaitan antara pemberian vaksin tersebut dengan naiknya risiko timbulnya pembekuan darah. Badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut mendesak negara-negara untuk terus melanjutkan penggunaan vaksin tersebut untuk vaksinasi Covid-19.

Keputusan yang diambil Belanda dan Irlandia berdasarkan pernyataan badan kesehatan Norwegia, yang mendapatkan pemberitahuan bahwa tiga tenaga kesehatannya dirawat karena pendarahan, pembekuan darah, dan penyusutan trombosit darah setelah

Daftar Negara yang Menanggulung Vaksin AstraZeneca:

1. Denmark
2. Islandia
3. Norwegia
4. Bulgaria
5. Thailand
6. Republik Demokratik Kongo
7. Irlandia
8. Belanda
9. Indonesia
10. Jerman
11. Italia
12. Prancis

Negara yang Menanggulung Kelompok Dosis Vaksin AstraZeneca:

1. Austria
2. Estonia
3. Lituania
4. Latvia
5. Luksemburg
6. Italia
7. Rumania

menerima vaksin AstraZeneca. Norwegia pun menanggulung penggunaan vaksin tersebut.

Negara pertama di Eropa yang menanggulung vaksin AstraZeneca adalah Denmark pada 11 Maret 2021 dengan alasan tersebut. Disusul Islandia dan Norwegia pada hari yang sama.

Pernyataan EMA dan Produsen

EMA, hingga berita ini diturunkan, menyatakan tidak ada indikasi bahwa vaksin AstraZeneca menyebabkan pembekuan darah. EMA yakin manfaatnya jauh lebih besar ketimbang risikonya.

Di luar Eropa, Thailand menanggulung dimulainya program vaksinasi Covid-19. Rencananya PM Prayut Chan-O-cha yang akan menjadi orang pertama divaksin dengan vaksin tersebut. Pemerintah Indonesia juga pada Senin memutuskan untuk menanggulung penggunaan vaksin AstraZeneca.

Pihak AstraZeneca pada Minggu (14/3) menyatakan bahwa hasil pengkajian secara hati-hati terhadap seluruh data keselamatan yang ada dari lebih 17 juta orang yang sudah divaksin di Uni Eropa (UE) dan Inggris dengan vaksin Covid-19 bukannya menunjukkan tidak ada bukti naiknya risiko emboli paru-paru, pembekuan pembuluh vena dalam di kelompok usia, gender, dan kelompok penerima mana pun di negara mana pun.

Di UE dan Inggris, tambah AstraZeneca, ada 15 kejadian pembekuan vena dalam dan 22 kejadian emboli paru-paru di antara penerima vaksin.

"Itu jauh lebih kecil dibandingkan yang diperkirakan terjadi secara alami di antara populasi umum (di sana) dan juga sama di (negara-negara lain) yang sudah menerima vaksin Covid-19," kata AstraZeneca. (**afp/sumber lain/sn**)

Investor Daily/David Gita Riza



Penggunaan Internet

Seorang anak menunjukkan hasil tugasnya melalui smartphone saat sekolah daring di Depok, Senin (15/3/2021). Trafik internet Indonesia naik sampai 40% selama pandemi, namun kecepatan berselancar di dunia maya justru stagnan.

KEMKOMINFO TERUS AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

Adopsi dan Daya Saing Digital Provinsi Terus Meningkatkan

Oleh Emanuel Kure dan Abdul Muslim

► JAKARTA – Hasil studi East Ventures dan Katadata menyebutkan bahwa adopsi layanan dan daya saing digital antarprovinsi di Indonesia terus naik dan makin merata di tengah pandemi Covid-19. Sementara itu, Kemkominfo meneguhkan komitmennya untuk mengakselerasi transformasi digital di Tanah Air.

East Ventures, perusahaan *venture capital* yang memelopori investasi *start-up* digital di Indonesia, dan Katadata Insight Center, meluncurkan *East Ventures Digital Competitiveness Index 2021* (EV-DCI 2021). Hasil studi menyimpulkan bahwa adopsi layanan dan daya saing digital antarprovinsi di Indonesia terus naik dan makin merata di tengah pandemi Covid-19.

Co-Founder & Managing Partner East Ventures Willson Cuca mengatakan, adanya pandemi Covid-19 sedikit menggerak pertumbuhan pesat ekonomi digital di Tanah Air. Namun, pandemi juga telah membantu Indonesia mengakselerasi adopsi layanan digital. "Seperti ketapel yang ditarik ke belakang, ekonomi digital Indonesia bakal melompat menuju era keemasan setelah pandemi bisa teratasi," ujar Willson Cuca, dalam pernyataannya, Senin (15/3).

Seiring dengan itu, pemerataan daya saing digital antarprovinsi di Tanah Air juga tampak dari kenaikan skor median indeks daya saing digital (EV-DCI) dari 27,9 tahun 2020 naik menjadi 32,1 pada 2021. Ada dua faktor utama yang mendorong perkembangan dan pemerataan daya saing digital di Indonesia di tengah pandemi.

Pertama, pembangunan infrastruktur yang makin merata. Infrastruktur merupakan pilar EV-DCI dengan kenaikan skor tertinggi, yakni 7,5 poin menjadi 54,3 pada 2021. Sejumlah indikator yang menopang adalah rasio desa yang mendapatkan sinyal 3G dan 4G, rasio rumah tangga yang

memiliki sambungan telepon tetap, serta tingkat gangguan listrik.

Kedua, peningkatan pengeluaran untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengindikasikan bahwa penduduk Indonesia di seluruh provinsi makin banyak menggunakan layanan dan transaksi berbasis digital.

Pilar pengeluaran TIK dalam indeks EV-DCI pun naik 6,3 poin. Sejumlah indikator yang menopang kenaikan skor ini adalah peningkatan rasio rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk TIK, pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk TIK, serta balas jasa dan upah pekerja di sektor TIK. Perkembangan signifikan pada kedua pilar EV-DCI tersebut melengkapi kekuatan daya saing Indonesia dalam penggunaan/adopsi TIK. Meskipun hanya naik 2,7 poin pada 2021, penggunaan TIK di Indonesia adalah pilar EV-DCI dengan daya saing paling tinggi dan memiliki skor paling merata dibandingkan dengan pilar lain.

Adopsi Layanan

Di tengah pandemi Covid-19, telah terjadi lompatan adopsi layanan digital di beberapa vertikal di industri teknologi. Sekitar 2,5 juta penjual (*merchant*) telah bergabung di platform *marketplace* Tokopedia sepanjang pandemi dibandingkan dengan 7 juta *merchant* yang bergabung selama 10 tahun sebelumnya.

Ruangguru kini juga digunakan oleh lebih dari 22 juta pelajar. Salah satu produk Ruangguru, kelas *online* gratis yang disediakan oleh *start-up*



Wilson Cuca

tersebut selama pandemi, telah membantu sekitar 10 juta siswa di seluruh wilayah Tanah Air.

Warung Pintar juga terus berekspansi untuk mendukung pemilik warung dan telah bermitra dengan 230.000 peritel di 65 kota.

Platform logistik Waresix, yang kini mencakup 40.000 truk dan 375 gudang di sekitar 200 kota di seluruh Indonesia, juga membantu *brand* untuk mendistribusikan produk dengan efisien meskipun berhadapan dengan keterbatasan selama pandemi.

Transformasi Digital

Sementara itu, dalam wawancara khusus dengan tim EV-DCI 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk mendorong percepatan transformasi digital.

"Kami memprioritaskan APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur digital, membiayai internet yang terjangkau, serta untuk meningkatkan *skill* SDM," kata Menkeu.

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail menyampaikan, pihaknya berupaya untuk mengakselerasi transformasi digital di Indonesia sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, berdasarkan agenda



Ismail

transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, *pertama*, Indonesia tengah berupaya untuk mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, yakni penyediaan akses internet untuk 12.500 desa/kelurahan serta titik pelayanan publik.

Kedua, Presiden meminta Kemkominfo untuk mempersiapkan peta jalan (*roadmap*) transformasi digital di sektor strategis, antara lain pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran.

Ketiga, integrasi pusat data nasional dipercepat, lalu, *keempat*, kebutuhan SDM digital disiapkan. Indonesia membutuhkan talenta digital kurang lebih 9 juta untuk 12 tahun ke depan, atau sekitar 600.000 per tahun.

Selanjutnya, Kemkominfo juga perlu mempersiapkan hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Semua upaya tersebut membutuhkan kerja sama dari semua ekosistem dan *stakeholder* di Tanah Air.

"Kemkominfo akan berperan sebagai orkestrasi yang akan mendorong percepatan transformasi digital. Karena, Pak Jokowi meminta ini supaya diselesaikan dalam waktu dua tahun ke depan," ujar Ismail, dalam *webinar* bertajuk 'Akselerasi Transformasi Digital dan Making Indonesia 4.0 di Era Pandemi', Senin (15/3).

Kemkominfo Kembali Lelang Pita Frekuensi 2,3 GHz

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kembali membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang 2.360-2.390 MHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2021, baik 4G dan jika memungkinkan 5G.

Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu mengatakan, sesuai dengan pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, penetapan pengguna pita frekuensi radio dilaksanakan melalui mekanisme seleksi ketika peminat lebih banyak dari ketersediaan pita frekuensi radio.

Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 72 Tahun 2021 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2021, Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2021 pun mengumumkan beberapa hal.

"*Pertama*, seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2021 dinyatakan dibuka," ujar Nando, panggilan akrab Ferdinandus Setu, dalam pernyataannya, Senin (15/3).

Kedua, lanjut dia, tujuan pelaksanaan seleksi mencakup beberapa hal, yaitu untuk menambah pita frekuensi radio bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler dalam rangka meningkatkan kapasitas jaringan bergerak seluler.

Kemudian, seleksi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan bergerak seluler dan mendorong akselerasi



Ferdinandus Setu

penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler dengan teknologi generasi keempat (4G/LTE).

"Dan, jika memungkinkan juga terimplementasikannya teknologi generasi kelima (5G/IMT-2020) serta mengoptimalkan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio," imbuhnya. *Ketiga*, seleksi tahun 2021 kali ini dinyatakan terbuka untuk seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan di dalam dokumen seleksi.

Keempat, seleksi dilaksanakan dengan objek seleksi pada pita frekuensi radio 2,3 GHz yang terdiri atas tiga blok pita frekuensi radio di dalam rentang 2.360-2.390 MHz, dengan lebar pita masing-masing blok adalah 10 MHz.

Kelima, peserta seleksi diberikan kesempatan untuk mengajukan penawaran minimal satu blok (1x10 MHz) dan diperkenankan melakukan penawaran dua blok (2x10 MHz), atau tiga blok (3x10 MHz).

"Karena itu, tidak ada pembatasan jumlah blok yang dapat dimenangkan oleh peserta seleksi sesuai dengan hasil seleksi," tutur Nando. (Im)

NEC Dukung Manufaktur Adopsi Transformasi Digital

JAKARTA – PT NEC Indonesia mendukung sektor manufaktur di Indonesia untuk mengadopsi transformasi digital. Lebih dari 450 perusahaan di sektor industri pengolahan dan lainnya pun hadir pada acara *Web Summit NEC Industry 4.0* dengan mengusung tema *What's Next for Digital Transformation in Manufacturing Industry 4.0*.

Pada kesempatan tersebut, hadir Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pembicara utama. Acara virtual tersebut diadakan pada tanggal 10 Maret 2021 dan diselenggarakan bersama oleh NEC Indonesia dan Asosiasi Big Data & AI (ABDD).

Industri 4.0 yang juga dikenal dengan transformasi Industri 4.0 akan membantu sektor manufaktur menjawab tantangan yang timbul dari pandemi Covid-19 dengan menyesuaikan dan menerapkan protokol kesehatan, mengoptimalkan dan meningkatkan manajemen proses, serta sumber daya manusia melalui sarana digital.

Semakin banyak perusahaan manufaktur yang menerapkan sejumlah teknologi informasi baru, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), *internet of things* (IoT), *big data*, dan analitik, akan mendorong pertumbuhan dan profitabilitas.

Dengan percepatan digitalisasi dan penyebaran IoT di industri manufaktur, aspek keselamatan, efisiensi pemeliharaan, dan kualitas produk dapat divisualisasikan dan dianalisis berdasarkan data

yang dikumpulkan oleh sejumlah besar sensor yang dipasang di berbagai fasilitas dan lokasi pabrik.

"NEC yakin, peningkatan penggunaan berbagai jenis data digital akan menciptakan solusi baru yang lebih bernilai. Perusahaan yang dapat memanfaatkan data untuk memberikan nilai yang lebih besar akan menonjol di era baru ini," kata Direktur Operasi NEC Indonesia Edi Rachmadi, dalam keterangannya, Senin (15/3).

Dia menjelaskan, operasi sektor manufaktur sangat kompleks karena melibatkan interaksi manusia dan mesin. Produsen di Indonesia pun harus berinvestasi dalam transformasi digital dan mengoptimalkan prosesnya agar dapat melanjutkan perkembangannya selama dan setelah pandemi Covid-19.

Dengan menggunakan AI di bidang manufaktur, produsen mendapatkan kemampuan untuk membuat keputusan penting berdasarkan data waktu nyata (*real-time*) dan meningkatkan proses produksinya.

Pengendalian kualitas (*quality control*) dan produktivitas secara keseluruhan juga akan meningkat secara signifikan. "NEC ingin membantu sektor manufaktur Indonesia berhasil dan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai pusat manufaktur," imbuh Edi.

Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Indonesia telah menetapkan 10 prioritas nasional menuju Indonesia 4.0 untuk sektor manufaktur. (Im)

Telkomsel Dukung Program Bantuan Kuota Data PJJ 2021

JAKARTA – Telkomsel mendukung kelanjutan program bantuan kuota data/internet tahap kedua dari pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, yang akan dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei 2021. Kuota data diberikan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, Telkomsel terus berinisiatif untuk mengambil peran terdepan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran masyarakat menjalankan aktivitas keseharian di masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut telah turut mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang kini semakin mengadopsi pemanfaatan teknologi berbasis digital guna men-



Setyanto Hantoro

dukung berbagai aktivitas, termasuk proses PJJ.

"Telkomsel akan senantiasa mendorong upaya kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan guna mendampingi masyarakat menjalani setiap fase kehidupan agar dapat membuka berbagai kemungkinan kemajuan kualitas hidup yang lebih baik ke depan," ujar Setyanto, dalam keterangan-

nya, Senin (15/3).

Dia menjelaskan, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, telah mengatur pembagian besaran paket kuota data internet yang ditetapkan oleh Kemendikbud RI untuk setiap penerima manfaat.

Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat bantuan kuota sebesar 7GB/bulan serta peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 10GB/bulan untuk selama tiga bulan. Selanjutnya, pendidik/jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan bantuan kuota data sebesar 12GB/bulan serta dosen dan mahasiswa sebesar 15GB/bulan untuk selama tiga bulan.

"Penyaluran bantuan paket kuota data internet tahap dua ini akan dilakukan setiap tang-

gal 11-15 dalam periode tiga bulan, yakni dari Maret hingga Mei 2021 dan berlaku selama 30 hari sejak diterima," imbuh Setyanto.

Bantuan kuota merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Namun, kuota tak bisa digunakan untuk mengakses aplikasi yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk pembatasan untuk platform media sosial, yakni Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok.

Sementara itu, penyaluran bantuan paket kuota data internet tahap kedua pada Maret ini telah dilaksanakan secara berkala oleh Telkomsel pada 11-15 Maret 2021. Telkomsel pun memastikan seluruh penerima manfaat sudah sesuai dengan data yang telah terdaftar dan terverifikasi di sistem Kemendikbud RI. (Im)



Fasilitas 5G

Suasana jual beli *smartphone* di pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (15/3/2021). Beberapa *provider smartphone* mulai menyediakan fasilitas 5G. Jika 5G mulai masuk ke Indonesia, masyarakat hanya perlu pembaharuan *software* di *smartphone*.

Peran Strategis Komisaris Mencegah Pidana Korporasi

Kasus dugaan pidana korporasi yang melilit BUMN terus saja terjadi, antara lain PT Asuransi Jiwasraya, Asabri, BPJS Ketenagakerjaan dan terakhir masalah yang terkait dengan persewaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia dari pihak luar negeri yang ditengarai kemahalan seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini.

Oleh Wirawan B. Ilyas *)



■ Wirawan B. Ilyas

D i sisi lain adanya peluang menciptakan bisnis di era industri 4.0 bagi BUMN maupun swasta memberi harapan besar bagi bisnis berkembang lebih cepat dan menciptakan lapangan kerja yang semakin meluas. Namun, dalam perjalanannya tindakan korporasi tidak semulus yang diharapkan karena ruang pidana kerap mengancam akibat perbuatan hukum kurang profesional dijalankan komisaris sebagai lembaga pengawas yang sangat strategis secara hukum.

Padahal korporasi dituntut mengembangkan bisnis secara berkesinambungan serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Tuntutan supaya korporasi bertindak profesional masih diwarnai kegelisahan publik yang tiada henti ketika direksi terjerat kasus pidana merugikan keuangan korporasi.

Korporasi yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel, menjadi harapan pentingnya peran komisaris (Dewan Komisaris) atau Dewan Pengawas melakukan pengawasan dalam kapasitas menghindari perilaku direksi yang kurang tepat. Ketika direksi terkena tuntutan pidana, terkesan kuat peran komisaris dipertanyakan kinerjanya.

Peran Komisaris

Ketika aspek kerugian terjadi dalam suatu korporasi yang berimplikasi tuntutan pidana, logika sederhananya peran komisaris tidak berjalan. Padahal Pasal 1 angka 6 UU PT No 40/2007 menyatakan tugas Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberi nasihat kepada direksi. Betapa hebat peran komisaris yang tidak banyak diketahui publik.

Dari sisi hukum, sedikitnya dua peran komisaris yang dijalankan supaya korporasi terhindar dari tindakan menyimpang. Pertama, tindakan hukum berupa persetujuan rencana kerja. Korporasi tidak dapat berjalan jika tidak ada persetujuan komisaris (Pasal 64 ayat 2). Kedua, tindakan hukum menelaah laporan tahunan (Pasal 66 ayat 1).

Artinya, komisaris memiliki dasar hukum yang kuat dalam perannya melakukan pengawasan supaya korporasi tidak mengalami kerugian yang berefek pada tindakan pidana. Seandainya korporasi melakukan investasi yang menyimpang atau ada aset tidak tercatat dalam laporan keuangan korporasi, komisaris sudah dibekali dua senjata berbentuk 'persetujuan serta 'penelaahan'.

Dalam analisis penulis, boleh jadi dua hal ini yang mengakibatkan kasus-kasus hukum dari korporasi terus terjadi seperti halnya kasus Asabri, kasus Asuransi Jiwasraya, maupun kasus lainnya. Pertama,

pengawasan yang diciptakan undang-undang sudah dijalankan dengan benar atau belum? Inilah perenungan kita bersama.

Dilema Sanksi Pidana

Ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana, dilema hukum timbul, apakah korporasi yang bertanggungjawab atau pengurus korporasi? Pro kontra terus terjadi karena prinsip hukum pidana dikenakan kepada orang. Pemikiran klasiknya, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pelanggaran. Pengurus korporasi yang diancam pidana dan dipidana (Saleh, 1984).

Dilema sanksi terhadap korporasi menjadi dilema, terlebih dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5) UUPD menegaskan bahwa yang bertanggung jawab penuh atas kerugian perseroan (korporasi) adalah setiap anggota direksi (pengurus) sepanjang dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan. Namun, komisaris pun tidak kecuai karena Pasal 155 UUPD menyatakan komisaris pun bertanggung jawab jika ada kesalahan yang dilakukan.

Dilema sanksi pidana semakin nyata terlihat jika konteks penghukuman pidana bagi direksi diperhadapkan dengan doktrin *business judgement rule* yang kerap menjadi acuan bagi pengurus saat hendak mengambil langkah bisnis. Kasus Karen Agustian, mantan Dirut Pertamina, diputus lepas Mahkamah Agung dengan argumen penerapan doktrin *business*

jawab hukum para direksi. Peran komisaris sangat besar untuk mencegah terjadinya kerugian dan penyimpangan korporasi. Bahkan seandainya, peran komisaris lebih berat ketimbang direksi/pengurus dan bukan hanya sebagai formalitas belaka.

Posisi komisaris dalam korporasi tidak boleh dianggap sekadar posisi pelengkap. Tiga organ perseroan dalam UUPD (RUPS, direksi, dan komisaris) adalah organ yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk menjaga keseimbangan peran masing-masing supaya korporasi berjalan sesuai hukumnya. Ibarat payung, posisi komisaris adalah payung hukum yang melindungi kepentingan hukum direksi dan RUPS. Karena komisaris pun bisa mendapatkan kewenangan atas dasar kepentingan RUPS.

Kalau begitu, komisaris harus berperan aktif, tidak lagi berperan pasif. Contoh sederhana misalnya terjadi satu kontrak PT ABC (BUMN) dengan PT DEF, pemasok mesin pabrik dengan kontrak Rp 20 miliar. Alas hukumnya berupa perjanjian antara Direksi PT ABC dan PT DEF, serta bukti transaksi semua tersedia, artinya secara akuntansi semua memenuhi syarat. Uang Rp 20 miliar sudah ditransfer dari PT ABC kepada DEF. Saat ditelusuri, PT DEF beralamat di sebuah bengkel motor namun tidak pernah ada di situ.

Saat komite audit menjalankan audit diketahui transfer yang tertuju kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya persoalan hukum muncul berlatar-luar yang merugikan korporasi dan direksi menjadi korban. Itu sebabnya, peran aktif komisaris amat dibutuhkan terlebih bagi bisnis-bisnis yang memerlukan penelaahan lebih dahulu sebelum dijalankan.

Tidak tertutup kemungkinan, komisaris bisa membentuk komite pemantau risiko sebagai perangkat mendukung kebaikan terciptanya bisnis yang aman sekaligus perlindungan hukum bagi kepentingan korporasi. Komite yang dibentuk pun harus diisi oleh profesional yang kompeten di bidangnya dan independen. Perlindungan hukum menjadi tujuan yang mesti dipikirkan komisaris dalam menjalankan peran hukumnya.

Momentum 2021 adalah momentum menuju kepentingan hukum bagi korporasi di segala lini bisnis yang dijalankan. Negeri ini amat membutuhkan perlindungan hukum bagi bisnis. Peran aktif komisaris menjadi harapan menuju kondisi hukum yang tertib dan berkepastian bagi jalannya bisnis. Pengalaman pahit masa lalu harus dijadikan pembelajaran yang amat penting demi Indonesia maju. Semoga.

*) Akuntan Forensik, Advokat, Senior Partner Times Law Firm, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Unika Atma Jaya Jakarta.

Keadilan Insentif Pajak

Kabar bakal masuknya raksasa mobil listrik Amerika Serikat, Tesla Inc, ke Indonesia menimbulkan euforia luar biasa sejak tahun lalu. Banyak yang berpikir, Indonesia segera memasuki era mobil listrik. Terbayang jalanan macet Jakarta akan berseliweran mobil listrik dengan desain canggih dan futuristik.

Ketika bos Tesla, Elon Musk diberitakan akan bertemu para pejabat Indonesia Februari lalu, optimisme kian memuncak bahwa Indonesia bakal menjadi salah satu pusat produksi mobil listrik dunia. Saham-saham emiten produsen nikel di Bursa Efek Indonesia pun kecipratan sentimen positif sehingga harganya melejit. Maklumlah, nikel merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Di tengah belum adanya kejelasan pertemuan itu hingga kini, muncul berita 'menyodok' dari India yang mengklaim Tesla bakal membangun pabrik di negara berpenduduk terbesar kedua di dunia itu. Artinya, Tesla batal membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, namun hanya mendirikan industri sistem penyimpanan energi berkapasitas ekstra besar. Kabar mundurnya Tesla dibantah para pejabat kita dan ditegaskan bahwa negosiasi dengan Tesla masih berlanjut.

Jangan sampai sebuah kebijakan hanya ditujukan calon investor baru, tapi merugikan investor lama yang sudah ada. Kita tentu tidak ingin mendapat stigma sebagai negara yang tidak memberikan kepastian hukum di mata investor.

Boleh jadi, rumor batalnya Tesla investasi mobil listrik itu menjadi salah satu pemicu pemerintah mengubah kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tentang mobil listrik, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (15/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah membedakan perlakuan PPnBM antara mobil listrik full baterai (*Battery Electric Vehicle/BEV*) dan mobil hibrid, baik yang hibrid penuh maupun yang *Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)*.

Dalam beleid baru nanti, PPnBM untuk BEV tetap 0%, sedangkan untuk kategori berbagai jenis hibrid dikenai PPnBM bervariasi. Skema pertama diusulkan antara 5-7%, sedangkan skenario kedua dikenai tarif antara 8% hingga 14%. Seperti diketahui, mobil yang mengadopsi BEV sumber tenaganya murni berasal dari baterai. Sedangkan, PHEV memadukan dua mesin sekaligus, yakni mesin konvensional dan mesin berbasis baterai.

Menteri Keuangan mengakui, perubahan tarif ini dilakukan karena tarif lama yang diatur dalam PP No 73/2019 tersebut menyebabkan para investor yang akan membangun pabrik mobil listrik di Indonesia merasa tidak cukup kompetitif dibandingkan yang tidak *full battery*. Perubahan tarif PPnBM telah dibahas dalam sidang kabinet bersama Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Perindustrian, dan Kepala BKPM, serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Langkah pemerintah memberikan

insentif pajak untuk menarik investasi cukup tepat. Apalagi mobil listrik sedang menjadi tren global, karena dunia kini menghendaki alat transportasi yang bersih lingkungan. Selain itu, teknologi mobil listrik dipandang sebagai teknologi yang 'relatif baru', sehingga Indonesia bisa mengejar teknologi termutakhir dengan mengadopsi prinsip yang tepat. Negara kita berpotensi menjadi pemain utama kendaraan listrik dunia.

Lagi pula, Indonesia memiliki cadangan nikel berlimpah sebagai bahan baku baterai sehingga menjadi incaran investor-investor besar. Dalam hal ini, percepatan hilirisasi industri nikel harus menjadi fokus pemerintah agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi negara pengeksport sumber daya alam mentah yang kurang memberikan nilai tambah.

Sejumlah negara maju telah mendesain *roadmap* tentang penggunaan mobil listrik. Bahkan beberapa negara bakal melarang mobil berbahan bakar fosil yang polutif mulai 2040. Di Indonesia sendiri, emisi dari sektor transportasi mencapai 30% dari total emisi CO2. Emisi tertinggi terutama berasal dari transportasi darat yang berkontribusi 88% terhadap total emisi di sektor transportasi.

Dengan demikian, insentif pajak yang digulirkan pemerintah bukan saja bertujuan untuk meningkatkan investasi, namun juga untuk mengurangi emisi karbon. Indonesia telah berjanji untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada 2030 sebagaimana diatur dalam Paris Agreement. Kebijakan itu juga selaras dengan komitmen untuk memanfaatkan tren teknologi global yang memiliki fokus pada energi baru terbarukan.

Hal lain yang harus digarisbawahi dalam pemberian insentif pajak adalah aspek keadilan (*fairness*). Harap diingat bahwa sejumlah produsen mobil yang ada sudah telanjur mengembangkan mobil hibrid. Jangan sampai, insentif untuk mobil listrik (BEV) ini menjadi disinsentif bagi mobil hibrid. Sebagai gambaran, penjualan mobil listrik di Tanah Air pada 2020 baru mencapai 120 unit, sedangkan mobil hibrid terjual 1.108 unit.

Dengan kata lain, jangan sampai sebuah kebijakan hanya ditujukan untuk memanjakan calon investor baru, tapi merugikan investor lama yang sudah ada. Kita tentu tidak ingin mendapat stigma sebagai negara yang tidak memberikan kepastian hukum di mata investor.

Selain itu, insentif pajak juga jangan sampai menimbulkan kecemburuan dan memperburuk kesenjangan. Sebagai contoh, relaksasi PPnBM untuk pembelian mobil baru di bawah 1.500 cc, yang akan diperluas untuk mobil ber-cc lebih besar, bisa dipandang sebagai sikap pilih kasih pemerintah terhadap kelas menengah atas. Meski tujuan beleid itu untuk menggenjot konsumsi, kita harus ingat bahwa semakin banyak penduduk miskin dan penganggur yang menderita terimbas pandemi. □

“ Momentum 2021 adalah momentum menuju kepentingan hukum bagi korporasi di segala lini bisnis yang dijalankan. Negeri ini amat membutuhkan perlindungan hukum bagi bisnis. Peran aktif komisaris menjadi harapan menuju kondisi hukum yang tertib dan berkepastian bagi jalannya bisnis.

buktikan oleh penegak hukum adanya unsur kesalahan komisaris (*subjective guilt*). Mimpi penulis, seandainya komisaris menggunakan dua senjata hukum yang dimiliki atas dasar UU sesuai kapabilitasnya, tuntutan pidana tidak akan menyentuh korporasi seperti yang tengah terjadi.

Terlebih lagi tugas komisaris dibantu komite audit sebagaimana diatur dalam Pasal 121 untuk membantu melakukan audit khusus terkait kerugian keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas komite audit mendeteksi dua hal ini yang mengakibatkan kasus-kasus hukum dari korporasi terus terjadi seperti halnya kasus Asabri, kasus Asuransi Jiwasraya, maupun kasus lainnya. Pertama,

judgement rule.

Keseimbangan memaknai hukum dalam konteks melakukan pemahaman bisnis atas prinsip *business judgement rule* dengan kondisi pidana jika terjadi kerugian perseroan adalah pekerjaan rumah cukup panjang bagi penegakan hukum bagi korporasi. Jalan tengahnya tentu saja peran strategis komisaris sebagai lapis kedua untuk mencegah terjadinya kerugian sekaligus penguatan argumentasi hukum jika direksi hendak dipersalahkan.

Itu sebabnya, sedari awal menurut penulis, peran komisaris bukanlah peran yang biasa-biasa saja. Peran komisaris dengan dua senjata yang sudah penulis uraikan di atas, menjadi bukti hukum yang dapat melindungi tanggung

SURAT PEMBACA

Memprioritaskan Sektor Lingkungan

Kasus kebencanaan sudah tergelar di banyak daerah, dalam hal ini sebagai contoh untuk bencana alam adalah banjir bandang atau tanah longsor. Manusia punya andil besar dalam terjadinya bencana itu. Kelalaian dan sangat mungkin kesengajaan di antara kita dalam

aktivitas kehidupan yang abai terhadap kelestarian lingkungan atau bahkan merusak lingkungan.

Berharap pada kesadaran individu untuk peduli pada lingkungan yang lestari tentu baik, tetapi tentu tidak cukup efektif. Perlu pengurangan yang lebih mengikat dan bahkan memaksa. Dalam hal ini, regulasi pemerintah sangat penting adanya.

Oleh karena itu, sektor lingkungan harus menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan di provinsi

dan kota/kabupaten di Tanah Air. Pemprov dan pemkot/pemkab harus memberikan perhatian serius pada sektor lingkungan.

Dalam masalah banjir musiman, misalnya, program mitigasi mesti berhorizon panjang. Penurunan ruang terbuka hijau mesti segera ditangani.

Masalah lainnya yang juga terkait sektor lingkungan yang perlu diprioritaskan adalah masalah sampah, air bersih, hak hidup dan hak bermukim yang sehat bagi masyarakat.

Meskipun semua persoalan itu adalah persoalan klise atau masalah lama, namun itu senyatanya masih menjadi masalah besar bagi warga di banyak kota/kabupaten.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, apakah kita mau saudara-saudara ini menerima bencana ganda? Sudah terkena bencana ekologis, kini harus berhadapan juga dengan pagebluk Covid-19.

Bagus Senaputra
Depok

IMPOR BARANG MODAL NAIK 9,08% (MTM)

Industri dan Investasi Mulai Menggeliat

Oleh Arnoldus Kristianus

▶ JAKARTA – Nilai impor barang modal Indonesia pada Februari 2021 tercatat sebesar US\$ 2,15 miliar, naik 9,08% dibandingkan periode Januari 2021 (*month to month/mtm*) atau melonjak 17,68% dibandingkan periode sama 2020 (*year on year/yoy*). Kenaikan impor barang modal yang berkontribusi hingga 16,23% terhadap total impor tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi kegiatan industri atau manufaktur dan investasi ke depan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan, nilai impor barang modal mengalami kenaikan karena ditopang oleh peningkatan impor komponen mesin dari Jepang, Filipina, dan Singapura. Selama Februari 2021 lalu, nilai impor mesin dan perlengkapan elektrik naik sampai US\$ 172,8 juta. Alhasil, posisi impor meningkat baik secara *month to month* maupun *year on year*.

"Kami berharap bahwa peningkatan impor barang modal ini menunjukkan bahwa kegiatan industri (atau manufaktur) dan investasi di Tanah Air mulai bergerak bagus," ujar Suhariyanto dalam telekonferensi pers soal Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Februari 2021 dan Perkembangan Upah Pekerja/Buruh Februari 2021 di Kantor Pusat BPS, Jakarta pada Senin (15/3).

Sedangkan untuk nilai impor bahan baku/penolong sebesar US\$ 9,89 miliar, turun tipis 0,5% dari posisi Januari 2021, namun meningkat 11,53% dari Februari 2020. Kontribusi bahan baku/penolong terhadap total impor Februari 2021 ini mencapai sebesar 74,57%.

"Dengan memperhatikan struktur impor kita yang 74,57% berasal dari bahan baku, geliat impor ini boleh dibalang mengembirakan karena me-

ngindikasikan pergerakan industri dan investasi mulai bergulir," ucap Suhariyanto kembali menegaskan.

Surplus US\$ 2 Miliar

BPS melaporkan, secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2021 mengalami surplus US\$ 2 miliar dengan nilai ekspor sebesar US\$ 15,27 miliar, sedangkan impor mencapai US\$ 13,26 miliar.

Pada periode tersebut, nilai ekspor mengalami penurunan 0,19% dari bulan sebelumnya, namun tumbuh 8,56% dari periode sama 2020. Sedangkan nilai impor pada Februari 2021 turun 0,49% dibandingkan Januari 2021, namun naik 14,86% dibandingkan Februari 2020.

Kenaikan impor secara *year on year* tersebut merupakan yang pertama sejak Juni 2019, saat impor mengalami kenaikan 2,02%. "Pada Februari 2021 ini untuk pertama kalinya setelah sekian bulan mengalami pertumbuhan negatif, impor kita naik 14,86%," ungkap Suhariyanto.

Ia memaparkan, kenaikan ekspor pada Februari 2021 yang mencapai 8,56% (*yoy*) tersebut terjadi di sektor pertanian, industri, maupun tambang. Kenaikan ekspor pada komoditas pertanian mencapai 13%, barang industri sebesar 9%, dan komoditas tambang mencapai 7,53%.

Sedangkan menurut golongan penggunaan barang, Suhariyanto merinci, nilai impor Januari-Februari 2021 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada barang konsumsi US\$ 348,5 juta (15,24%), bahan baku/penolong US\$ 363,5 juta (1,87%), dan barang modal US\$ 65,2 juta (1,6%).

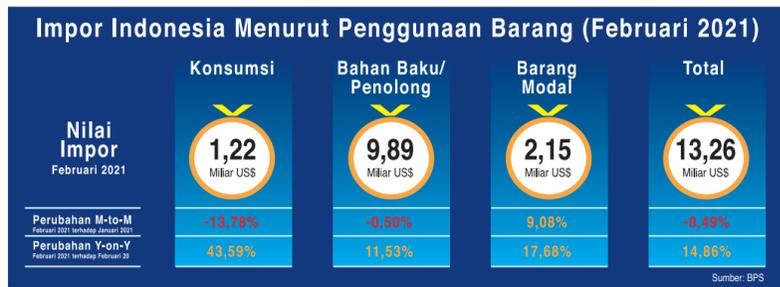
Bila dilihat secara kumulatif, neraca perdagangan dari Januari ke Februari 2021 surplus US\$ 3,96 miliar. Angka ini lebih tinggi dari posisi surplus periode sama 2020 yang sebesar US\$ 1,88 juta. Menurut Suhariyanto, hal ini menunjukkan performa ekspor yang menjanjikan karena naiknya permintaan dari berbagai negara serta didukung kenaikan berbagai harga komoditas.

Bank Indonesia (BI) memandang, surplus neraca perdagangan tersebut berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. "Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mendukung pemulihan ekonomi," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya.

Ekspansi Investasi

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjajada Kamdani menilai, peningkatan jumlah impor barang modal khususnya impor mesin dan perlengkapan elektrik sejalan dengan ekspansi investasi di sektor manufaktur atau ekspansi dalam bentuk adopsi teknologi produksi baru. Secara *month to month* (*mtm*) posisi impor mesin dan perlengkapan elektrik meningkat US\$ 172,8 juta.

Shinta mengatakan, bila asumsi ini benar terjadi misalnya karena dorongan keluarnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 Februari 2021, sinyal sangat menggembirakan untuk menopang pemulihan ekonomi jangka menengah dan panjang. "Namun, ini masih harus kita cek dengan



data realisasi investasi pada akhir kuartal I-2021. Semoga saja benar demikian," ucap Shinta saat dihubungi pada Senin (15/3).

Namun, ia mengatakan, dengan adanya peningkatan impor barang modal sebesar 9,08% dibandingkan Januari 2021 atau naik 17,68% dibandingkan Februari 2020 (*year on year/yoy*) tidak berarti sektor manufaktur sudah pulih sesuai ekspektasi. Sebab jumlah impor bahan baku dan bahan penolong masih termasuk kontraksi, dimana pada 2020 impor mengalami kontraksi yang cukup besar karena kondisi *lockdown* Tiongkok.

"Kalau sektor manufaktur su-

dah pulih, pertumbuhan impor dalam kategori bahan baku dan bahan penolong harusnya lebih besar dari 11% *yoy*, rata-rata kontraksi impor tahun lalu saja secara agregat 13%," ucap Shinta.

Menurut dia, bila dilihat secara rinci ekspansi impor pada Februari 2021 terjadi karena ada ekspansi produktivitas di sektor riil yaitu sektor makanan dan minuman, agrikultur, teknologi informasi dan kesehatan. Hal ini tidak mengherankan karena sektor-sektor tersebut tidak teralau terdampak sepanjang pandemi dan dapat berjalan, bahkan tumbuh relatif stabil meski kondisi pandemi.

Dua Masalah

Shinta mengatakan, ada dua masalah utama terhadap ekspansi manufaktur di Indonesia. Pertama, rendahnya efisiensi iklim usaha di sektor manufaktur, yang menyebabkan semua biaya di industri manufaktur nasional menjadi kurang bersaing dari biaya manufaktur di negara negara kompetitor. "Sebetulnya kita harap hal ini sudah bisa dikoreksi melalui implementasi UU Cipta Kerja dan reformasi struktural lanjutan," ucap Shinta.

Permasalahan kedua yaitu rendahnya daya beli dan *confidence* konsumsi pasar dalam negeri selama pandemi. Kebanyakan industri manufaktur nasional

berorientasi pasar domestik, bukan berorientasi ekspor. Hanya segelintir pelaku manufaktur yang ekspor dan masuk dalam rantai pasok global (*global supply chain*). Kalau pasar domestik tidak memiliki daya tarik konsumsi yang sehat seperti kondisi pra pandemi, industri manufaktur nasional akan menahant untuk melakukan ekspansi usaha.

"Karena itu saat ini kami lihat kebanyakan pelaku manufaktur sangat hati-hati melakukan ekspansi kinerja dan sangat mengontrol kuantitas *output* produksi agar tidak membanjiri pasar," ucap Shinta.

Ekspansi kinerja produksi juga sangat disesuaikan dengan ekspektasi pertumbuhan konsumsi di pasar domestik. Bila dilihat dari pola musiman biasanya konsumsi masih sangat rendah sampai ada momentum konsumsi domestik seperti Lebaran atau Ramadan. Pelaksanaan impor juga sangat dijaga sesuai dengan kebutuhan produksi.

"Sangat sedikit industri yang berspekulasi dan menimbang bahan baku impor, karena hampir semua *player* manufaktur melihat bahwa *demand* pasar domestik sepanjang tahun ini tidak stabil dan mudah berubah," pungkash Shinta.

Ekonom Ryan Kiryanto menambahkan, impor barang modal yang meningkat akan berdampak baik untuk kondisi perekonomian dalam negeri. Sebab, hal tersebut menunjukkan aktivitas di sektor riil berjalan dengan baik dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kalau impornya kebanyakan barang modal atau bahan baku, ini menjadi kabar positif. Sebab, ini berarti indikasi pabrik di dalam negeri beroperasi," ucap dia saat dihubungi pada Senin (15/3) malam.

Menurut Ryan, program vaksinasi mandiri atau gotong royong menghadirkan optimisme sehingga proses pemulihan ekonomi sudah berjalan *on the track*. Namun, ia melihat, pertumbuhan ekonomi baru akan berada dalam zona positif pada kuartal II 2021 ini. (ns)



Bahas Diskon PPNBM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja ini membahas program diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil. Diskon PPNBM ini mulai berlaku 1 Maret 2021.

Utang Luar Negeri RI Naik 2,6% Jadi Rp 5.889 Triliun

JAKARTA – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar US\$ 420,7 miliar atau setara Rp 5.889 triliun (kurs Rp 14.000), meningkat 2,6% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (*yoy*). Peningkatan utang LN akhir Januari ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,4% (*yoy*).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono merinci utang luar negeri tersebut terdiri dari utang LN sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US\$ 213,6 miliar dan utang LN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US\$ 207,1 miliar. Disebutkan, utang LN pemerintah pada Januari 2021 mencapai US\$ 210,8 miliar, atau tumbuh 2,8% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2020 sebesar 3,3% (*yoy*).

Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo. Sementara itu, posisi surat utang pemerintah masih meningkat

seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun di tengah momentum likuiditas di pasar global yang cukup tinggi, serta sentimen positif implementasi vaksinasi Covid-19 secara global.

Perkembangan utang LN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

"Utang LN pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, antara lain yaitu sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6% dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor konstruksi (15,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13,0%)," tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/3).

Sedangkan utang LN swasta juga tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Per-

tumbuhan utang LN swasta pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8% (*yoy*). Perkembangan ini didorong oleh perlambatan pertumbuhan utang LN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan utang LN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam.

"Pada akhir Januari 2021, ULN PBLK tumbuh sebesar 4,9% (*yoy*), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,3% (*yoy*). Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 6,1% (*yoy*), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,7% (*yoy*). Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,0% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor keuangan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan," tuturnya.

39,5% dari PDB

Dengan demikian, BI memastik bahwa struktur utang LN

Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolannya. Struktur utang LN yang sehat tersebut tercermin dari rasio utang LN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4%.

Struktur utang LN Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa utang LN berjangka panjang yang mencapai 89,4% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur utang LN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang LN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolannya.

"Peran utang LN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tuturnya. (try)

Tarif Vaksin Gotong Royong ke Pengusaha Ditetapkan oleh Kemenkes

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 gotong-royong yang akan dilaksanakan sejumlah perusahaan swasta diberikan secara gratis kepada seluruh pekerja. Sedangkan tarif yang dibebankan kepada pengusaha akan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kadin Indonesia mendiskusikan harga vaksin.

"Yang penting prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarakat dengan sasaran penerimaannya adalah karyawan dan karyawati dari seluruh perusahaan yang ada di seluruh Indonesia," ujar Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/3).

Menkes menegaskan, biaya atas vaksin tersebut akan dibebankan ke pengusaha dengan tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setelah Kementerian BUMN dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendiskusikan harganya. "Jadi harus ada kesepakatan antara mereka (Kementerian BUMN dan Kadin), jenis vaksinnya berbeda dengan yang digunakan vaksinasi program agar tidak terjadi kebocoran dari vaksin yang gratis ke vaksinnya berbayar," ujar dia.

Lebih lanjut, Budi meminta, pendataan jumlah karyawan dan

karyawati yang akan menerima vaksin Covid-19 harus menggunakan data base yang sama sehingga tidak terjadi duplikasi penyuntikan. Selain itu, jenis vaksin gotong royong berbeda dengan yang digunakan vaksinasi dalam program pemerintah. Kemudian untuk distribusi dan penyuntikannya dilakukan oleh Bio Farma dan pihak swasta, agar tidak membebani fasilitas kesehatan yang digunakan untuk program vaksinasi gratis.

"Kemudian, pasca vaksinasi dan pengawasan KIPi juga diikuti dengan prosedur yang ada di Kemenkes," tegas dia. Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

7,4 Juta Pegawai

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, total pekerja yang sudah didaftarkan hingga Minggu (14/3) mencapai lebih dari 7,4 juta orang. "Untuk data, hingga 14 Maret terjadi penambahan 2.372 perusahaan, sehingga total perusahaan sudah mendaftarkan 11.542 perusahaan dengan total target vaksinasi 7.403.356 orang dan ini masih terus berjalan," papar dia.

Secara rinci, pendaftaran sudah dibuka sebanyak dua tahap. Untuk tahap pertama, telah digelar sejak 28 Januari hingga 28 Februari 2021 dimana tercatat sebanyak 9.176 perusahaan dengan 6,9 juta karyawan. Sedangkan pendaftaran tahap dua 10-24 Maret 2021.

Menurut Rosan, karyawan yang terdaftar bukan hanya dari perusahaan besar. Bahkan, sektor UMKM juga mengikutkan karyawannya untuk vaksinasi mandiri. "Karena dari asosiasi menyatakan apakah dari UMKM boleh daftar? Kami sampaikan selama entitas itu Indonesia, silakan untuk mendaftar. Dan beberapa UMKM ternyata yang pekerjaannya hanya 5-10 orang ikut mendaftar," kata Rosan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa program vaksinasi gotong royong merupakan langkah untuk mempercepat proses vaksinasi, sehingga lebih cepat juga memberikan dampak kepada program pemulihan ekonomi nasional dan ke sektor kesehatan. "Spirit intinya, program vaksinasi mandiri tidak boleh ada komersialisasi, dan kedua spirit tetap vaksin gratis, yakni penerima terakhir harus tetap gratis, tidak membayar, jadi dalam hal ini perusahaan yang melakukan pembayaran untuk diberikan kepada para pekerja, buruh, dan keluarga para pegawai," tegas dia. (try)



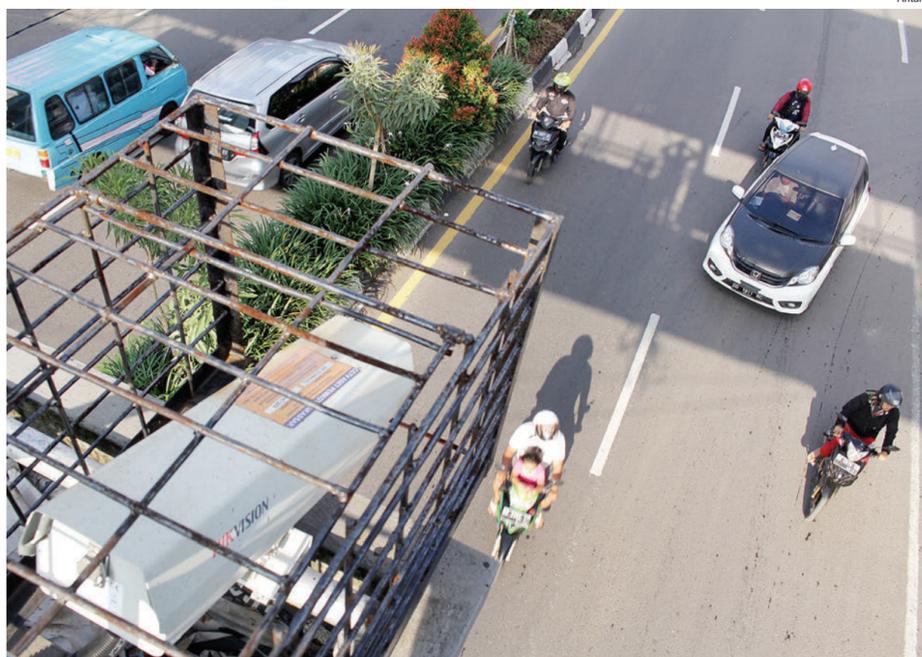
BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal



BeritaSatu Photo/Ruht Semiono

Aturan Pengecualian Pajak

Nasabah melakukan transaksi di Kantor Cabang Bank BCA Syariah di Jakarta, belum lama ini. BCA Syariah menyambut baik aturan pengecualian pajak untuk produk investasi dan penempatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan berdampak pada tabungan haji di perbankan.



Antara

Tilang Elektronik Secara Nasional

Sejumlah kendaraan melintas di bawah kamera *closed circuit television* (CCTV) di salah satu ruas jalan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/3/2021). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencaangkan penerapan tilang elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE) secara nasional sebagai salah satu program prioritas dengan target penerapan tahap pertama dimulai pada Maret 2021 di 10 Polda dan tahap kedua pada April 2021 di 12 Polda.

PUPR Tak Ingin Tinggalkan Proyek Infrastruktur Mangkrak

Oleh Muawwan Daelami

► JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tidak ingin meninggalkan proyek infrastruktur yang mangkrak pada 2024. Untuk itu, Kementerian PUPR bakal selektif membangun infrastruktur baru.

“Bukan berarti pembangunan dilarang, tapi pembangunan baru harus selektif dan harus bisa diselesaikan pada 2024. Minimal progres pembangunan tinggal sedikit lagi selesai dan tidak ada yang mangkrak di 2024,” ujar Menteri Basuki saat membuka acara *Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2021* di Jakarta, Senin (15/3).

Menteri Basuki menekankan pembangunan infrastruktur pada 2022 harus berfokus pada optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi atau OPOP. Melalui program OPOP ini, pembangunan baru akan lebih selektif.

Terkait hal itu, Menteri PUPR mendorong program tahun 2022 dibuat dengan lebih baik mulai dari desain *software*, kajian, sampai supervisi-supervisi yang harus diperbanyak untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Desain-desain boleh disiapkan, namun jika desain tersebut tidak bisa dibangun pada 2023, tidak akan dikerjakan.

“Sebaiknya ditinggalkan bagi kabinet mendatang supaya dapat membuat desain yang lebih baik. Jadi, *nggak usah* terburu-buru. Didesainkan lebih baik, nanti kami tinggalkan untuk dikerjakan kabinet yang akan datang. Sebab, pembangunan *kan gak* mungkin berhenti. Pasti jalan terus. Kami siapkan desain yang baik. Jangan asal-asalan,” ungkapnya.

Apalagi, Kementerian PUPR selama 10 tahun terakhir sudah berusaha lebih baik, terutama dalam hal membangun infrastruktur yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lebih jauh, program pembangunan PUPR tahun 2022 yang pertama kali akan difokuskan yaitu pada optimalisasi. Artinya, semua pembangunan yang sudah selesai harus dievaluasi, diinventarisasi, dan bisa dimanfaatkan pada 2022, atau dikerjakan untuk bisa dimanfaatkan.

Dia pun kembali menekan-

kan ke depan pembangunan infrastruktur baru akan sangat selektif, kecuali pembangunan yang sifatnya pinjaman (*loan*). Jika pembangunan baru tidak dapat selesai tahun 2023 atau 2024, Basuki menegaskan, pembangunan tersebut tidak akan dikerjakan supaya tidak meninggalkan isu-isu pembangunan yang kurang baik.

“Semua harus sudah siap diarahkan ke sana. Kalau pemilihan umum (Pemilu) mulai diselenggarakan Januari 2024, tahun 2022 berarti sudah mulai sehingga kami harus hati-hati,” ujarnya.

Selanjutnya, Menteri Basuki menuntut optimalisasi dilakukan dengan meneruskan pembangunan yang telah selesai. Infrastruktur-infrastruktur yang sudah selesai namun belum dimanfaatkan, maka harus dimanfaatkan secara optimal. Optimalisasi di antaranya dilakukan terhadap bangunan-bangunan yang sudah jadi, tapi belum bermanfaat.

Sebagai contohnya, fasilitas air minum yang sudah dibangun, namun masih *idle* harus ditangani dan bermanfaat. Kemudian, rumah susun (Rusun) yang sudah dibangun dan belum dihuni harus bisa dihuni, karena rusun tersebut pasti membutuhkan rehabilitasi, demikian pula dengan bendungan, jalan tol, dan bangunan lainnya.

“Berikutnya pemeliharaan, utamakan pemeliharaan. Untuk tahun 2022, program pemeliharaan infrastruktur harus lebih menonjol,” kata Menteri Basuki. Menteri Basuki menilai tanggul-tanggul yang kemarin jebol atau rusak ketika bencana banjir melanda beberapa waktu lalu, kemungkinan akibat kurangnya pemeliharaan.

“Program pemeliharaan harus diutamakan pada tahun depan,” tegas Menteri PUPR itu.

Selanjutnya, operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas terbangun pada 2021 dan pada tahun sebelumnya, maka



Basuki Hadimuljono

pada TA 2022 harus segera dioptimalkan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan. Terakhir adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula, misalnya irigasi, kanal banjir, jalan, dan jembatan nasional yang rusak akibat bencana, dan sebagainya.

128 kawasan

Lebih lanjut, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan memprioritaskan pengembangan 128 kawasan pada tahun depan.

“Dari 230 kawasan yang terdapat dalam RPJMN, kami menyepakati untuk tahun 2022 memberikan prioritas kepada 128 kawasan yang kami jadikan prioritas,” ujar Kepala BPIW Hadi Suchayono.

Menurut Hadi, 128 kawasan yang akan menjadi prioritas pada tahun 2022 tersebut terdapat di setiap pulau mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Papua.

Kepala BPIW berharap kementerian lain bisa menasar ke 128 kawasan prioritas pada 2022. Dalam paparannya Hadi juga menyampaikan dari 128 kawasan yang akan diprioritaskan pada 2022 untuk Pulau Sumatera terdapat 56 kawasan yang akan menjadi prioritas pada 2024. Beberapa kawasan di Sumatera yang akan diprioritaskan pada 2022 antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api-Api, KEK atau Kawasan Industri SEI Mangkei, hingga Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, dan DPP Bangka-Belitung.

Kemudian di Pulau Jawa dan Bali terdapat 33 kawasan yang akan diprioritaskan pengembangannya pada 2022. Kawasan-kawasan tersebut antara lain KEK

Kendal, KEK Tanjung Lesung, Kawasan Industri Brebes dan Madura hingga DPP Baru Bandung-Halimun, Ciletuh, DPP Borobudur, dan DPP Revitalisasi Bali.

Untuk Pulau Kalimantan terdapat 24 kawasan yang akan menjadi prioritas pada tahun 2022, antara lain KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kawasan Industri Ketapang, Kawasan Industri Surya Borneo sampai dengan DPP Baru Derawan Berau. Sedangkan untuk Kepulauan Nusa Tenggara terdapat 23 kawasan yang akan diprioritaskan pada 2022 antara lain Kawasan Industri Sumbawa Barat, DPP Lombok Mandalika, hingga DPP Labuan Bajo.

Kemudian di Pulau Sulawesi terdapat 25 kawasan yang akan menjadi prioritas pada tahun depan, antara lain KEK Bitung, Kawasan Industri/KEK Palu, hingga DPP Manado-Likupang, DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar, serta DPP Wakatobi. Untuk di Kepulauan Maluku terdapat 23 kawasan yang akan diprioritaskan pada tahun depan, antara lain DPP/KEK Morotai sampai dengan kawasan perkotaan Ambon dan Kota Baru Sofifi.

Selanjutnya di Papua terdapat 46 kawasan yang akan menjadi prioritas tahun 2022 oleh Kementerian PUPR yakni KEK Sorong, Kawasan Industri Teluk Bintuni sampai dengan DPP Raja Ampat dan DPP Biak-Teluk Cendrawasih.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengapresiasi Kementerian PUPR terkait pembangunan infrastruktur yang memberikan *multiplier effect* ekonomi bagi masyarakat.

“Saya sebenarnya mengapresiasi karena dari banyak kementerian, salah satunya Kementerian PUPR termasuk dalam infrastruktur itu sudah mulai banyak memikirkan tidak hanya membangun infrastruktur, namun yang dipikirkan adalah ketika membangun infrastruktur, bagaimana supaya ekonomi masyarakat sekitarnya tidak mati,” ujar Aviliani.

Menurut Aviliani, infrastruktur ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah penyerapan tenaga kerja yang saat ini menjadi sangat penting karena dalam kondisi pandemi yang dibutuhkan dari proyek pembangunan infrastruktur itu justru untuk penyerapan tenaga kerjanya. Pembangunan infrastruktur paling banyak menyerap tenaga kerja.

BELUM ADA KEPASTIAN DARI ARAB SAUDI

Kemenhub Tetap Siapkan Penerbangan Haji 2021

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap menyiapkan penerbangan haji 2021 meski belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah tersebut pada tahun ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menyampaikan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai penyelenggara haji tiap tahun dengan melakukan beberapa hal.

“Kami memberikan masukan teknis dan operasional penerbangan untuk kegiatan angkutan udara Haji sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Novie dalam rapat kerja bersama DPR di Jakarta, Senin (15/3).

Selain itu, Kemenhub melakukan evaluasi teknis terhadap sarana dan prasarana untuk menunjang angkutan udara haji. Kemudian, lanjut Novie, pihaknya bersama dengan Kemenag melakukan evaluasi pelaksanaan angkutan haji dari aspek teknis dan operasional penerbangan.

“Berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kemenhub dan Kemenag angkutan udara jemaah haji bersifat niaga tidak berjadwal. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan transportasi udara yang meliputi persyaratan administratif, standar kelaikuda-



Novie Riyanto

raan, dan standar pelayanan,” imbuh Novie.

Novie menuturkan, total armada Garuda Indonesia untuk pesawat jenis Airbus 330 seri 200, Airbus 330 seri 300, Airbus 330 seri 900, Boeing 777 300 sebanyak 37 pesawat, namun total armada yang siap melayani berjumlah 18 pesawat saja.

Sedangkan, untuk kesiapan bandar udara embarkasi sejumlah 13 lokasi, yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh), Kualana-mu (Medan), Hang Nadim (Batam), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin (Palembang), Soekarno-Hatta (Jakarta), Kertajati, Djuanda (Surabaya), Adi Soemarmo (Solo), Syamsudin Noor (Pontianak), Sultan Aji Muhammad Sulaiman Spinggan (Balikpapan), Sultan Hasanudin (Makassar), dan Zainuddin Abdul Majid (Lombok).

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyata-

kan, pihaknya terus melakukan upaya diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 meski dalam kondisi pandemi Covid-19. Hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum bisa memastikan apakah ibadah haji bisa diselenggarakan pada tahun ini.

“Kami terus melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai otoritas terkait di Arab Saudi antara lain dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Menteri Urusan Haji dan Umroh, dan yang lainnya baik melalui tatap muka langsung atau video conference, telepon, dan surat,” kata Menag.

Namun, Menag mengaku optimistis Pemerintah Arab Saudi akan menyelenggarakan ibadah haji pada tahun ini karena vaksinasi Covid-19 telah dilakukan di negeri itu.

Lebih lanjut, papar Menag, otoritas Arab Saudi juga akan membuka rute penerbangan internasional pada 17 Mei 2021.

“Situasi ini lebih positif dibanding tahun lalu di kuartal yang sama yang menutup penerbangan luar negeri, tidak terkecuali di musim haji tahun 2020,” ujar dia.

Lebih jauh, pemerintah pun menyatakan akan tetap melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. (esa)

Kemenhub Luncurkan Layanan Izin Tersus dan TUKS Online

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembangkan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (Sehati) dengan menghadirkan layanan perizinan untuk terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) secara *online* yang diluncurkan pada Senin (15/3).

“Upaya ini tentunya sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu menjamin efisiensi penyelenggaraan kegiatan kepelabuhan yang andal dan berdaya saing. Selain itu, juga menjadi bukti bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mengikuti arus perkembangan zaman salah satunya melalui digitalisasi,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R Agus H Purnomo dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (15/3).

Agus mengungkapkan bahwa penyediaan infrastruktur pelabuhan adalah kewajiban pemerintah. Di sisi lain, permintaan pelayanan masyarakat terhadap jasa pelabuhan semakin tinggi. Maka di tengah keterbatasan untuk membangun pelayanan jasa pelabuhan yang beragam tersebut, pemerintah memberikan ruang kepada pelabuhan secara mandiri untuk membangun Tersus dan TUKS.

Dari tahun ke tahun, lanjut dia, jumlah permohonan perizinan pembangunan dan pengembangan Tersus ataupun TUKS di Indonesia terus meningkat. Di era

revolusi industri 4.0 saat ini, semua proses layanan dituntut untuk serba cepat, praktis, dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi, informasi, serta komunikasi. Demikian juga dalam pengurusan perizinan Tersus ataupun TUKS harus cepat dan tidak berbelit-belit.

“Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengajukan perizinan layanan Tersus ataupun TUKS secara *online* melalui aplikasi Sehati. Tidak ada biayanya semua ini *tuh* kecuali PNPB, semua *free*. Salah kalau ngurus ini *tuh* susah dan sebagainya semua tidak ada biaya hanya PNPB saja dan cepat,” tambah dia.

Selanjutnya, kata Agus, pihaknya terus berupaya untuk mengedukasi pemilik Tersus dan TUKS karena banyak sekali yang belum memahami tentang perizinan Tersus dan TUKS. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa peluncuran layanan perizinan Tersus dan TUKS dalam aplikasi Sehati ini pun bersamaan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir, sehingga dirasa manfaat yang diberikan kepada badan usaha dan masyarakat teras lebih signifikan. Hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk membantu upaya pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19, dengan mengurangi frekuensi pemberian layanan secara tatap muka.

“Ke depannya, saya harap Sehati terus dikembangkan dan menjadi salah satu la-

ayanan yang dapat digunakan secara optimal dengan terus berinovasi untuk melahirkan layanan yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas,” kata Agus.

Direktur Kepelabuhanan Kemenhub Subagyo mengatakan, pada 2020 ini, terdapat 24 layanan dalam Sehati yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terkait layanan di bidang perkapalan dan kepelautan, kepelabuhanan, kenavigasi-an, KPPL, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).

“Selanjutnya pada 2021, terdapat tambahan 10 layanan di bidang kepelabuhanan terkait layanan terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS),” tutur dia.

Selanjutnya, Subagyo juga menyatakan bahwa sebaran Tersus dan TUKS sampai dengan tahun 2020 kurang lebih mencapai 1.925 di seluruh Indonesia. Dengan jumlah permohonan pada 2020 mencapai 833 permohonan, dengan jumlah yang telah ditetapkan sebanyak 722 dan yang dikembalikan karena masih belum lengkap sebanyak 111.

“Mengingat cukup besarnya jumlah permohonan izin yang diajukan oleh badan usaha, maka kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan perizinan Tersus dan TUKS secara *online* melalui aplikasi Sehati sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan *realtime*,” ucap dia. (esa)

Presiden Segera Resmikan Bandara di Tana Toraja

MAKASSAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan meresmikan Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja saat berkunjung ke Sulawesi Selatan, Kamis (18/3). Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani memastikan tidak akan ada kerumunan saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Sulsel. Selain itu, akan diterapkan protokol kesehatan secara ketat di titik yang akan dikunjungi.

“Tidak ada kerumunan pada saat Bapak Presiden RI melakukan kunjungan karena tetap dilakukan protokol kesehatan yang ketat,” kata Abdul Hayat, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantapan Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden RI di Sulsel, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor

Gubernur Sulsel, Senin (15/3).

Rencananya, Presiden Jokowi akan tiba di Makassar sekitar pukul 10.00 Wita. Selanjutnya, Presiden akan bertolak dari Makassar ke Tana Toraja guna meresmikan Bandara Tana Toraja, yang dilakukan secara virtual. Kemudian pukul 10.50 Wita, Presiden RI beserta rombongan dan didampingi oleh Pjt Gubernur Sulsel akan melakukan penekanan tombol, sebagai tanda diresmikannya Bandara Tana Toraja. Pukul 11.45 Wita, Presiden RI beserta rombongan akan meninjau proses vaksinasi di Puskesmas Tana Toraja, serta mengecek prosesnya, yang dibatasi hanya 50 orang, dengan mengenakan pakaian adat.

Kemudian, pukul 13.50 Wita, Presiden RI akan makan siang

di atas pesawat, dan pukul 14.50 Wita tiba kembali di Makassar, menuju lokasi peresmian kolam regulasi Nipa-nipa Kabupaten Gowa.

“Karena terbatasnya waktu, saya kemarin mengusulkan ke kementerian melalui virtual agar Bapak Presiden Jokowi meresmikan Jembatan Jalan Tol AP Pettarani Makassar lewat penandatanganan prasasti,” ungkap Abdul Hayat.

Lebih jauh, Kepala Negara juga akan meresmikan Bandara Haji Muhammad Sidik di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, secara virtual bersama tujuh bandara lainnya di Tanah Air pada 18 Maret 2021.

“Bandara Haji Muhammad Sidik merupakan salah satu bandara yang akan diresmikan

pada Kamis (18/3) oleh Presiden Joko Widodo yang dipusatkan di Bandara Toraja, Sulawesi Selatan,” kata Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Beringin Muara Teweh, Endang Setiawan pada rapat persiapan peresmian bandara bersama Pemkab Barito Utara di ruang rapat gedung administrasi Bandara Haji Muhammad Sidik di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, Senin.

Menurut Endang, pertemuan dengan instansi terkait ini guna mempersiapkan dan memaksimalkan peran masing-masing instansi terkait rencana peresmian Bandara Haji Muhammad Sidik, hingga nanti dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan hasil yang dirapikan nantinya. (tm/ant)



Antara

Jembatan Ambrol

Jembatan penghubung antar desa ambrol di Desa Sumbersuko, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (15/3/2021). Jembatan sepanjang 21 meter yang menjadi akses utama antar desa di wilayah tersebut ambrol diterjang banjir akibat luapan Sungai Kaliputih, pascahujan deras.



Program Regenerasi

Seorang petani menyortir hasil panen padi saat senja di areal persawahan Desa Kawengen, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Senin (15/3/2021). Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) pada tahun 2021 akan menetapkan Duta Petani Milenial (DPM)/Duta Petani Andalan (DPA) sebanyak 1.000 DPM/DPA usia antara 17-39 sebagai upaya mempercepat regenerasi petani yang saat ini didominasi oleh usia tua dan rentan.

Buwas: Impor 1 Juta Ton Beras Belum Tentu Dilaksanakan

Oleh Ridho Syukra

► JAKARTA—Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, impor beras sebesar 1 juta ton belum tentu dilaksanakan. Sebab, Bulog selaku pelaksana impor hingga saat ini masih berupaya memprioritaskan dan memaksimalkan pengadaan dari dalam negeri guna menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP). Stok CBP akan melebihi 1 juta ton pada akhir April 2021 atau meningkat dari posisi per 14 Maret 2021 sebesar 859.877 ton, kenaikan itu seiring masuknya masa puncak panen raya Maret-April ini.

Budi Waseso atau Buwas mengakui, Bulog telah mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras, meski dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) beberapa waktu lalu tidak disinggung soal penugasan tersebut. “Kami laporkan, dalam rakortas yang lalu tidak menyinggung masalah impor, tapi kemudian kami dapat penugasan untuk impor beras 1 juta ton. Meski kami mendapatkan tugas untuk impor 1 juta ton, itu belum tentu kami laksanakan karena kami saat ini dalam posisi untuk tetap memprioritaskan produk dalam negeri karena sekarang sedang masa puncak panen raya sampai April nanti,” kata Buwas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (15/3).

Per 14 Maret 2021, stok beras Perum Bulog mencapai 883.585 ton yang terdiri atas stok CBP 859.877 ton dan beras komersial 23.708 ton. Stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan penjualan KPSH (operasi pasar/OP) dan tanggap darurat bencana sesuai kebutuhan Bulog. Sementara itu, penyerapan beras dalam negeri pada Maret-April 2021 saat panen raya akan mencapai 390.800 ribu ton, sehingga stok CBP pada akhir April 2021 mencapai di atas 1 juta ton. Realisasi penyerapan gabah/beras Bulog pada Januari sampai 14 Maret 2021 mencapai 70.940 ton, pada minggu II-Maret 2021 penyerapan per hari 3.500 ton setara beras atau naik dua kali dari minggu I-Maret 2021 yang hanya 1.500 ton.

Buwas menjelaskan, kenaikan

penyerapan hingga dua kali tersebut karena pada Maret sudah mulai panen raya sampai April dan Bulog terus meningkatkan produksi dan penyerapannya. “Kami sedang melakukan penyerapan gabah maupun beras di seluruh Indonesia yang sedang produksi, kami bersama-sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Prinsipnya, kami mengutamakan produksi petani dalam negeri untuk pengadaan CBP,” jelas Buwas. Realisasi penyaluran CBP sampai 14 Maret 2021 sebanyak 131.775 ton, yakni KPSH/OP 116.709 ton, tanggap darurat bencana 1.031 ton, dan golongan anggaran 13.978 ton.

Saat ini, Bulog juga masih memiliki beras eks impor 275.811 ton dengan 106.642 ton di antaranya dalam kondisi turun mutu. Beras eks impor adalah beras sisa impor 2018 yang saat ini totalnya 1.785.450 ton. Pada 2018, pengadaan beras impor 1.785.450 ton. Penyalurannya secara rinci adalah 321.320 ton pada 2018, lalu 529.110 ton pada 2019, kemudian 617.574 ton pada 2020, dan pada 2021 sebanyak 41.635 ton. Stok beras eks impor 2018 tersisa 275.811 ton. “Dari 275.811 ton ada 106.642 ton yang turun mutu,” ujar dia.

Secara tersirat, Bulog juga menyatakan akan kesulitan menyalurkan beras apabila harus melakukan impor lagi 1 juta ton. Bulog memang siap menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang di seluruh Indonesia, tapi Bulog juga minta ada pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap.



Budi Waseso

Bulog telah kehilangan pangsa pasar 2,6 juta ton beras per tahun akibat program rastra (beras untuk keluarga sejahtera/raskin) diganti bantuan pangan nontunai (BPNT). “Kalau kami membeli sebanyak apapun kami siap, asalkan hilirnya juga dipakai,” ungkap Buwas.

Hal itu pula yang membuat Bulog masih menyimpan beras eks impor turun mutu. Pada Maret 2020, beras impor 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton, beras itu kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tapi beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450 ribu ton dari alokasi 900 ribu ton. Sisanya, hingga kini 275.811 ton beras impor tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog dengan 106.642 ton di antaranya sudah turun mutu. Beras dengan kondisi tersebut kemungkinan diolah menjadi tepung yang akan ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Dalam salah satu kesimpulan RDP Komisi IV DPR dengan pemangku kepentingan pangan, termasuk Perum Bulog, Komisi IV DPR secara tegas menolak kebijakan impor beras sebesar 1 juta ton dan meminta pemerintah melalui Bulog untuk memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring masuknya masa panen raya pada Maret-April 2021. Sekjen Kementan Momon Rusmono juga mengatakan, ketersediaan beras domestik hingga akhir Mei 2021 mencapai 24.901.172 ton, itu dipenuhi dari stok akhir Desember 2020 sebesar 7.389.573 ton dan perkiraan produksi dalam negeri 17.511.596 ton. Kebutuhan beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan 12.336.041 ton, sehingga neraca beras sampai akhir Mei 2021 akan surplus 12.565.130 ton.

“Saat ini, beras aman karena petani masuk panen raya,” kata Momon.

Harga Beras Impor

Dihubungi secara terpisah, Guru Besar/Kepala Biotech Center IPB University yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, saat ini harga beras di pasar internasional memang menunjukkan tren peningkatan. Beras premium Thailand misalnya, saat ini di kisaran US\$ 560-570 per ton atau sekitar Rp 8.000-9.000 per kg. Apabila diimpor ke Indonesia masih harus ditambah ongkos angkut. Saat beras sejenis di kisaran US\$ 350 per ton, harga beras tersebut saat sampai di Indonesia berada di kisaran Rp 7.000-7.500 per kg. “Harga beras Thailand, kalau di Indonesia masuk kelompok premium, saat ini di kisaran US\$ 560-570 per ton, itu setara Rp 8.000-an per kg dan kalau sampai di Indonesia harus ditambah ongkos angkut,” kata dia kepada *Investor Daily*, kemarin.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), rata-rata harga beras kualitas medium I pada Senin (15/3) sebesar Rp 11.800 per kilogram (kg) atau turun 0,42% dari hari sebelumnya dan kualitas medium II Rp 11.600 per kg atau turun 0,43% dari hari sebelumnya. Sementara itu, harga beras kualitas super I Rp 13.100 per kg atau tetap dari hari sebelumnya, pun dengan kualitas super II Rp 12.750 per kg. Sedangkan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada Senin (15/3) bervariasi, untuk jenis IR64-II Rp 9.635 per kg, IR-42 Rp 11.450 per kg, Muncul-II Rp 10.225 per kg, Saigon Rp 11.850 per kg, Cianjur Kepala Rp 13.250 per kg, dan Setra Rp 13.325 per kg.

Terlepas dari persoalan harga, menurut Dwi Andreas, seharusnya keputusan impor dibatalkan karena memberi dampak psikologis ke lahan gabah petani, saat ini harga gabah kering panen (GKP) sudah di bawah Rp 3.800 per kg. Yang paling realistis adalah Bulog diminta untuk menyerap gabah atau beras petani saja hingga stoknya bisa tembus di atas 1 juta ton untuk berada di titik aman. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan level aman stok Bulog di kisaran 1-1,5 juta ton. Impor beras untuk saat ini cukup diputuskan dalam rakortas dengan komando dari Menko Perekonomian. (td)

Impor Garam Tunggu Data Kebutuhan

JAKARTA—Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, impor garam memang telah diputuskan dalam rapat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) beberapa waktu lalu. Namun demikian, pelaksanaannya masih menunggu data terkait kebutuhan garam nasional. Impor garam tahun ini diperkirakan 3,08 juta ton. “Impor garam sudah diputuskan melalui rapat Menko (Kemenko Marves),” kata Trenggono di Indramayu, Jawa Barat (Jabar), kemarin. Menurut Trenggono, saat ini

(implementasi impor) masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia, karena ketika sudah didapat kekurangannya maka itu yang akan diimpor. Impor garam yang dilakukan juga sesuai neraca perdagangan, sehingga kebutuhan garam dalam negeri itu bisa terpenuhi. “Nanti misalnya kekurangannya berapa, itu baru bisa diimpor, kita menunggu itu. Karena itu sudah masuk dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK),” ujar Trenggono seperti dilansir *Antara*. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko

Marves Safri Burhanuddin dalam konferensi pers virtual Rabu (10/3) mengatakan, mengacu data rapat Kemenko yang digelar 25 Januari 2021, produksi garam tahun ini hanya 2,10 juta ton sedangkan kebutuhannya 4,67 juta ton sehingga kebutuhan alokasi impor sekitar 3,08 juta ton. “Rincian importnya, untuk aneka pangan 612 ribu ton, industri *chlor alkali plant* (CAP) 2,43 juta ton, farmasi dan kosmetik 5.501 ton, pertambangan dan pengeboran minyak 34 ribu ton. Kenapa lebih besar karena industri mempertimbangkan stok tahun depan, tidak hanya tahun berjalan,” ujar dia.

Dalam data Kemenko Marves, impor garam terus menunjukkan tren peningkatan. Pada 2015, impor garam hanya 1,90 juta ton, pada 2016 sebesar 2,14 juta ton, pada 2017 sebesar 2,55 juta ton, pada 2018 sebanyak 2,84 juta ton, kemudian pada 2019 sebesar 2,69 juta ton, dan pada 2020 sebesar 2,70 juta ton. Sebaliknya, produksi garam lokal justru terus menurun, pada 2015 masih 2,48 juta ton, pada 2016 sebesar 168.054 ton, pada 2017 sebanyak 1,11 juta ton, pada 2018 sebesar 2,72 juta ton, lalu pada 2019 sebesar 2,85 juta ton, dan pada 2020 hanya 1,36 juta ton. (td)

Upah Buruh Tani Naik 0,35%

JAKARTA—Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, upah nominal harian buruh tani nasional pada Februari 2021 naik 0,35% dibanding Januari 2021, yaitu dari Rp 56.176 menjadi Rp 56.373 per hari. Sementara itu, upah riil buruh tani mengalami kenaikan 0,18%. Upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan.

Upah nominal buruh/pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Upah riil buruh/pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh/pekerja. “Rata-rata upah nominal buruh tani pada Februari 2021 naik 0,35% dibanding Januari 2021, yaitu dari Rp 56.176 menjadi Rp 56.373. Semen-



Suhariyanto

tara upah riil naik sebesar 0,18% dibanding Januari 2021, yaitu dari Rp 52.338 menjadi Rp 52.430,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Senin (15/3).

Sementara rata-rata nominal upah buruh bangunan (tukang bukan mandor) Februari 2021 dibanding Januari 2021 naik 0,05%, yaitu dari Rp 90.907 menjadi Rp 90.953. Untuk upah riil Februari 2021 dibanding Januari 2021 turun 0,05%, yaitu dari Rp 85.793 menjadi Rp 85.750. Jika

upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan.

Di sisi lain, rata-rata nominal upah buruh potong rambut wanita Februari 2021 dibanding Januari 2021 naik 0,47%, yaitu dari Rp 28.774 menjadi Rp 28.909. Sementara upah riil Februari 2021 dibanding Januari 2021 naik 0,37%, yaitu dari Rp 27.155 menjadi Rp 27.255. Untuk rata-rata nominal upah asisten rumah tangga Februari 2021 dibanding Januari 2021 juga naik 0,30%, yaitu dari Rp 420.536 menjadi Rp 421.798, dan upah riil Februari 2021 dibanding Januari 2021 naik 0,20%, yaitu dari Rp 396.880 menjadi Rp 397.674. (ark)

SHS Turut Serta Amankan Pasokan Bawang Merah

SUBANG—PT Sang Hyang Seri (SHS Persero) menggandeng PT Alami Orion Agrotama (AOA) untuk ikut serta memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis. Arief menuturkan, pihaknya konsisten berperan aktif dalam memastikan ketersediaan kebutuhan pokok khususnya bawang merah pada Puasa-Lebaran tahun ini. Keduanya melakukan kerja sama budidaya bawang merah di Komplek Pertanian SHS di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Sebagai langkah awal, kerja sama dilakukan dengan memanfaatkan lahan 10 hektare (ha) dan produktivitas ditargetkan 12-13 ton bawang merah per ha.

Budidaya pengembangan bawang merah itu ditandai penanaman perdana oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI Persero) sekaligus Ketua BUMN Klaster Pangan Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama SHS Karyawan Gunarso, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi, Direktur AOA Artur Sahal Sihotang, Direktur Utama PT Pertani (Persero) Maryono, serta segenap pejabat Kementerian Pertanian, Senin (8/3), di Subang. RNI sebagai Ketua BUMN Klaster Pangan mendukung penuh kerja sama SHS-AOA dalam budidaya penanaman bawang merah dengan

memanfaatkan lahan pertanian SHS, ini merupakan bentuk dukungan BUMN pangan dalam memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis.

Arief menuturkan, pihaknya konsisten berperan aktif dalam memastikan ketersediaan kebutuhan pokok khususnya menjelang hari besar keagamaan Puasa-Lebaran. Sebelumnya, RNI bersama anggota BUMN Klaster Pangan sudah memulai dengan memastikan ketersediaan beras melalui kolaborasi pengembangan *pilot project food estate* 1.000 ha di Sukamandi serta kerja sama penyerapan gabah antara SHS dan Food Station. “Saat ini, kami mulai masuk ke bawang merah, menyusul akan dipastikan ketersediaan gula yang sebentar lagi masuk musim giling, juga ketersediaan daging sapi dan ayam,” ujar Arief.

Karyawan Gunarso mengatakan, jenis bawang merah yang dikembangkan adalah varietas Bima dengan masa tanam sekitar 65 hari. Ditargetkan panen perdana dilakukan awal Mei 2021, sehingga dapat langsung memasok kebutuhan bawang merah di bulan Puasa dan menjelang Lebaran. “Kerja sama ini potensial untuk ditingkat-

katkan, mengingat baik SHS maupun AOA memiliki pengalaman yang baik dalam bidang budidaya dan pengembangan tanaman pangan. Di tengah kondisi pandemi yang belum sepenuhnya kembali normal ini, kolaborasi antar-BUMN maupun antara BUMN dengan sektor publik menjadi keniscayaan guna mewujudkan tujuan ketahanan pangan nasional,” ungkap Karyawan. Menurut Karyawan, guna memastikan penyerapan pascapanen maka kerja sama ini dirancang melalui skema yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, baik dari sisi budidaya, distribusi hingga penjualannya.

Kepala BKP Agung Hendriadi mengatakan, kolaborasi BUMN dan swasta sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya menjelang Bulan Puasa dan Lebaran, dimana harga komoditas pangan seperti bawang merah biasanya melambung tinggi. Hal tersebut diakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat sementara ketersediaan bawang merah terbatas. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh BUMN Klaster Pangan ini merupakan langkah yang baik dan harus mendapat dukungan penuh pemerintah. (td)

Limbah Sawit Tidak Berbahaya

JAKARTA—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjelaskan limbah kelapa sawit (*spent bleaching earth*/SBE) dikategorikan dalam non-B3 karena kandungan minyaknya menjadi di bawah 3%. “Yang diajukan ke kami dengan pengecualian, di bawah 3% kandungan minyaknya memang terbukti tidak mengandung limbah B3 lagi karena uji karakteristiknya menunjukkan tidak ada kandungan logam berat atau yang kemudian mendukung SBE sebagai B3,” kata Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLHK Rosa

Vivien Ratnawati di Jakarta, Senin (15/3).

Sebelumnya, PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mengatur pengecualian SBE dari kategori limbah B3 dengan syarat tertentu dan harus melewati pengujian spesifik kasus per kasus. Namun, dengan terbitnya lampiran PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka SBE dengan kandungan minyak di bawah 3% masuk dalam kategori tidak berbahaya atau non-B3. “Kalau di atas 3% tetap sebagai limbah B3

dengan nomor kode limbah B413,” kata Vivien seperti dilansir *Antara*.

SBE adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak dari industri oleokimia. SBE yang masih mengandung kadar minyak tinggi dan ditimbulkannya atau digunakan untuk menguruk tanah dapat mencemari lingkungan. Pemanfaatan SBE dengan teknologi khusus untuk mengurangi kandungan minyak menjadi 3% dapat menghasilkan minyak biodiesel, bahan baku *fresh bleaching earth*, pengganti bahan baku bata merah, dan pemanfaatan oleh pabrik semen. (td)



Agrowisata Petik Jeruk

Petani merapikan tanaman jeruk di kebun Agrowisata Petik Jeruk, Tanjung Modang, Lintau Buu Utara, Tanah Datar, Sumatera Barat, Senin (15/3/2021). Agrowisata yang dikembangkan di bekas lahan terbelkang melalui program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) tahun 2013 lalu itu terkendala buruknya akses jalan.

Daihatsu Perkuat Layanan Purnajual

JAKARTA – Daihatsu memperkuat layanan purnajual di masa pandemi Covid-19 untuk meringankan beban konsumen. Langkah ini ditempuh agar mobil konsumen tetap terawat di tengah pandemi Covid-19, sehingga tetap berada dalam kondisi prima.

After Sales Service Division Head PT Astra International Tbk-Daihatsu Sales Operation (AIDS) Lili Herman menawarkan beberapa pilihan ke konsumen, di antaranya *low cost service* dengan beberapa program diskon dan oli gratis satu liter dan edukasi servis berkala tepat waktu setiap enam bulan. Selain itu, Astra Daihatsu mendorong pelanggan segera menggunakan fasilitas bebas biaya servis dan menawarkan program servis di rumah dengan layanan Daihatsu Mobile Service (DMS).

Adapun untuk menyambut Puasa dan Lebaran 2021, dia menuturkan, Astra Daihatsu menyiapkan program "Mudik Sehat Mudik Hemat bersama Daihatsu" dengan memberikan beberapa kemudahan dan harga spesial buat konsumen Daihatsu. Astra Daihatsu akan menyiapkan bengkel siaga untuk membantu konsumen Daihatsu yang membutuhkan servis kendaraan selama mudik Lebaran.

Dia mencatat, jumlah mobil yang diservis selama Desember 2020-Februari 2021 mencapai 4.000 unit lebih per hari, meningkat 5% dibandingkan periode tiga bulan sebelumnya. Sementara itu, menjelang Puasa dan Lebaran, jumlah mobil yang diservis per hari diprediksi meningkat 10-15%.

"Salah satu faktor meningkatnya

jumlah unit yang diservis oleh bengkel Astra Daihatsu adalah respons cepat yang diberikan terhadap keluhan konsumen," ujar Lili, Senin (15/3).

Hal itu diakui oleh General Affair Staff PT Gloria Origita Cosmetics Yuda Baghaskara. Selama ini, pihaknya selalu mendapatkan respons yang cepat jika membutuhkan pelayanan dari bengkel Astra Daihatsu. Bahkan, untuk servis rutin, perusahaannya tak perlu melakukan booking terlebih dulu.

"Pelayanan yang diberikan oleh bengkel Astra Daihatsu selama ini sangat baik. Kami mendapatkan respons yang cepat jika ingin melakukan servis kendaraan. Hal itu sangat membantu kelancaran operasional kami," kata Yuda.

Ini menjadi salah satu alasan Gloria Origita sejak 2010 lalu hingga saat ini memilih menggunakan Daihatsu sebagai kendaraan operasional perusahaan. Berdasarkan pengalaman tersebut, ujar Yudi, pihaknya selalu memilih Daihatsu, jika ingin meremajakan kendaraan operasional perseroan.

Di sisi lain, merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Daihatsu secara *wholesales* mencapai 8.993 unit pada Januari dan meningkat pada Februari menjadi 9.412 unit. Adapun penjualan ritel Daihatsu pada Januari 2021 mencapai 9.528 dan Februari 2021 8.414 unit. Hal ini menempatkan Daihatsu berada di posisi kedua penjualan mobil terbanyak di bawah Toyota. (ac)



Daihatsu Peduli Konsumen

Service Department PT AI DSO Ratno Yunanto memberikan penjelasan kepada Head General Affair Staff PT Gloria Origita Cosmetics Yuda Baghaskara (kanan) terkait dengan layanan Daihatsu Mobile Service (DMS), di Jakarta, Senin (15/3/2021). Sekalipun ada kenaikan penjualan mobil di kisaran 750 ribu unit secara bertahap di tahun 2021, Astra Daihatsu tetap memberi kepedulian lebih kepada konsumennya, agar konsumen tidak berat dalam merawat mobilnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan unit service mobil yang masuk mulai Desember 2020 hingga Februari 2021 mencapai 4.000 unit lebih per hari. Diperkirakan akan terjadi peningkatan memasuki Ramadhan hingga naik lebih dari 10%-15%.

PRODUKTIVITAS BAKAL MENINGKAT

Kadin: 11 Ribu Perusahaan Ikut Vaksinasi Mandiri

Oleh Sanya Dinda

► JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan, sampai saat ini sebanyak 11.543 perusahaan telah mendaftar Program Vaksinasi Gotong Royong untuk 7,4 juta karyawan dan anggota keluarganya. Pendaftaran vaksinasi mandiri ini berlangsung pada 28 Januari-28 Februari 2021 untuk tahap pertama dan 10 Maret-24 Maret 2021 untuk tahap kedua yang masih berlangsung.

"Yang mendaftar tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga menengah, dan bahkan usaha kecil. Asosiasi bertanya apakah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) bisa mendaftar, saya bilang bisa selama masih entitas Indonesia, silakan mendaftar. Jadi beberapa UMKM yang pekerjanya lima atau sepuluh orang ikut mendaftar," kata Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR yang disiarkan secara virtual, Senin (15/3).

Menurut Rosan, pada registrasi tahap pertama, terdapat sebanyak 9.176

perusahaan yang telah mendaftar vaksinasi untuk 6,99 juta orang. Pada tahap kedua yang masih berlangsung, sebanyak 2.372 perusahaan turut mendaftar.

Akhir-akhir ini, menurut dia, semakin banyak perusahaan kecil dan menengah yang mendaftar Program Vaksinasi Gotong Royong. Pada 13 Maret 2021, Kadin sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bio Farma.

Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa Kadin akan mengumpulkan data perusahaan swasta yang akan



Rosan P Roeslani

mengikuti vaksinasi melalui website vaksin.kadin.id. Sementara itu, Bio Farma akan menjadi penyedia vaksin. "Data ini akan kami beri ke Kementerian Kesehatan dan Bio Farma untuk disempurnakan menjadi satu data, sehingga tidak ada *overlapping*. Ini kami lakukan atas koordinasi dan kerja sama yang erat dan baik dengan Bio Farma, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Komite PEN, dan Kepala BPOM," imbuh dia.

Rosan memastikan, karyawan tidak akan mengeluarkan biaya untuk

divaksin dalam program vaksinasi mandiri. Pembiayaan dilakukan oleh perusahaan.

Rosan meyakini, vaksinasi tidak akan memberatkan perusahaan karena selama pandemi Covid-19, beberapa perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan swab antigen bagi karyawan mereka dua minggu sekali. "Oleh karena itu, kami melihat kalau kami berpartisipasi di program vaksinasi akan lebih efisien bagi dunia usaha. Selain itu, dengan kita mengikuti vaksinasi, diharapkan produktivitas pekerja membaik karena mereka telah aman dan nyaman. Jadi vaksinasi ini akan berdampak positif terhadap sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi," ucap Rosan.

Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, Program Vaksinasi Gotong Royong telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Setelah Kadin memberikan data kepada pemerintah, Kementerian Kesehatan akan menginformasikan kepada Bio Farma sebagai distributor, terkait berapa banyak vaksin yang dibutuhkan. Badan usaha bisa melakukan vaksinasi dengan fasilitas kesehatan (faskes) yang tidak terlibat dengan program vaksinasi pemerintah supaya tidak terjadi tumpang tindih.

Pemerintah Intensifkan Program Indonesia 4.0 Hingga 2022



Gati Wibawaningsih

JAKARTA - Pemerintah akan mengintensifkan program *Making Indonesia 4.0* sampai 2022. Program ini diharapkan dapat membuat transformasi perekonomian berjalan mulus.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan, pihaknya tengah melaksanakan lima program untuk melaksanakan transformasi industri ke arah 4.0. "Pertama melalui program *Indonesia Industry 4.0 readiness index* atau Indi 4.0. Program ini memberikan asesmen kesiapan dan pendampingan kepada perusahaan industri manufaktur dalam mengimplementasikan industri 4.0," kata Gati, Senin (15/3).

Selanjutnya, dia menuturkan, terdapat program *Indie 4.0 Award Winner 2020*, yakni penghargaan kepada pelaku industri yang telah siap melakukan transformasi ke era industri 4.0. Pemerintah juga telah meluncurkan ekosistem industri 4.0 atau *sindi 4.0* untuk membangun sinergi, koordinasi, kolaborasi antar pihak guna mengakselerasi transformasi industri 4.0.

Kemudian, dia menerangkan, pemerintah membuat program pelatihan manajer transformasi 4.0 yang berisi pengetahuan tema aspek teknologi, hukum, dan kontrol kinerja untuk mempersiapkan manajer

menjadi pemimpin dalam penerapan industri 4.0 di perusahaan.

"Terakhir, pembangunan pusat inovasi dan digital 4.0 yang akan memberikan lima pilar layanan yaitu *showcase center, capability center, ekosistem industri 4.0, delivery center, dan innovation center*," imbuh Gati.

Menurut dia, Kemenperin mendorong transformasi industri ke arah 4.0 dalam penyediaan data dan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Sementara itu, dalam rangka penguatan teknologi digital bagi industri kecil dan menengah, Kemenperin memiliki berapa program, antara lain *e-smart* usaha kecil dan menengah (UKM) yang merupakan sistem *database* berisi profil industri sentra dan produk yang terintegrasi dengan marketplace yang ada.

"*E-smart* kemudian berkembang menjadi *smart* sentra, yang merupakan aplikasi bertujuan memudahkan program pembinaan sentra IKM. Di sini, terdapat profil sentra, peluang belajar, dan peluang kemitraan dengan sentra IKM," tegas dia.

E-smart, kata dia, selanjutnya berkembang menjadi *smart material system*, yaitu sistem informasi manajemen material berbasis *cloud computing*, sehingga memudahkan *buyer, supplier*, dan juga industri kecil dan menengah (IKM) dalam arus data dan informasi terkait bahan baku sampai pengiriman produk.

Lalu, dia menuturkan, *e-smart* IKM berkembang menjadi *smart packaging center*, di mana pelaku IKM dibantu desain kemasan yang lebih efisien, kreatif, dan berdaya saing. Ini akan terintegrasi dengan seluruh rumah kemasan di seluruh Indonesia.

Setelah itu, Gati mengungkapkan, IKM menjadi *smart* IKM yang akan mengintegrasikan pelaku industri dengan perkembangan teknologi, sehingga menjadi industri modern yang produktif dan berkualitas. Kemenperin juga mengajak penyedia teknologi melalui program *start up for industry* untuk mengakselerasi *start up*. (sny)

Penjualan Mobil Februari Turun 38%

JAKARTA – Penjualan mobil secara *wholesales* (pengiriman mobil dari pabrik ke dealer) turun 38% menjadi 49.202 unit Februari 2021, dibandingkan bulan sama tahun lalu 79.644 unit. Dibandingkan Januari 2021, penjualan mobil bulan lalu turun 11% dari 52.909 unit.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diolah Grup Astra, Senin (15/3), Toyota masih merajai pasar mobil domestik dengan penjualan 15.238 unit, diikuti Daihatsu 9.412 unit, Mitsubishi 7.567 unit, Honda 6.812 unit, Suzuki 4.600 unit, Nissan 20 unit, dan merek lain 3.701 unit.

Adapun penjualan Grup Astra yang

mengageni Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan Peugeot 19 unit. Pangsa pasar Astra mencapai 52%. Per Februari 2021, penjualan mobil domestik mencapai 102.111 unit, turun 36% dibandingkan bulan lalu 160.079 unit.

Pengamat otomotif Bebin Djunaena mengatakan, pasar mobil 2021 akan lebih baik dari tahun 2020, walaupun masyarakat dituntut untuk disiplin karena pandemi belum berakhir. Hal ini terlihat dari respons positif dari masyarakat. "Perkiraan saya penjualan mencapai 800 ribu unit, bahkan mungkin di atas itu," papar dia. Gaikindo memperkirakan penjualan mobil tahun ini 750 ribu unit, naik 25% dari tahun lalu 603.842 unit. Salah satu katalis

kenaikan penjualan mobil adalah insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0% selama Maret-Mei 2021. Insentif ini diyakini dapat mendorong penjualan mobil hingga 80 ribu unit per bulan.

Indikasi lonjakan penjualan terlihat pada peningkatan surat pemesanan kendaraan (SPK) hingga Maret 2021. Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmy mengatakan, total SPK Avanza, Sienta, Rush, dan Yaris selama 1-8 Maret 2021 naik 94-155%, dibandingkan periode sama Februari lalu. Kenaikan SPK terbesar dicatat Vios tinggi, karena harganya turun Rp 65 juta setelah PPnBM 0%. Sebagai sedan kecil, PPnBM Vios mencapai 30%.

Business Innovation and Sales & Marketing PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengungkapkan, SPK naik 40-50% pekan pertama Maret 2021. Kenaikan SPK tertinggi dicatat HR-V 1,5 liter.

Sementara itu, Daihatsu mencatat, SPK Xenia, Terios, Luxio, dan Gran Max MB melonjak sekitar 40%, sedangkan model-model lainnya, seperti Ayla, Sigras, Sirion, Gran Max PU, Gran Max Blindan naik 20%. PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales (MMKSD) juga mengungkapkan, peningkatan jumlah pesanan, setelah insentif PPnBM 0% berlaku. Tercatat, ada dua produk Mitsubishi yang mendapatkan insentif PPnBM, yaitu Xpander dan Xpander Cross. (ac)



Neraca Perdagangan

Suasana aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (15/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Februari 2021 mengalami surplus sebesar US\$ 2,01 miliar, dimana nilai ekspor mencapai US\$ 15,27 miliar dan impor US\$ 13,26 miliar.

Jinheung Indonesia Genjot Ekspor Tahun Ini

JAKARTA – PT Jinheung Electric Indonesia mengekspor peralatan listrik ke Korea Selatan (Korsel) senilai US\$ 5,68 juta pada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Tahun ini, Jinheung tetap menggenjot ekspor ke Negeri Ginseng.

Presiden Direktur Jinheung Lee Ki Sou mengatakan, langkah perusahaan meningkatkan pasar ekspor sesuai anjuran pemerintah dalam upaya berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi. Selama Januari-Februari 2021, Jinheung mengapalkan produk peralatan listrik berupa MCB *power socket*, dan *switch* ke Korsel sebanyak 1,5 juta unit senilai US\$ 1,2 juta.

"Maret 2021, kami kembali ekspor ke Korsel sebanyak tiga kontainer sebanyak 230 ribuan unit senilai US\$ 195 ribu," sebut

Lee, Senin (15/3).

Menurut dia, Jinheung sedang mengakselerasi peningkatan jumlah produksi di dalam negeri guna mendorong daya saing produk nasional. Selain itu, perusahaan berkomitmen menambah investasi di Indonesia sebagai basis produksi pasar dalam dan luar negeri.

Sejak berdiri 1988, Jinheung telah memproduksi berbagai peralatan listrik, antara lain pemutus sirkuit listrik, *power socket*, dan *switch*. "Kapasitas produksi kami untuk produk *power socket* 250 ribu per bulan, *switch* 150 ribu per bulan, dan MCB 150 ribu per bulan," sebut Lee.

Saat ini, perusahaan yang memiliki 250 karyawan tersebut sedang dalam proses sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Kemenperin. "Dalam waktu dekat, kami akan membiddik po-

tensi pasar domestik. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah dengan sertifikasi SNI produk-produk unggulan yang kami produksi," ujar Lee.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier menilai, bisnis industri peralatan listrik cukup prospektif ke depan seiring upaya mengakselerasi penerapan industri 4.0. "Kecanggihan peralatan listrik mampu membuat konsumsi daya rendah, namun dengan hasil yang maksimal. Untuk itu, pentingnya penggunaan teknologi modern," ujar dia.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada Jinheung Electric Indonesia yang rutin melakukan ekspor produk peralatan listrik rumah tangga seperti MCB, *power socket*, dan *switch* ke pasar

Korea Selatan. "Di tengah masa pandemi saat ini, kami bangga kepada para pelaku industri yang masih agresif menembus pasar ekspor," tegas Taufiek.

Kemenperin mencatat, meski diterpa pandemi Covid-19, industri pengolahan mampu mencatatkan ekspor sebesar US\$ 131,13 miliar pada Januari-Desember 2020 atau naik 2,95% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. "Kinerja gemilang ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang 2020 menjadi surplus US\$ 14,17 miliar," ungkap dia.

Ekspor Indonesia ke Korsel mencapai US\$ 6,51 miliar pada 2020. Adapun ekspor nonmigas Indonesia ke Korsel Januari-November 2020 mencapai US\$ 5,03 miliar. Pada 2019, Korsel adalah negara tujuan ekspor kedelapan Indonesia. (leo)

LELANG PIPA CIREBON GRESIK

Bakrie Diberi Waktu Satu Bulan untuk Sampaikan *Performance Bond*

Oleh Retno Ayuningtyas

► JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai pemegang hak khusus pembangunan Pipa Cirebon-Semarang. Namun, Bakrie harus segera memberikan jaminan *performance bond* untuk dapat menggarap proyek pipa gas ini.

“Akhirnya pada 1 Maret kami sepakat memberikan kepada Bakrie & Brothers. Sebulan sejak ditetapkan BPH Migas yakni mulai hari ini, 15 Maret, dia mesti memberikan *performance bond*,” kata Kepala BPH Migas Fanshurrullah Asa dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (15/3).

Dijelaskan, Bakrie & Brothers telah mengirimkan tiga surat kepada pihaknya pasca mundurnya PT Rekayasa Industri (Rekind) dari Proyek Pipa Cirebon-Semarang. Dalam salah satu surat tersebut, Bakrie & Brothers menyatakan kesanggupannya menggarap proyek pipa tersebut dengan hitungan keekonomian yang ditetapkan saat lelang pada 2006 lalu.

Performance bond merupakan syarat agar Bakrie & Brother dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang Proyek Pipa Cirebon-Semarang. Bakrie & Brothers harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Persepsi yang ditunjuk pemerintah sebesar 1% dari nilai investasi dalam dokumen penawaran lelang.

Jika dalam satu bulan perusahaan tidak dapat menyetorkannya, lanjut Fanshurrullah, maka



Fanshurrullah Asa

Bakrie & Brothers otomatis gugur sebagai pemegang hak khusus Pipa Cirebon-Semarang. “Jadi pada 15 April kalau tidak ada [*performance bond*], itu otomatis gugur,” ujarnya.

Ditambahkannya, jika berhasil memenuhi ketentuan *performance bond*, Bakrie & Brothers resmi menggarap Proyek Pipa Cirebon-Semarang. Sebulan setelah itu, perusahaan harus dapat segera mendapatkan perusahaan atau konsumen yang akan memakai pipa tersebut (*shipper*). “Mesti ada *gas agreement* kepada *shipper-shipper*, mesti jelas,” ungkap Fanshurrullah.

Selanjutnya, pada 15 Juni, Bakrie & Brothers harus menyampaikan studi kelayakan (*feasibility study/FS*) dan desain rinci (*front end engineering design/FEED*). Setelahnya Bakrie & Brothers resmi menggarap Proyek Pipa Cirebon-Semarang yang diharapkan dapat selesai dalam waktu sekitar 35 bulan.

Fanshurrullah menjelaskan, kesempatan yang diberikan pihaknya kepada Bakrie & Brothers ini sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pemenang pertama lelang proyek pipa menyatakan mundur, maka pemenang kedua dan ketiga berhak memperoleh kesempatan melanjutkan proyek tersebut. Dalam hal ini, Bakrie & Brothers merupakan pemenang kedua dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) adalah pemenang ketiga.

Jika ketiga pemenang tidak sanggup mengerjakan proyek pipa, pihaknya akan melakukan lelang ulang proyek tersebut. “Ketiga, baru akan kami kembalikan ke pemerintah,” tuturnya.

Dalam lelang Proyek Pipa Cirebon-Semarang di 2006 silam, Rekayasa Industri menjadi pemenang pertama dengan tawaran ongkos angkut (*toll fee*) US\$ 0,36 per juta british thermal unit (*million british thermal unit/MBBTU*). Selanjutnya, Bakrie & Brothers mengajukan *toll fee* US\$ 0,42 per MMBTU dan PGN US\$ 0,7-1,14 per MMBTU.

BPH Migas mendorong penyelesaian Pipa Cirebon-Semarang lantaran merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, pipa ini juga dapat mendukung pasokan gas ke Kawasan Industri Batang dan daerah di sekitarnya.

Jaminan Pasokan

Fanshurrullah mengatakan, salah satu kendala pembangunan Pipa Cirebon-Semarang



Energi Mandiri Tenaga Surya dan Angin

Suasana Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut yang memiliki program E-mas Bayu (Energi Mandiri Tenaga Surya dan Angin) dan E-mba Mina (Energi Mandiri Tambak Ikan), Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (15/3/2021). Kedua program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan ekonomi masyarakat sekitar.

adalah pasokan gas. Proyek pipa ini dilelang lantaran pemerintah menetapkan alokasi gasnya dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1321 K/20/MEM/2005 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTGDGBN).

Namun dalam RIJTGDGBN yang terbit berikutnya, lanjutnya, alokasi gas untuk Pipa Cirebon-Semarang ini dihapus. “Kalau mau

jujur Badan Usaha (BU) protes juga kenapa pemerintah tidak konsisten,” kata dia.

Padahal dari aspek pasokan gas, pihaknya mencatat terdapat sejumlah sumber gas yang dapat mengaliri pipa tersebut. Salah satunya yakni Proyek Unitisasi Lapangan Jambaran-Tiung Biru yang tengah ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Proyek ini direncanakan memproduksi gas hingga 175

juta kaki kubik per hari (*million standard cubic per day/MMscfd*) di mana sekitar 75 MMscfd akan dialirkan ke Pipa Gresik-Semarang yang akan terintegrasi dengan Pipa Cirebon-Semarang.

“Jadi ada potensi gasnya, tinggal dituangkan dalam RIJTGDGBN, dan itu [kewenangannya] di Menteri ESDM,” ungkap Fanshurrullah. Oleh sebab itu, pihaknya berharap Kepmen baru

untuk merevisi RIJTGDGBN ini dapat segera diterbitkan. Pasalnya, usulan RIJTGDGBN ini sudah disampaikan oleh pihaknya.

Sesuai ketentuan dalam lelang di 2006, Pipa Cirebon-Semarang direncanakan sepanjang 255 kilometer (km) dan diameter 28 inch, serta kapasitas alir gas 350-500 juta kaki kubik per hari MMscfd. Nilai investasi proyek ini diperkirakan US\$ 169,41 juta.

Chevron Sampaikan Data Blok Rokan ke Pemerintah

JAKARTA – Jelang alih kelola, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) selaku operator Blok Rokan saat ini, telah menyelesaikan sejumlah besar pendataan aset dan menyerahkan data produksi, eksplorasi, dan pendukung kegiatan operasi kepada Pemerintah Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Chevron juga mulai membagikan data tersebut ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai operator Blok Rokan berikutnya.

“Perusahaan kami berkomitmen untuk melaksanakan proses transisi Blok Rokan ini secara selamat, andal, dan lancar sehingga blok ini terus memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyat Indonesia. Ke depan, kami berharap agar proses alih kelola Blok Rokan dapat menjadi salah satu poin rujukan bagi peralihan wilayah kerja migas lainnya di Indonesia,” tutur *Manager Corporate Communication* PT CPI Sonitha Poernomo dalam keterangan resminya, Senin (15/3).

Sejak Agustus 2020 hingga sekarang, PT CPI telah menyerahkan seluruh data yang masuk di dalam termination

checklist kepada SKK Migas. Data tersebut termasuk yang berkaitan dengan geologi dan geofisika, perizinan, prosedur standar operasional (SOP), fasilitas produksi, pertanahan, kontrak barang dan jasa, sumber daya manusia dan program pengembangan masyarakat.

Chevron telah menuntaskan penyerahan data tersebut lebih awal dari jadwal untuk mendukung proses transisi yang lancar. Chevron juga berkoordinasi secara intensif dengan SKK Migas dan PHR untuk membahas berbagai aspek teknis proses transisi. Chevron juga berupaya mempertahankan produksi migas Blok Rokan. “Tahun lalu kami tetap mampu memenuhi target produksi yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Sonitha.

Selain itu, Chevron juga telah memulai program pengeboran secara incremental pada akhir Desember 2020 lalu sesuai dengan perjanjian pokok (Heads of Agreement/HoA) dengan SKK Migas yang ditandatangani pada September tahun lalu. “HOA ini sangat krusial untuk memperlambat laju penurunan produksi alamiah sebelum akhir masa alih kelola Blok Rokan

dan akan terus memenuhi kebutuhan energi bagi Indonesia,” tutur Sonitha.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Budiman Parhusip berkomitmen melakukan transfer of employment terhadap pekerja Chevron di Blok Rokan dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, pihaknya juga telah bekerja sama dengan beberapa universitas di Riau, termasuk untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Program TJSL akan diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Riau di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perencanaan program TJSL ini juga melibatkan pemerintah daerah. “Adapun program Local Business Development (LBD) yang di bangun dan dilaksanakan oleh CPI saat ini, terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Diperlukan koordinasi dengan CPI untuk mendapatkan skema dan data 260 kontrak LDB sebelum dilakukan sosialisasi,” ujar Budiman dalam keterangan resmi Pertamina. (ayu)

Bukan Lagi B3, PLN Siap Optimalkan Pemanfaatan Limbah FABAs dari PLTU

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap optimalkan pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), menjadi bahan baku keperluan sektor konstruksi dan infrastruktur, bahkan pertanian. Hal ini menyusul dikategorikannya FABAs menjadi Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 itu merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kini pemerintah sedang menyiapkan peraturan turunan terkait pemanfaatan FABAs tersebut.

“Di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, India dan beberapa negara lain hal ini bukanlah sesuatu yang baru dan mereka tidak memasukan FABAs ke dalam kategori limbah B3,” tutur *Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR*, Agung Murdifi.

Berdasarkan hasil uji laboratorium independen atas *Toxicity Characteristic*



Agung Murdifi

Leaching Procedure (TCLP) dan *Lethal Dose 50* (LD50) yang sampel-nya berasal dari beberapa PLTU, FABAs yang dihasilkan tidak mengandung unsur yang membahayakan lingkungan.

Beberapa Laboratorium telah melakukan uji kimia dan biologi atas FABAs, antara lain laboratorium Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bersama Laboratorium Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan

(PPSDAL) Universitas Padjadjaran. Beberapa pengujian toxicology-pun menunjukkan bahwa abu batu bara (FABA) yang diteliti dapat dikategorikan sebagai limbah tetapi bukan B3.

Meskipun telah menjadi limbah non B3, seluruh syarat persetujuan lingkungan dipenuhi sesuai standar dan ketentuan Nasional yang telah mengacu pada standar prosedur internasional Best Available Techniques (BAT) dan Best Environmental Practices (BEP).

PLN memastikan tidak akan membuang limbah-limbah tersebut tetapi akan lebih mengoptimalkan pemanfaatannya, karena dapat memberikan nilai ekonomi atas limbah tersebut, terutama bagi masyarakat. PLN juga akan bekerja sama dengan banyak pihak, terutama UMKM untuk memanfaatkan lebih lanjut FABAs yang telah dihasilkan sebagai limbah dalam proses produksi listrik.

“Kami telah melakukan berbagai uji coba dan mengembangkan agar FABAs hasil pembakaran di PLTU bisa dimanfaatkan dan hasilnya sangat mengembirakan. FABAs bisa dimanfaatkan untuk bahan penunjang infrastruktur seperti jalan, conblock, semen, hingga pupuk,” ungkap Agung. (rap)

BUMI UNTUK INDONESIA

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk

Dengan ini Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“Perseroan”) menyampaikan pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari **Kamis, 22 April 2021**.

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Maret 2021**. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 WIB**.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) POJK 15/2020 dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal **24 Maret 2021**.

Jakarta, 16 Maret 2021
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi

energy for life

PT Perusahaan Gas Negara Tbk
A member of Pertamina@Gas_Negara
@Gas_NegaraPerusahaan Gas Negara
Perusahaan Gas NegaraContact Center
1500-645
contact.center@pgn.co.id
www.pgn.co.id

Aturan Dana Konversi Diprediksi Sulit Berjalan

Oleh **Edo Rusyanto**

► **JAKARTA** – Aturan yang mewajibkan para pengembang rumah susun (rusun) untuk membayar dana konversi dinilai tidak mudah dilaksanakan. Ketentuan pembayaran dana konversi berlaku bila pengembang rusun tidak membangun 20% rusun umum ketika menggarap proyek rusun komersial.

“Ketentuan itu (pembayaran dana konversi) tidak akan gampang berjalan. Apalagi kalau menyangkut setoran uang sebagai sebuah kompensasi,” ujar pengamat bisnis properti, Panangian Simanungkalit, kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, hal tersebut terjadi karena tingkat kepercayaan pengembang kepada pemerintah soal pengelolaan dana kompensasi itu selain rendah, juga tidak merata antara pengembang di satu wilayah dengan pengembang di wilayah lainnya.

Kewajiban membayar dana konversi tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. PP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) itu diteken Presiden Joko Widodo dan berlaku sejak 2 Februari 2021.

Dalam PP itu disebutkan bahwa pelaku pembangunan rusun komersial wajib menyediakan rusun umum

dengan luas paling sedikit 20% dari total luas lantai rusun komersial yang dibangun. Definisi rusun komersial adalah rusun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan rusun umum adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban membangun 20% bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban melaksanakan pembangunan rumah susun umum dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rusun umum.

“Dana konversi ini sejatinya lebih memudahkan pengembang, karena secara praktis dapat memilih membayar dana konversi, ketimbang menyiapkan lahan dan konstruksi untuk hunian berimbang,” ujar *Senior Advisor Research Knight Frank Indonesia*, Syarifah Syaikat, kepada *Investor Daily*,

baru-baru ini.

Mengutip PP itu, pengembang wajib mengajukan perhitungan konversi kepada Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dan menyerahkan dana konversi ke Badan tersebut.

Keberadaan BP3 termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 9 tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang diteken Presiden Joko Widodo, 2 Februari 2021. Perpres itu merupakan turunan dari Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan pada 2 November 2020. “BP3 bertugas melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan. Lalu, melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta rumah susun umum,” bunyi Perpres tersebut.

Selanjutnya, untuk rumus perhitungan konversi akan ditetapkan oleh peraturan menteri (permen). “Kami belum tahu rincian tentang dana konversi hunian berimbang. Kini, masih dalam perundingan dan belum final. Belum ada kesepakatan,” ujar Paulus Totok Lusida, ketua umum DPP Real Estat Indonesia (REI), kepada *Investor Daily*, belum lama ini.

Sementara itu, dana konversi akan dimanfaatkan untuk pembangunan rusun umum pada kabupaten/kota yang sama, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta di provinsi yang sama. “Draf rancangan peraturan menteri (rapermen) masih dalam pembahasan. Dijadwalkan tahun ini rampung,”



Panangian Simanungkalit

ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul Hamid, kepada *Investor Daily*, baru-baru ini.

Menurut Syarifah, para pelaku properti, umumnya akan menghitung komponen dana konversi dalam rencana pengembangannya. Meskipun di tengah proses akan ada tantangan dalam realisasi regulasi, seperti formulasi penghitungan dana konversi, konfirmasi masyarakat atas realisasi dana konversi, dan bentuk dana konversi.

“Pengembang juga mendapat tantangan tersendiri untuk tetap mempertahankan kualitas layanan rumah susun komersial dengan harga yang kompetitif di tengah kewajiban dana konversi,” kata dia.

Dampak Terhadap Properti

Sementara itu, kata Panangian, ketentuan dana konversi belum bisa dikatakan berpengaruh positif atau negatif terhadap industri properti khususnya rusun atau apartemen. “Karena kewajiban seperti ini kan baru saja diperkenalkan oleh pemerintah,” tuturnya.

Dia mengatakan, pada zaman orde baru tahun 1990-an, ada kebijakan bagi pengembang yang membangun di atas lahan 200 hektare (ha), diwajibkan membangun dengan perbandingan 1:3:6 untuk segmen rumah kecil, menengah, dan besar dalam satu hamparan. “Namun, 10 tahun kemudian diubah lagi rasionya menjadi 1:2:3, tetapi tidak jalan juga,” tutur dia.

Kemudian, tambahnya, khusus di DKI Jakarta, pada tahun 1990, gubernur mengeluarkan SK No 540 yang mewajibkan setiap pengembang memiliki lahan minimal 5.000 meter persegi (m2), untuk membangun rusun sebanyak minimal 20%, di atas tanah 5.000 m2 itu. “Tapi, kebijakan itu pun tidak pernah berjalan mulus sampai dengan sekarang,” tegas Panangian.

Menurut dia, walaupun aturan itu pernah dilonggarkan, yakni bila pengembang tidak membangun rusun, boleh membayar sejumlah kompensasi kepada Pemrov DKI Jakarta, tapi kenyataannya ada yang rela membayar, tetapi lebih banyak lagi yang sama sekali tidak membangun rusun sesuai isi SK 540 tahun 1990 itu. “Bahkan, juga tidak mau membayar kompensasi apapun,” ujar Panangian. Menurut Syarifah, seperti yang

pernah berlaku di Jakarta terkait dana konversi perumahan sebelum ini, maka untuk wilayah-wilayah dengan permintaan hunian yang cukup tinggi, dengan prospek pengembangan aset yang potensial, regulasi dana konversi dapat berjalan dengan baik. “Dalam arti, konsep ini dapat direalisasikan meskipun menjadi tantangan tersendiri untuk pengembang melakukannya pada masa pemulihan ekonomi seperti saat ini,” paparnya.

Karena itu, saran dia, para pengembang harus melakukan kalkulasi secara cermat, antara pilihan mengalokasikan pembangunan rumah sederhana atau menyediakan dana konversi. “Dengan konsultasi mengenai ketersediaan tanah berdasarkan *land bank* pemerintah, semoga didapatkan jalan keluar yang *win-win solution* dalam penerapan regulasi ini,” harap Syarifah.

Bagi Panangian, yang mesti dilakukan pengembang adalah duduk bersama dengan pemerintah untuk menemukan sinergi kepentingan kedua belah pihak. Karena semua berujung pada tujuan membangun kesejahteraan yang berkeadilan. Prinsipnya bagaimana menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang perumahan, untuk memenuhi prinsip rumah untuk semua (*housing for all*).

“Setiap kota di Indonesia adalah rumah bagi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah (buruh tidak tetap), hingga kalangan berada (*the haves*),” tegas Panangian.

PUPR Sinkronkan Program Perumahan di Sumatera

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyinkronkan program perumahan pemerintah pusat dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun anggaran 2022.

Direktur Sistem dan Strategi Perencanaan dan Penyelenggaraan Perumahan PUPR Dwitoyo Akoro Soeranto, menyatakan, kegiatan sinkronisasi tersebut bertujuan untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan tahun 2022. “Selain itu juga sebagai penyipan *readiness criteria* dari setiap usulan pembangunan perumahan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam arahan prioritas nasional,” kata dia, dalam siaran pers, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (Balai P2P) yang baru didirikan pada 2020 didasari oleh unit sebelumnya, yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sumatera Barat, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Riau dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan



Dwitoyo A Soeranto

Kepulauan Riau. “Balai P2P diharapkan dapat mewujudkan target pembangunan rumah layak huni melalui kewenangan yang diberikan, pengawasan pembangunan perumahan di daerah berbasis kolaborasi dan memiliki posisi yang kuat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjawab masalah *backlog* yang masih terjadi hingga saat ini,” tutur Dwitoyo.

Data PUPR menyebutkan, dalam rentang 2016-2019, di tiga kawasan tersebut terbangun 1.064 unit rumah susun (rusun). Lalu, 1.305 unit rumah khusus (rusus) dan 42.250 unit rumah swadaya.

Sementara itu, untuk meningkatkan target kinerja tahun 2020-2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR pada 2020 mengulirkan bantuan pembangunan rumah swadaya terdiri atas 13.320 unit dan rusus 30 unit. Pada 2021, bantuan pembangunan PSU sebanyak 2.100 unit, rumah swadaya (6.150 unit), rusus (120 unit), dan rusun (511 unit).

Kemudian, pada 2022, pembangunan PSU (2.888 unit), rumah swadaya (6.360 unit), rusus (120 unit), dan rusun (819 unit). Sedangkan pada 2023, terdapat bantuan pembangunan 3.675 unit untuk PSU, rumah swadaya (9.510 unit), rusus (120 unit), dan rusun (1.018 unit).

Pada 2024, bantuan pembangunan terdiri atas 4.664 unit untuk PSU, 10.980 unit untuk rumah swadaya, dan 120 unit untuk rusus. Selain itu, 864 unit untuk rusun. Sehingga dengan target kinerja dari tahun 2020-2024 ini dapat menjawab masalah *backlog* yang masih terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. (**imm**)



Pembebasan Pajak

Pekerja menyelesaikan bangunan apartemen di Jakarta, Senin (15/3/2021). Pemerintah akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen di sektor properti. Masyarakat akan dibebaskan PPN saat membeli rumah tapak atau rumah susun/apartemen baru yang nilainya maksimal Rp 2 miliar. Sedangkan harga rumah antara Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar akan diberikan diskon PPN sebesar 50 persen.

JGC Serahkan Sodetan ke DKI Jakarta

JAKARTA – PT Mitra Sindo Sukses pengembang *township* Jakarta Garden City seluas 370 hektare (ha) di Jakarta Timur, telah menyelesaikan pembangunan sodetan (*crossing*) untuk mengalirkan air dari Jakarta Garden City (JGC) menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Anak usaha PT Modernland Realty Tbk (Modernland) itu juga secara resmi menyerahkan sodetan itu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pembangunan *crossing* untuk mengalirkan air dari Jakarta Garden City (JGC) menuju Kanal Banjir Timur (KBT) yang dikerjakan oleh JGC sebagai wujud

kepedulian terhadap masyarakat sekitar perumahan khususnya terhadap upaya antisipasi banjir di kawasan Cakung dan sekitarnya.

General Manager Town Management & High Rise Jakarta Garden City, Togu Pangihutan, mengatakan, PT Modernland Realty Tbk senantiasa berkomitmen untuk mendukung berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar proyek yang dikembangkannya perseroan.

Wujud kepedulian tersebut diimplementasikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*/CSR) yang dilakukan secara berkesinambungan. Termasuk pembangunan *crossing* untuk mengalirkan air dari JGC menuju KBT.

“Semoga dengan adanya sodetan ini dapat bermanfaat bagi wilayah di sekitar kawasan Jakarta Garden City sehingga diharapkan tidak akan mengalami bencana banjir saat musim penghujan. Kami juga berterima kasih dengan terselenggaranya kerja sama yang baik dengan para *stakeholder* sehingga pembangunan sodetan ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan,” ujar Togu Pangihutan, dalam

siaran pers, baru-baru ini. Sementara itu, M Anwar, walikota Jakarta Timur menjelaskan, *crossing* JGC sepanjang 200 meter dibuat untuk mengalirkan air dari Waduk Rorotan side B-JGC menuju danau River Garden side C-JGC, lalu menuju ke embung samping KBT. “Kami sangat mengapresiasi peran serta dan partisipasi aktif dari manajemen Jakarta Garden City yang telah berhasil membangun saluran sodetan ini, diharapkan kedepan semoga dapat mengurangi dampak bencana banjir khususnya di kawasan sekitar perumahan Jakarta Garden City,” kata Walikota. (**imm**)

PUPR Alokasikan Bantuan PSU di Papua Rp 3,7 M

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2021 ini akan menyalurkan anggaran bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di Provinsi Papua senilai Rp 3,7 miliar. Dana tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi di daerah tersebut.

“Bantuan PSU disalurkan oleh Kementerian PUPR agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi merasa nyaman,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran pers, Senin (15/3).

Menurut Khalawi, pembangunan PSU berupa jalan lingkungan

yang akan membantu pengembang pembangunan rumah dalam Program Sejuta Rumah (PSR) di Papua. Adanya bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong semangat para pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi untuk masyarakat.

Pelaksanaan Bantuan PSU, imbuhnya, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum. Adapun komponen bantuan PSU yang akan dikerjakan adalah jalan lingkungan.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Rumah Umum dan

Komersial Ditjen Perumahan, target pembangunan Bantuan PSU Perumahan mulai tahun anggaran 2015-2019 selalu memenuhi target bahkan selalu melebihi jumlah unit yang ditargetkan. Capaian penyaluran bantuan PSU tahun 2015 sebanyak 29.956 unit, 2016 sebanyak 26.884 unit, 2017 sebanyak 17.218 unit, 2018 sebanyak 30.406 unit, dan 2019 sebanyak 15.148 unit.

“Bantuan PSU ini bersifat stimulan dan diberikan agar pelaku pembangunan khususnya pengembang dapat lebih banyak membangun rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR di Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Faisal Soedarno di Jayapura menerangkan, target pembangunan PSU un-

tuk rumah bersubsidi yang akan disalurkan Kementerian PUPR tahun ini di Papua sebanyak 395 unit. “Total anggaran pembangunan PSU di Papua adalah Rp 3,7 miliar,” terangnya.

Soedarno menerangkan, penyaluran bantuan PSU dilaksanakan dan tersebar di Kabupaten Jayapura sebanyak 60 unit dan Kabupaten Merauke sebanyak 100 unit serta Kota Jayapura sebanyak 235 unit.

“Kami harap bantuan ini dapat mendorong capaian target Program Sejuta Rumah dan mengurangi *backlog* perumahan di Indonesia. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat berpenghasilan rendah di Papua bisa mendapatkan rumah layak huni dengan lingkungan yang lebih berkualitas karena tersedianya PSU yang memadai,” jelasnya. (**imm**)

bank net
syariah

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NET INDONESIA SYARIAH Tbk.

Direksi PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu / 7 April 2021
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mulia Hotel
Jl. Asia Afrika - Senayan
Jakarta 10270

Mata Acara Rapat Luar Biasa:

1. Persetujuan perubahan nama Perseroan;
2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
3. Persetujuan penambahan modal dengan cara menerbitkan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk mengesakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengalihan suara serta penyampaian pertanyaan. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu:
 - i. Surat Kuasa Konvensional: Formulir surat kuasa konvensional yang mencakup pemilihan suara yang akan diberikan serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.banknet syariah.co.id)
 - ii. Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal 7 April 2021 melalui email perseroan.corporate.secretary@banknet syariah.co.id dan email Biro Administrasi Efek sharestar.indonesia@gmail.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni 2 April 2021 dengan alamat sebagai berikut:

PT Sharestar Indonesia
BeritaSatu Plaza Lt 7,
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan
telepon +6221 527 7966
4. Pemegang saham atau kuasa yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir beserta surat Pembertahanan atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK No. 15, bahan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS pada setiap jam kerja atau dapat diperoleh dari web Perseroan (www.banknet syariah.co.id).
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur, protokol Kesehatan, kebijakan dan pengaturan lainnya yang ditentukan oleh Perseroan, pihak pengelola Gedung tempat Rapat diselenggarakan dan/atau otoritas yang berwenang.
9. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan mengharuskan para tamu dan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk dapat menggunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan perseroan baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara konvensional dengan memberikan kuasa kepada BAE.
10. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat.

Jakarta, 16 April 2021

Direksi Perseroan

150 Kamera ETL E Ditargetkan Terpasang di Jakarta

Oleh **Imam Suhartadi**

► **JAKARTA** – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menargetkan tahun ini 150 kamera *electronic traffic law enforcement* (ETLE) terpasang di jalan Ibu Kota, termasuk di jalan tol dan jalur Transjakarta.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo mengatakan, kamera ETL E yang sudah terpasang sejak 2018 berjumlah 57 unit. Rencananya, Polri kembali memasang 41 kamera di Jakarta pada *launching* ETL E Nasional yang diikuti 12 Polda, pada 23 Maret 2021.

"Ketika *launching* nanti dari 57 di Jakarta, kita tambahkan ada 41 kamera lagi, yaitu di koridor Transjakarta dan jalan tol total 98. Belum lagi ditambah proposal pengajuan kita untuk hibah ETL E tahap keempat kepada Pemprov DKI sejumlah 60 kamera. Jadi targetnya kalau semua berjalan baik, maka tahun 2021 di Jakarta akan ada 150 titik kamera ETL E," ujar Sambodo, di Jakarta, Senin (15/3).

Dikatakan Sambodo, ETL E yang masuk ke dalam program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit bermanfaat bukan hanya terkait penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga sebagai alat bukti tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas.

"Terbukti dari pengungkapan kasus tabrak lari kemarin (Mercy tabrak pesepeda), sangat terbantu dengan adanya capture dari kamera ETL E yang ada di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, sebelum, saat kejadian dan sesudah kejadian. Dari foto-foto itu kita analisis siapa pengemudi dan kita mengarah ke tersangka," katanya.

Uji Coba

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus melakukan uji coba kamera ETL E portabel yang terhubung dengan *Traffic Management Centre* (TMC) Polda Metro Jaya.

"Yananti untuk ETL E portabel ini kita masih taraf uji coba. Bentuknya bisa *helmet cam*, *dash cam*, dan bisa *body cam*. Nah ini yang sedang kita coba karena kita berharap *helmet*, *dash*, dan *body cam* ini kemudian bisa langsung terhubung dengan data base kendaraan bermotor dan juga terhubung sama TMC," ujar Sambodo.

Dikatakan Sambodo, uji coba dilakukan untuk memastikan teknologi kamera dapat bekerja dan berfungsi dengan baik.

"Jadi misalnya kita uji coba *body cam* yang ketika dia (Polantas) menangani laka lantas atau berhadapan dengan pelanggaran, dia bisa nyalakan *body cam* itu. Sehingga ketika terjadi adu mulut dan sebagainya, apa yang terjadi itu kemudian bisa di-*record* kamera dan bahkan bisa dipantau TMC," ungkapnya.

Selain pelanggaran lalu lintas, tambahnya, kamera itu juga dapat digunakan saat pengaturan lalu lintas dan pengamanan saat unjuk rasa.

"Jadi nanti ketika unjuk rasa anggota tinggal pasang *body cam*-nya, kemudian apa yang terjadi di situasi unjuk rasa itu kemudian bisa langsung terpantau di TMC Polda. Ini sedang kita

uji coba teknologinya," katanya.

Penindakan Hukum

Diketahui, Ditlantas Polda Metro Jaya telah memberlakukan penindakan hukum menggunakan kamera ETL E sejak 1 November 2018. Pelanggar yang *capture* kamera akan langsung diverifikasi oleh petugas *back office* di TMC Polda Metro Jaya, untuk memastikan validitas identitas kendaraan dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan melalui PT Pos atau melalui alamat email dan nomor handphone pelanggar. Proses tersebut akan dilakukan 3 hari setelah terjadinya pelanggaran. Dalam surat konfirmasi akan disertakan foto bukti pelanggaran itu.

Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik kendaraan wajib melakukan konfirmasi penerimaan melalui website www.ete-pmj.info atau melalui aplikasi android ETL E-PMJ. Pemilik kendaraan juga dapat mengirimkan blanko konfirmasi tersebut ke Posko ETL E di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. Pelanggaran diberikan waktu 5 hari untuk melakukan konfirmasi.

Melalui metode konfirmasi itu, pemilik kendaraan dapat mengklarifikasi siapa yang menjadi subjek pelanggaran, termasuk bila kendaraan telah dijual ke pihak lain dan belum dilakukan proses balik nama.

Setelah itu, pelanggar akan diberikan surat tilang biru sebagai bukti pelanggaran serta kode virtual untuk membayar tilang di bank. Selanjutnya, pelanggaran diberikan waktu selama 7 hari lagi untuk membayar denda tilang. Jika tidak ada pembayaran akan dilakukan pemblokiran STNK sementara sampai denda tersebut dibayarkan. (b1)



Pengerukan Sedimentasi Sungai Ciliwung

Petugas mengoperasikan ekskavator untuk mengeruk lumpur Sungai Ciliwung di Pasar Baru, Jakarta, Senin (15/3/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengeruk lumpur akibat sedimentasi sungai untuk memastikan aliran air terjaga dan meminimalisir potensi banjir.

Covid-19 Melandai di Tujuh Provinsi yang Terapkan PPKM

JAKARTA – Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Brigjen TNI (Purnawirawan) Alexander K. Ginting mengatakan kasus Covid-19 di tujuh provinsi yang menerapkan kebijakan pembatasan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai melandai.

"Secara merata di tujuh provinsi Jawa dan Bali itu sudah mulai melandai," kata dr. Alexander K. Ginting saat diskusi daring dengan tema *update* RSDC Wisma Atlet: Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro terhadap Penanganan Kesehatan yang dipantau di Jakarta, Senin (15/3).

Mulai melandainya kasus penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa

Timur, dan Bali tersebut dipengaruhi oleh keberadaan posko di tingkat desa yang melakukan pengawasan serta pendampingan yang disertai bantuan babin dan bhabin kamtibmas.

Dengan metode tersebut, menurut dia, kinerja tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan Satgas Pusat lebih terbantu karena dukungan aparat posko desa, terutama dalam hal penelusuran kontak dan pengelolaan zona isolasi.

Namun, Alexander K. Ginting mengingatkan pemerintah harus terus menyediakan logistik terkait dengan kebutuhan PPKM skala mikro. Hal itu meliputi ketersediaan tes cepat anti-

gen dan lain sebagainya. "Jika hasilnya positif, harus dikonfirmasi dengan hasil pemeriksaan

PCR," ujarnya.

Oleh sebab itu, ketersediaan logistik perlu terus dijaga agar tim pelacakan di lapangan tidak terkendala dalam menangani pandemi Covid-19 di tingkat mikro.

Perlu diingat, lanjut dia, masyarakat yang diketahui tetap kesehatan di tingkat desa. Selain itu, para petugas yang bekerja juga menggunakan bahasa lokal sehingga lebih memudahkan komunikasi dengan masyarakat setempat.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus harian Covid-19 di Indonesia pada Senin (15/3) sebanyak 5.589. Terjadi peningkatan dibanding jumlah kemarin

yakni 4.717.

Dengan penambahan ini maka total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.425.044. Untuk kasus sembuh hari ini bertambah 6.830 sehingga total menjadi 1.249.947 atau 87,7% dari kasus terkonfirmasi positif.

Kasus meninggal bertambah 147 menjadi total 38.573 atau 2,7% dari kasus terkonfirmasi positif.

Jumlah tersebut didapatkan dari pemeriksaan spesimen sebanyak 47.808. Sebanyak 34.406 di antaranya adalah pemeriksaan PCR, 13.049 pemeriksaan antigen, dan 353 pemeriksaan TCM (tes cepat molekuler).

Sedangkan kasus aktif turun sebanyak 1.388 sehingga total menjadi 136.524. Adapun jumlah *suspect* sebanyak 63.957. (b1/ant)

Ditlantas Polda Metro Larang Personelnya Kawal Moge dan Sepeda

JAKARTA – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengeluarkan kebijakan baru yang melarang personelnya mengawal motor gede (moge), mobil mewah dan pesepeda, kecuali untuk kegiatan resmi.

"Ini kebijakan Polda Metro Jaya dan saya sudah melarang anggota saya mengawal moge, mengawal motor, mobil mewah dan pesepeda," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Senin (15/3).

Sambodo mengatakan, personel Ditlantas Polda Metro Jaya melarang personelnya memberikan pengawalan dengan alasan hal itu kerap menimbulkan rasa kecemburuan bagi masyarakat.

"Karena pengawalan oleh polisi sering menimbulkan kecemburuan masyarakat," katanya.

Meski demikian, dia mengatakan larangan pengawalan tersebut tidak bersifat mutlak. Polisi masih tetap bisa melakukan pengawalan terhadap masyarakat yang membutuhkan, salah satunya adalah kegiatan olahraga resmi.

"Kecuali memang mereka kegiatan olahraga, ada *event* olahraga balap sepeda yang memang itu atlet kita kawal pengamanan," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza akan memeriksa kebenaran mengenai adanya kabar petugas Dishub DKI Jakarta mengawal rombongan klub mobil sport mewah yang

beritanya viral di media sosial.

"Terkait berita yang beredar nanti kami akan cek kebenarannya apa betul ada Dishub yang mengawal mobil mewah dari Jakarta ke Bogor. Untuk kepentingan apa nanti kita cek dulu," kata Ariza saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/3).

Ariza mengatakan, Pemprov DKI tak ingin tergesa-gesa dalam menanggapi sebuah informasi yang beredar di media sosial tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya.

"Semua pemberitaan di era keterbukaan ini tentu sesuatu yang baik, kita berbagi informasi namun demikian kita harus hati-hati dan teliti terlebih dahulu untuk menyaring informasi dan apa yang sesungguhnya terjadi," ujarnya. (ant)

170 Sekolah di Kabupaten Bogor Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

CIBINONG – Sebanyak 170 sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menggelar uji coba pembelajaran secara tatap muka setelah lama menerapkan pembelajaran daring sejak pandemi.

"Dari jumlah 232 sekolah yang diusulkan hasil verifikasi dan validasi yang lolos berjumlah 171 sekolah, dan ada satu sekolah MTs yang mengundurkan diri, jadi total izin yang dikeluarkan Disdik sebanyak 170 sekolah," ungkap Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong Bogor, Senin (15/3).

Ratusan sekolah yang mel-

aksanakan uji coba mulai hari ini terdiri dari 29 SD Negeri, 24 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 28 SMP, 18 Madrasah Sanawiah (MTs), tujuh Madrasah Aliyah (MA), 32 SMA, dan 32 SMK.

"Pembelajaran tatap muka dilaksanakan di setiap kecamatan satu jenjang pendidikan dari mulai SD, MI, SMP, MTs, SMA, MAN dan SMK," kata Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.

Ade Yasin menyebutkan bahwa uji coba tersebut dilaksanakan selama satu bulan, mulai 9 Maret-10 April 2021. Jika pada

pelaksanaannya terdapat siswa ataupun guru yang positif Covid-19, maka pembelajaran di sekolah tersebut kembali menerapkan pembelajaran daring.

la mengatakan, satuan pendidikan yang diizinkan melaksanakan sekolah tatap muka tetap harus melayani pembelajaran secara daring jika orangtua siswa tak memberi izin anaknya ke sekolah.

"Namun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, sekitar 72-95% orangtua siswa menyetujui untuk dilaksanakan," kata Ade Yasin.

Pemkab Bogor membolehkan uji coba pembelajaran tatap muka seiring perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang efektif berlaku pada 9-22 Maret 2021.

Aturan tersebut dituangkan dalam Keputusan Bupati (Kepbup) Bogor bernomor 443/2020/Kpts/Per-UU/2021 tentang PPKM berskala mikro. (KR-MFS)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih menunggu vaksinasi covid-19 tahap dua selesai sebelum menggelar pembelajaran tatap muka (PTM). (b1)

Pemerintah akan Naikkan PPNBM Mobil Hybrid

Sambungan dari hal 1

Karena itu dianggap memberikan *feasibility* dari *vehicle battery* berproduksi di Indonesia. Perubahan skema satu ke skema dua lebih progresif perbedaannya apabila mereka sudah masuk dalam investasi yang signifikan sebesar Rp 5 triliun bagi para industri dan sudah menjalankan produksi secara komersial maka mulai berlaku," tutur Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, ketentuan baru ini merupakan perubahan atas PP 73/2019 yang mulai berlaku per tanggal 16 Oktober 2021 atau dua tahun setelah beleid tersebut diundangkan. Sehingga, harapannya tidak berdampak buruk bagi keberlangsungan industri terkait.

"Ini strategi pengembangan yang berbasis *vehicle* dan dikaitkan investor membangun kendaraan elektrik di Indonesia, perlu melakukan skema perubahan tarif PPNBM. Mengingat minat investor di Indonesia maka pemerintah mengajukan perubahan," ujarnya.

Bahkan, rencana perubahan tarif PPNBM telah berdasarkan pada pembahasan di Sidang Kabinet bersama Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Perindustrian, dan Kepala BKPM, serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mendorong investor mobil listrik merealisasikan komitmen investasinya di Indonesia.

"Saat ini dengan pembahasan

lebih jauh dan melihat dan asesmen ketertarikan investor untuk masuk dan produksi mobil listrik ini dan juga bagaimana tren mobil listrik ke depan. Peluang Indonesia jadi pemain utama di *electric vehicle* lebih besar peluangnya di *battery vehicle*," tuturnya.

Sedangkan dari aspek lingkungan, rencana kebijakan ini sejalan dengan komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon pada tahun 2030 sebagaimana dalam Paris Agreement yakni sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional.

Sementara itu, di Indonesia, emisi dari sektor transportasi hampir mencapai 30% dari total emisi CO2. Emisi tertinggi terutama berasal dari transportasi darat yang berkontribusi sebesar 88% dari total emisi di sektor transportasi.

"Nah kendaraan yang hemat energi berarti dalam konsumsi bahan bakarnya akan menjadi kecil karena elektrik maka diberikan PPNBM 0% dari harga jual," tuturnya.

Pemain Utama Dunia untuk Industri Baterai

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dunia dalam hal industri *battery electric vehicle* (BEV), seiring dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam khususnya bijih nikel di Indonesia yang merupakan bahan baku utama untuk industri baterai dan pengembangan mobil listrik.

"Saat ini Indonesia dianggap sebagai pusatnya (nikel), bahkan di beberapa artikel interna-

sional menggambarkan suatu sisi ketergantungan terhadap nikel yang meningkat. Dan sekarang (Indonesia) menjadi pusat perhatian terhadap pembangunan dari *battery electric vehicle* itu sendiri," tuturnya.

Oleh karena itu, percepatan hilirisasi industri nikel menjadi fokus pemerintah saat ini yakni dengan dibentuknya BEV yang akan ditransformasikan. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi menjadi negara pengeksport sumber daya alam dalam bentuk komoditas yang tidak memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

"Jadi sisi *timing* kita tak bisa menunggu lama, sebab bisa saja kemudian berubah teknologinya. Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar dan produksi terbesar jelas merupakan satu negara jadi pusat perhatian pembangunan BEV atau baterainya itu sendiri," tegasnya.

la mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan tren teknologi global yang memiliki fokus pada energi baru terbarukan (EBT) yang juga terkait dengan perubahan iklim dengan membangun dan meningkatkan daya saing industri otomotif berbasis baterai.

Di sisi lain, kendaraan elektrik berbasis baterai atau mobil listrik akan menjadi keniscayaan di dunia karena mulai meningkatnya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi konsumsi bahan bakar berbasis fosil. Dengan demikian, tren kepemilikan mobil listrik secara global diperkirakan akan meningkat tajam ke depannya.

"Dengan kesadaran akan lingkungan yang semakin meningkat, maka mulai dibicarakan mengenai tren kendaraan bermotor mengalami transformasi sangat cepat dari bahan bakar fosil menjadi yang terbarukan atau disebut *battery electric vehicle* yang diperkirakan akan mendominasi kendaraan bermotor listrik di seluruh dunia," ungkapnya.

Di samping itu, pasar mobil listrik masih berpusat di Tiongkok dan Amerika Serikat. Sementara kendaraan hybrid paling besar di Indonesia. Adapun penjualan kendaraan listrik di Indonesia masih sangat rendah.

"Ini karena masih tahap *early* dan dari faktor perpajakan akan lihat, serta infra pendukung BEV," tutur Sri Mulyani. Berdasarkan data pemerintah, penjualan mobil listrik pada 2020 baru mencapai 120 unit. Sedangkan untuk hybrid terjual 1.108 unit sepanjang Januari hingga Desember 2020.

Tak Sekadar Kumpulan Penerimaan Negara

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk mengenakan PPNBM tidak sekadar untuk mengumpulkan penerimaan negara. Namun untuk menjaga keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi.

Menkeu menjelaskan, pemungutan PPNBM tidak hanya untuk penerimaan negara. Desain PPNBM dilakukan dalam empat pertimbangan yang harus dilakukan konsultasi bersama DPR khususnya Komisi XI, bahkan sesuai Undang-Undang

PPN Pasal 5 Ayat 1 yaitu perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang digolongkan mewah.

"Dalam rangka menjaga keseimbangan pembebanan pajak antarkonsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi," ujarnya.

Kemudian, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional serta termasuk untuk mengamankan penerimaan negara. Lalu, barang-barang yang dapat dikenakan PPNBM terdiri atas bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang menunjukkan status.

"Memang kalau di Indonesia dilihat barang yang dianggap mewah dipersiapkan dan perlu dikenakan PPNBM, pengelompokan barang yang kena PPNBM dalam penjelasan Pasal 8 dilakukan setelah konsultasi dengan DPR, sebelum kami kenakan PPNBM," tegasnya.

Sementara itu, ia menuturkan dasar hukum pengenaan PPNBM kendaraan bermotor yang berlaku saat ini ada tiga, yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PP Nomor 41 Tahun 2013 sttd PP 22 Tahun 2024, serta PMK 33/PMK.010/2017.

Perluas Cakupan Diskon PPNBM

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga berencana memperluas cakupan diskon PPNBM untuk mobil dengan kapasitas isi silinder hingga 2.500 cc. Namun, kebijakan tersebut hanya untuk

mobil dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%. Artinya, untuk mobil yang berkapasitas di bawah 2.500 cc tetapi TKDN di bawah 70%, maka tidak akan mendapatkan diskon pajak.

"Jadi sedang melakukan penyesuaian, asal TKDN 70 persen bisa sampai ke 2.500 cc, ini yang nanti *mem-address* isu mengenai beberapa permintaan terhadap mobil di atas 1.500 cc di dalam relaksasi PPNBM yang diberikan," jelas Sri Mulyani.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan diskon PPNBM untuk pembelian mobil baru mulai Maret hingga Desember 2021 dengan kapasitas silinder 1500 cc. Diskon ini diberikan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama periode Maret-Mei 2021 diberi diskon 100%, kemudian periode Juni-Agustus 2021 diberikan diskon yang diberikan 50%. Sementara untuk periode September-Desember 2021 pemberian diskon sebesar 25%.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPNBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021.

Menurut Menkeu, aturan perluasan diskon tersebut diberikan atas dasar arahan Presiden Joko Widodo agar industri otomotif dan turunannya bisa lebih cepat pulih usai terpuruk cukup parah akibat pandemi Covid-19.

"Jadi memang saat ini (yang berlaku) 1.500 cc, arahan dari Presiden untuk menyampaikan

kalau dilihat memang bisa di atas 1.500 cc asalkan TKDN-nya 70 persen itu mungkin bisa jadi pertimbangan," ujarnya.

Lebih lanjut Menkeu mengakui bahwa industri kendaraan bermotor merupakan salah satu industri yang terpuruk dalam selama pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid jelas mempengaruhi semua sektor termasuk manufaktur, sebab kita tidak boleh melakukan mobilitas terlihat pukulan sangat dalam dari sektor manufaktur otomotif dan terlihat baik alat angkut dan perdagangan kendaraan bermotor yang menyerap 2 persen tenaga kerja kita dengan tingkat upah yang relatif cukup baik, dia kemudian akan sangat terpengaruh," tegasnya.

Karena itu, lanjut Mekeu, transformasi ekonomi merupakan poin penting untuk melakukan reformasi dengan tujuan agar menciptakan industri manufaktur yang memiliki nilai tambah atas produktivitas dan inovasi yang semakin baik.

Sektor otomotif merupakan salah satu sektor manufaktur yang penting dan merupakan salah satu sektor yang diidentifikasi memiliki kemampuan transformasi. Bahkan akselerasi pembangunan infrastruktur yang terjadi di Indonesia juga mendorong industri otomotif menjadi salah satu produk yang menarik dan dibutuhkan Indonesia.

"Sektor manufaktur dalam sebuah perekonomian, pertumbuhan GDP sektor otomotif relatif cukup baik dan stabil seiring peningkatan permintaan atau pembelian dari kelompok menengah," tuturnya. (jn)

Expro Ajak Anak Yatim Belanja Gratis di Matahari

JAKARTA – PT Expro Nusantara Raya mengajak anak-anak yatim belanja baju gratis di Matahari Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Minggu (14/3/2021). Acara ini merupakan program tanggung jawab sosial sekaligus memberikan kebahagiaan anak-anak yang sebagian besar belum pernah belanja di mal.

Haikal (7 tahun) tak dapat menyembunyikan rasa senangnya. Hari itu, bersama 137 anak yatim lainnya, ia diajak ke Matahari Lippo Karawaci untuk belanja pakaian gratis. "Saya belanja baju muslim dan baju main bergambar Boboboy," kata bocah itu kepada *Investor Daily*.

Belanja baju di mal dan memilih sendiri baju yang diinginkan, menjadi pengalaman menyenangkan bagi anak-anak yatim yang berasal dari empat desa di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. "Saya belum pernah belanja di mal," aku Haikal.

Pengakuan Haikal memang cukup menyedihkan dibanding anak-anak lain yang sudah terbiasa belanja di mal. "Anak-anak yang kami pilih untuk belanja gratis di Mata-

hari Departemen Store Lippo Karawaci ini memang belum pernah belanja di mal. Biasanya mereka belanja di pasar malam atau di pasar. Semoga ini jadi experience menyenangkan buat mereka," kata Hari Juanda, komisaris PT Expro Nusantara Raya.

Biasanya, program CSR yang dilakukan adalah memberikan sembako dan uang tunai kepada 1.100 kaum dhuafa binaan PT. Expro. "Namun hari ini, mereka bebas belanja dua stel pakaian yang terdiri atas baju muslim dan baju main," lanjut Hari yang mengungkap tak kurang 11 ton beras disumbangkan untuk anak yatim, janda, dan kaum dhuafa di sekitar mereka setiap bulannya.

Karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, kegiatan berbelanja bersama 137 anak yatim ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain semuanya mengenakan masker, anak-anak yatim ini pun tidak akan berbelanja secara bersamaan dan berkerumun, melainkan akan dibagi menjadi beberapa group kecil yang diawasi dan diarahkan oleh *sales promotion*

girl. Waktu untuk berbelanja dibatasi hingga jam 11.00 Wib. Selama mereka berbelanja, Matahari Departemen Store Lippo Karawaci ditutup untuk umum.

Jamsuri, Direktur Utama PT Expro Nusantara Raya mengatakan, berbagi kebahagiaan dengan sesama yang kurang beruntung merupakan wujud dari program *corporate social responsibility* (CSR) Expro. "CSR ini merupakan kegiatan rutin bulanan. Setelah sebelumnya sukses di bidang garmen, kini kami bergerak di bidang teknologi menghadirkan sebuah platform edukasi bisnis yang diberi nama KitaExport dan juga melanjutkan pengembangan usahanya di bidang pertanian dengan memproduksi bibit dan pupuk organik," jelas Jamsuri.

Menurut Jamsuri, berbagi kepada anak-anak yatim ini memberikan keberkahan kepada bisnis mereka. "Saat berdarah-darah pun, kami tetap menyantuni anak-anak yatim dan Alhamdulillah rezeki ada saja yang datang dari Allah SWT," tandas Jamsuri. (nan)

Beyonce Torehkan Sejarah di Grammy Awards

LOS ANGELES – Beyonce dan Taylor Swift menorehkan sejarah baru di ajang penghargaan bergengsi bagi insan musik dunia, Grammy Awards 2021. Di ajang yang digelar 14 Maret 2021 di AS, Beyonce berhasil membawa pulang empat penghargaan dan membuat total kemenangan kariernya menjadi 28, melampaui rekor Grammy sebelumnya untuk artis wanita yang dibuat oleh penyanyi bluegrass Alison Krauss.

Keempat penghargaan tersebut adalah *best R&B performance* untuk lagu *Black Parade*, *best rap song* dan *best rap performance* untuk *remix Savage* bersama Megan Thee Stallion, serta *best music video* untuk *Brown Skin Girl*, Saint JHN, dan WizKid. Pada ajang Grammy tahun ini, Beyonce didominasi untuk sembilan kategori.

Album Swift berjudul *Folklore*, yang direkam selama kebijakan *lock down*, dinobatkan sebagai album terbaik tahun ini. Penghargaan ini menjadikan penyanyi berusia 31 ini sebagai wanita pertama yang membawa pulang penghargaan tersebut sebanyak tiga kali.

Sedangkan penyanyi dan penulis lagu H.E.R melalui lagunya berjudul *I Can't Breathe* membawa pulang penghargaan lagu terbaik tahun ini atau *song of the year*. Lagu tersebut ditulis sebagai tanggapan atas protes Black Lives Matter yang menguncang Amerika Serikat musim panas lalu setelah polisi membunuh George Floyd.

Megan Thee Stallion, 26, yang dikenal karena mempromosikan pemberdayaan wanita, meraih penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru dan berbagi penghargaan dengan Beyonce dalam

single *Savage*.

Sedangkan Billie Eilish dengan lagu *Everything I Wanted* memenangkan penghargaan *record of the year*. Penyanyi berusia 19 tahun itu juga memenangkan penghargaan *best song written for visual media* untuk film James Bond mendatang *No Time to Die*. Penyanyi Inggris Dua Lipa memenangkan album vokal pop terbaik untuk *dance-y, Future Nostalgia*.

Band K-Pop BTS kalah di kategori *the best pop duo or group performance*. Mereka dikalahkan Lady Gaga dan Ariana Grande yang mengusung single *Rain on Me*. Padahal sebelumnya, band beranggota tujuh orang dari Korea Selatan itu berharap menjadi artis K-Pop pertama yang memenangkan Grammy setelah mereka berhasil masuk di Amerika Serikat untuk genre tersebut. (iin/Reuters)

Converse Indonesia Kampanye Bersihkan Udara Jakarta

JAKARTA – Converse Indonesia kembali melanjutkan Kampanye Bersihkan Udara melalui kegiatan *Converse City Forests*, berupa *street art* melukis mural. Kegiatan ini menggabungkan seni jalanan dengan kepedulian anak muda terhadap lingkungan.

Mengusung tema *Break Barriers-Racial Equality*, kegiatan mural ke dua kali ini dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yaitu di daerah Fatmawati (Jakarta Selatan) dan di Joglo (Jakarta Barat). Converse berkolaborasi dengan seniman lokal ternama Wormo dan Fivust, serta beberapa anggota All Stars.

Mural dengan desain unik bertulis "Berat Sama Dipukul, Ringan Sama Dijinjing", merupakan sebuah pesan kuat yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya anak muda. Pesannya mengenai keberagaman Indonesia serta kewajiban untuk bersatu dan bersama men-

jaga lingkungan hidup. Pesan ini begitu terasa maknanya bila melihat secara langsung karya seni mural tersebut di dua lokasi tersebut karena bila digabung akan menjadi satu karya utuh yang saling melengkapi.

Mural kali ini menggunakan bahan cat Graphenstone, yang memanfaatkan bahan dasar alami dengan kandungan nabati atau mineral seperti batu kapur, silikat, resin, pati, minyak biji rami, jeruk, dan lilin. Cat ekologis dan alami dari Graphenstone tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan, karena menggunakan 'bahan kimia lembut', *biodegradable*, dan ramah lingkungan.

"Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari proyek ini. Kita tidak hanya melukis seni yang indah, tetapi juga membantu membersihkan lingkungan dari polusi udara yang berbahaya," kata Wormo

dalam keterangan pers diterima Minggu (14/3).

Kampanye yang digagas pertama kali pada Desember 2020 ini adalah kolaborasi Converse Indonesia dengan dua orang seniman lokal ternama Olderplus dan Blesmokie di kegiatan *Kampanye Bersihkan Udara, Converse City Forests*. Di lokasi pertama, yaitu di tembok luar Institut Prancis Indonesia (IFI) yang berlokasi di Jalan M.H. Thamrin, tema lukisan mural yang diangkat adalah *Create Together for Tomorrow* berfokus pada kelestarian lingkungan hidup dengan tetap merepresentasikan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia.

Kampanye *City Forests* digagas di 14 kota di dunia, termasuk antara lain Jakarta (Indonesia), Sao Paulo (Brazil), Manila (Filipina), Bangkok (Thailand), Sydney (Australia), dan masih banyak kota lainnya. (iin)



Barang Sitaan Kasus Ekspor Benur

Petugas memperlihatkan uang pecahan seratus ribu rupiah barang sitaan kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/3/2021). KPK menyita uang tunai sekitar Rp 52,3 miliar dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.



Menko Polhukam Berkunjung ke Kejaksaan Agung

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD (kanan) bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) menyampaikan keterangan pers saat berkunjung ke gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/3/2021). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi.

Efek Samping Diet Ekstrem Harus Diwaspadai

Oleh Indah Handayani

► JAKARTA – Tidak dapat dimungkiri, diet ekstrem atau diet di bawah 800 kalori per hari memang dapat menurunkan berat badan. Namun, efek negatif diet ini lebih banyak sehingga harus diwaspadai.

Diet menurunkan berat badan seharusnya dilakukan dengan benar dan terpantau oleh ahlinya. Hal ini agar tidak mendatangkan efek samping yang bisa berbahaya. "Kegemukan atau kelebihan berat badan bisa diatasi dengan mengurangi asupan kalori setiap hari. Rata-rata orang normal membutuhkan asupan kalori sekitar 1.800-2.000 per hari. Orang yang melakukan diet dianjurkan mengurangi asupan kalori sekitar 500-1000 per hari. Artinya, setiap hari hanya mengonsumsi sekitar 1.000-1.500 kalori saja," ungkap Dokter spesialis gizi klinik Dr dr Samuel Oetoro MS SpGK(K) di sela Instagram Live Good Doctor Bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik (PDGKI), Minggu (14/3).

Menurut dr Samuel, pola diet seperti ini memang tidak bisa secara drastis mengurangi berat badan. Penurunan akan terjadi secara bertahap. Penurunan berat badan yang ideal adalah cukup turun 5-10% dari berat badan awal selama 6 bulan sampai satu tahun. Dengan penurunan sebesar itu, sudah mampu memperbaiki profil kesehatan secara umum dan menurunkan risiko berbagai penyakit.

dr. Samuel menambahkan, beberapa orang tidak sabar menanti turunnya berat badan, lantas memilih melakukan diet ekstrim. Salah satu metode diet yang rawan mendatangkan efek samping berbahaya adalah *very low calory diet* (VLCD). VLCD adalah diet dengan asupan kurang dari 800 kalori per hari, bahkan ada yang hanya 400-500 kalori per hari.

"Diet ekstrem kurang dari 800 kalori sehari tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa pengawasan ahli diet yang kompeten. Efeknya bisa berbahaya. Apalagi diet dengan hanya mengonsumsi 300-400 kalori per hari yang harus membutuhkan makanan khusus atau makanan pengganti yang disebut *meal replacement* karena kebutuhan nutrisi pelaku diet ini tidak akan terpenuhi dari makanan biasa," jelas dr. Samuel.

Konsultasi Ahli Gizi Klinik

Jika dilakukan tanpa pengawasan ahli, tambah dia, dalam hal ini dokter spesialis gizi klinik, diet sangat rendah kalori bisa mendatangkan komplikasi. Dapat berupa kekurangan vi-

tamin, mineral, dan kekurangan elektrolit. Saat ini berkonsultasi dengan dokter sangatlah mudah di era digital ini, hanya dalam satu klik terhubung dengan aplikasi kesehatan seperti aplikasi Good Doctor yang memiliki akses mudah tanya jawab dengan dokter spesialis gizi klinik.

"Klarifikasikan langsung kepada dokter untuk mendapatkan informasi tepat ketimbang mendengar atau membaca sesuatu yang 'trending' namun tidak benar," ujar dr. Samuel. Sementara itu, Dr. Arti Indira, MGz., SpGK., FINEM dari PDGKI menambahkan selain metode diet yang tepat, masyarakat juga perlu memperhatikan kandungan gizi dalam menu dietnya. Akhir-akhir ini marak terjadi salah persepsi tentang sayur dan serat, yang menurut aktris Tya Ariestya di bukunya, menghambat penurunan berat badan. Padahal, pernyataan tersebut sangat tidak benar. Serat yang terkandung dalam sayur dan buah adalah salah satu zat gizi yang harus dikonsumsi pelaku diet.

"Diet menurunkan berat badan yang benar itu harus mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi lengkap, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, dan termasuk serat yang didapat dari makan buah dan sayur," tegas Dr.Arti.

Dr Arti menambahkan sayur tidak akan menghambat penurunan berat badan atau menyebabkan kegemukan. Seluruh hal ini dokter spesialis gizi klinik, diet sangat rendah kalori bisa mendatangkan komplikasi. Dapat berupa kekurangan vi-

sehat dan optimal. Tidak bisa ada salah satu zat gizi tersebut dihilangkan. "Oleh karena itu, agar program penurunan berat badan berhasil, masyarakat harus lebih bijak menyaring informasi tentang diet yang beredar karena salah memilih program diet bisa fatal," jelasnya.

dr Feni Nugraha, MARS, M. Gizi, SpGK dari PDGKI menyarankan masyarakat untuk bertanya langsung ke dokter untuk mendapatkan pola diet yang sehat. Semua dokter, lanjutnya, pasti memiliki pengetahuan yang benar tentang diet penurunan berat badan. Melakukan diet tanpa pengawasan dokter boleh saja, namun bukan jenis diet ekstrim. "Jika ingin melakukan diet sendiri, jangan melakukan diet ekstrim. Jika ingin melakukan diet khusus, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis gizi. Diet khusus yang dimaksud adalah diet untuk penurunan berat badan dengan cepat dan diet pada orang dengan penyakit tertentu," paparnya.

Pada kesempatan sama, *Head of Medical Management* Good Doctor Dr. Adhiatma Gunawan mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang diet sehat menurunkan berat badan, melalui aplikasi layanan kesehatan terpadu Good Doctor, dengan berkonsultasi langsung ke dokter spesialis gizi klinik tanpa harus mengunjungi klinik atau rumah sakit. "Dalam aplikasi Good Doctor, pengguna dapat mendapatkan akses tanya jawab kepada ribuan mitra dokter, termasuk dokter spesialis gizi klinik dengan aman dan nyaman," tutup dr. Adhiatma.

Tiga Langkah Membangun Financially Fit

JAKARTA –Masih banyak anak muda yang belum bisa mengatur keuangan pribadi. Akhirnya tak sedikit yang kesulitan keuangan. Untuk itu, setidaknya ada tiga langkah besar yang harus dibenahi agar mencapai kondisi finansial yang fit atau disebut *financially fit*.

"Berdasarkan Survei Indeks Literasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, dengan indeks literasi 38,03% dari total populasi. Dengan demikian ada tiga permasalahan finansial yang perlu dibenahi agar menjadikan masyarakat yang *financially fit*, yaitu pengetahuan, kebiasaan, dan mindset," kata Ka Jit, Direktur Bank OCBC NISP.

"Kami menyadari bahwa membangun generasi *financially fit* diperlukan langkah besar, mulai dari meningkatkan pemahaman dasar finansial

(*knowledge*), memperbaiki kebiasaan manajemen keuangan yang salah (*behaviour*) dan meluruskan *mindset* terkait finansial yang keliru agar mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat (*attitude*)," ungkap Ka Jit di sela *virtual press conference Financial Fitness #TAYTB Show Special Edition*, Senin (15/3).

Menurut Ka Jit, pemahaman yang kurang terkait konsep dasar finansial menyebabkan banyak masyarakat mengambil keputusan finansial yang kurang tepat. Misalnya investasi mengikuti tren tanpa punya pemahaman dasar, pemahaman kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan dana darurat, proteksi atau investasi.

Kedua, kebiasaan manajemen finansial yang kurang tepat dan terbawa *lifestyle* kekinian. Misalnya tergoda ajakan diskon, membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan dengan cara kredit. Terakhir, *mindset*

keuangan yang kurang tepat, misalnya perencanaan keuangan itu cuma buat orang kaya, karena biaya konsultasinya itu mahal atau perencanaan keuangan itu sulit, bahkan menganggap pendapatannya tidak bisa disisihkan untuk tabungan atau investasi.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menghadirkan solusi Financial Fitness by Nyala OCBC NISP guna memberdayakan generasi Indonesia agar memiliki kondisi *financially fit*, menggeser *mindset* dari *getting rich* menjadi *getting fit*. Karena menjadi kaya (*rich*) itu relatif atau tidak bisa diukur, sedangkan kondisi seseorang yang memiliki kondisi *financially fit* itu ada pengukurannya, mulai dari tabungan, dana darurat, proteksi sampai dengan investasi. "Solusi finansial fitness ini lebih dari sekedar produk keuangan, ini merupakan solusi terintegrasi yang menghadirkan program

pendampingan mulai dari Nyala Financial Fitness Squad, Komunitas Ruang meNYALA, platform edukasi www.ruangmenyala.com dan Ruang meNYALA Financial Fitness Gym," paparnya.

Financial Fitness Director Nyala OCBC NISP Deddy Corbuzier menambahkan sangat mengapresiasi Bank OCBC NISP yang segera mengambil tindakan nyata dalam mendorong generasi Indonesia lebih melek keuangan dengan fokus kepada *getting fit before getting rich*. Bersama Financial Fitness Squad, ia pun mengajak generasi Indonesia sadar pentingnya menjadi *financially fit*. "Sama seperti program bugaran fisik, bugar secara finansial juga membutuhkan disiplin, komitmen dan persistensi dalam berujung mengubah cara kita mengelola keuangan yang didukung dengan latihan, *general check-up*, serta bimbingan dari *coach/trainer*," tutupnya. (iin)



Ikrar Setia

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (tengah) bersama anggota DPR fraksi Demokrat membacakan ikrar kesetiaan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Dalam pembacaan ikrar tersebut mereka tetap mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Jokowi Tegaskan Tak Ada Niat Jadi Presiden Tiga Periode

Oleh **Novy Lumanauw** dan **Imam Suhartadi**

▶ **JAKARTA** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan dirinya tak ada niat untuk menjadi presiden tiga periode. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode sehingga harus dipatuhi bersama.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamankan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/3).

Presiden Jokowi menegaskan dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut. "Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah," ujar Presiden Jokowi.

Menurutnya, di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru.

"Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," kata Presiden.

Juru Bicara Presiden, Fadjoel Rachman, juga mengatakan Presiden Jokowi setia dan memegang teguh ideologi Pancasila dan berjuang untuk melaksanakan sepenuhnya di masa jabatan beliau sejak 2014 hingga 2024 nanti.

Khususnya Pasal 7 yang merupakan *masterpiece* gerakan reformasi 1998, yang berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden

memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Serta Presiden Jokowi setia dan patuh pada Sumpah Presiden, bahwa, "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia..., memegang teguh Undang-Undang Dasar."

"Dengan demikian sangat tegas, bahwa Presiden Jokowi tegak lurus ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, khususnya masa jabatan Presiden 2 periode," kata Fadjoel.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD menegaskan tidak ada wacana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat 3 periode seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua MPR RI Amien Rais.

Menurut Mahfud, apa yang disampaikan Amien Rais terkait masa jabatan presiden merupakan urusan partai politik dan anggota DPR/MPR RI.

"Pemerintah tidak punya wacana tentang mau tiga kali, empat kali, lima kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja," kata Mahfud usai kunjungan kerja di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/3).

Ia memastikan tidak ada pembicaraan soal presiden tiga periode di tingkat kabinet, karena bukan bidangnya. "Itu urusan partai politik, mau mengubah, mau *endak*," kata Mahfud.



Joko Widodo

Tidak Ada Pembahasan

Di tempat terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan tidak ada pembahasan apapun di internalnya untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari 2 periode ke 3 periode. Pihaknya berpegang pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak ada niat soal ide tersebut.

"Tidak ada niat, baik niat dari dirinya pribadi maupun dari unsur kalangan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode," kata Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR, di Jakarta, Senin (15/3).

Dijelaskan Bamsoet, Indonesia berpegang pada ketentuan masa jabatan kepresidenan yang diatur dalam Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPRRI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945," tegas Bamsoet.

Dia menilai masa jabatan kepresidenan yang berlaku saat ini sudah dipertimbangkan matang. "Sama halnya seperti di Amerika Serikat maupun di negara demokratis lainnya yang membatasi masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode," ujarnya.

Menurut dia, pembatasan itu menghindarkan Indonesia dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Hal tersebut sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik.

Bamsoet mengingatkan agar masyarakat Indonesia waspada isu perpanjangan masa jabatan kepresidenan. (b1)

Kemenkes: Penggunaan Vaksin Astrazeneca Tunggu Izin BPOM

JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, penggunaan atau penyuntikan 1.113.600 dosis vaksin Astrazeneca dalam program vaksinasi nasional masih menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Menunggu informasi lanjut dari BPOM," kata Nadia kepada *Beritasatu.com*, Senin (15/3).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, sasaran penerimaan vaksinasi Astrazeneca yakni kelompok lansia dan petugas publik.

Nadia mengatakan, sejauh ini BPOM sudah mengkaji terkait keamanan dengan mengeluarkan izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA).

Sementara terkait dengan sejumlah reaksi pascapenyuntikan vaksin Astrazeneca, Nadia menegaskan, Badan Pengawas Obat Eropa (EMA) sudah mengeluarkan pernyataan jika reaksi tersebut tidak dipicu oleh vaksin Astrazeneca.

"BPOM Eropa/EMA sudah mengatakan, tidak ada hubungannya antara pembekuan darah dengan vaksin Astrazeneca. Kejadian ini hanya pada *batch-batch* tertentu dari AZ dan kita tentunya menunggu dari BPOM lebih lanjut tentang penggunaan dan juga kriteria penerima vaksin ini," ucapnya.

Stok Aman

Nadia memastikan stok vaksin Covid-19 untuk kelompok lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik aman.

"Vaksin Sinovac yang sudah

jadi kan tiga juta. Terus kita tahu ada Sinovac dalam bentuk bulk sebanyak 35 juta dosis. Jadi kurang lebih totalnya itu bisa untuk sekitar 33 juta dosis," ujarnya.

Nadia mengatakan stok dan distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia masih aman sehingga pemerintah meyakini program vaksinasi bisa berjalan lancar.

Target vaksin untuk masyarakat lansia telah dialokasikan sekitar 21,5 juta dosis. Kemudian, target vaksin untuk petugas pelayanan publik telah dialokasikan sekitar 16,9 juta dosis.

"Ini tentunya kalau kita lihat angka 33 juta pasti tidak cukup dong. Minimal kita butuh vaksinasinya itu adalah 70 juta. Jadi kita masih perlu datangkan vaksin lainnya pada Maret ini. Masih akan ada 20 juta dan ada vaksin dari AstraZeneca," katanya. (b1/ant)

Qodari: Demokrasi di Internal Demokrat Minim

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai ada tanda-tanda brutalitas politik dalam AD/ART Partai Demokrat (PD) 2020. AD/ART 2020 itu dinilai pertanda minimnya demokrasi di internal Partai Demokrat.

"Saya kira memang menarik AD/ART 2020 ini karena KLB misalnya itu bisa dilaksanakan atau setidaknya didukung 2/3 DPD, separtuh DPC, tetapi harus disetujui ketua majelis tinggi. Padahal dalam kongres majelis tinggi suaranya hanya 9, DPD 68, lalu DPC 514 kabupaten/kota. Jadi yang berkuasa itu sesungguhnya siapa? Apa pemilih suara atau mayoritas suara atau ketua majelis tinggi? Kalau pak Bambang Widjanto melihat ada brutalitas demokrasi atau fenomena yang namanya brutalitas demokrasi, jangan-jangan brutalitas demokrasi terjadi di dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020," ujar Qodari melalui keterangan pers, di Jakarta, Senin (15/3).

Qodari menilai ada perbedaan kekuasaan antara Ketua Umum Partai Demokrat

dengan ketua majelis tinggi di Partai Demokrat dalam AD/ART 2020 tersebut. Dia beranggapan ketua majelis tinggi justru memiliki kewenangan yang lebih tinggi.

"Lalu yang menariknya kongres memilih ketum seharusnya yang memiliki kekuasaan terbesar adalah ketum, karena katakana dia yang mendapat mandat dari peserta kongres, tapi kalau kita lihat penjabarannya, saya merasa wewenang majelis tinggi lebih banyak, lebih besar dan lebih strategis dari ketua umum. Menariknya ketua majelis tinggi tidak dipilih oleh kongres 2020 karena di AD/ART itu ditulis bahwa ketua majelis tinggi merupakan ketua umum periode 2015 dan 2020 yang kita ketahui adalah Pak SBY," ucapnya.

Atas dasar itulah, Qodari menyimpulkan AD/ART 2020 Partai Demokrat menunjukkan minimnya demokrasi di dalam internal Partai Demokrat.

"Jadi sebetulnya kalau bicara mengenai demokrasi ya, dan di dalam partai, maka saya melihat demokrasi di dalam

partai Demokrat sebagaimana tercermin AD/ART 2020 ini sangat minimal," pungkasnya.

Redupnya Pamor Cikeas

Qodari menilai, pamor Cikeas di mata pemilih Indonesia sudah di ambang senja. Hal itu tercermin dari tren suara partai Demokrat yang terus mengalami penurunan di setiap momentum politik di Indonesia.

"Agus Harimurti Yudhoyono, selaku trah politik Cikeas, ternyata tidak memiliki magnet elektoral untuk dapat menyulaukan kembali pamor Cikeas, terlebih Demokrat," kata Qodari.

Dia menilai, kepemimpinan AHY sangat lemah dan tak bisa diandalkan sebagai magnet elektoral.

AHY pun dinilai gagal memberikan citra positif Partai Demokrat. Hal itu karena AHY dianggap gagal memanfaatkan 2 momentum politik. Pertama, AHY gagal meraih kemenangan di Pilkada DKI Jakarta. Kedua, AHY juga tak punya daya awar alias 'tak laku' dalam bursa cawapres di Pilpres 2019 lalu. (b1)



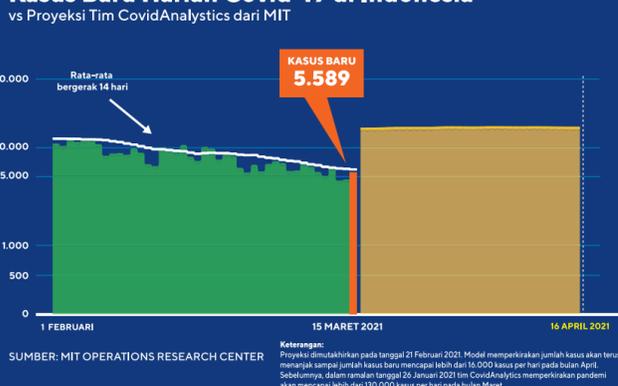
Raker Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H / 2021 M dan vaksinasi jamaah haji.

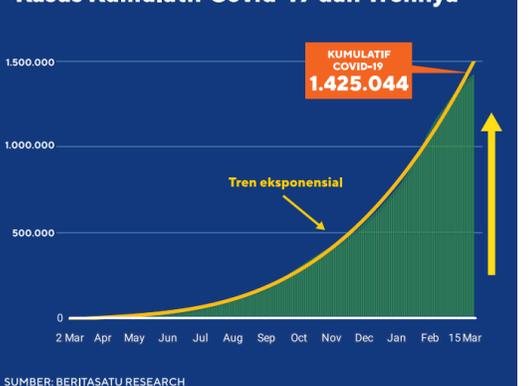
Data Kasus Baru Covid-19 dan Suspect Aktif Harian



Kasus Baru Harian Covid-19 di Indonesia



Kasus Kumulatif Covid-19 dan Trennya



INVESTOR DAILY

MARKETS & CORPORATE NEWS | 15

REKOMENDASI

Victoria Sekuritas

IHSG diperkirakan bergerak pada rentang 6.242-6.395 untuk perdagangan Selasa (16/3). Analisis merekomendasikan Buy BBNI (TP 6.525), AGRO (TP 1.330), HOKI (TP 278), SSMS (TP 1.135), dan ITMG (TP 12.200). Bursa Asia ditutup mixed cenderung menguat pada perdagangan awal pekan (15/3), diantaranya ASX 200 (+0,09%), HSI (+0,33%), KOSPI (-0,28%), Nikkei (+0,17%), dan SSEC (-0,96%). Biro Statistik Nasional Tiongkok mengumumkan produksi industri periode Januari dan Februari naik 35,1% YoY, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 7,3% YoY maupun konsensus sebesar 30% YoY.

Sementara penjualan ritel periode Januari dan Februari naik 33,8% YoY, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 4,6% YoY maupun konsensus sebesar 32% YoY (15/3). Selain itu, pergerakan bursa Asia dibayangi oleh kenaikan yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun ke level 1,64% yang merupakan level tertinggi sejak Februari 2020 (12/3). Sentimen serupa memacu IHSG bergerak fluktuatif dengan ditutup melemah sebesar (-0,53%) ke level 6.324,26 pada perdagangan awal pekan (15/3).

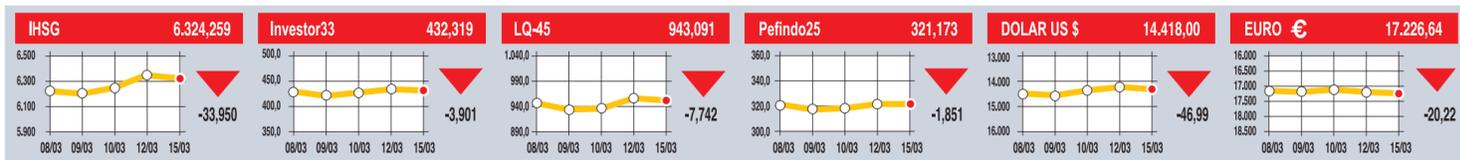
Phintraco Sekuritas

IHSG diperkirakan melemah ke kisaran 6.275-6.300 pada perdagangan Selasa (16/3). Secara teknikal, terdapat gap pada rentang 6.265-6.317 yang perlu diperhatikan pelaku pasar. Terlepas dari faktor teknikal, sikap *wait and see* jelang pengumuman hasil FOMC dan pidato Kepala the Fed, Jerome Powell pada Kamis (18/3) dini hari WIB. The Fed diperkirakan mempertahankan *interest rate* pada level 0,25% dalam FOMC tersebut. Sikap *wait and see* tersebut berpotensi memacu fluktuasi nilai tukar rupiah jelang pengumuman FOMC tersebut.

Dari dalam negeri, BPS mengumumkan surplus Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) sebesar US\$2,01 miliar di Februari 2021. Nilai ekspor tumbuh 8,56% yoy, sementara nilai impor tumbuh 11,86% yoy di Februari 2021. Mempertimbangkan sentimen-sentimen tersebut, pelaku pasar dapat mencermati saham-saham manufaktur, seperti SMGR, UNVR, ICBP, INDF dan KRAS di perdagangan Selasa (16/3). Saham lain yang dapat diperhatikan, diantaranya ADRO, BBNI, INCO, BMRI dan LSIP (16/3).

DISCLAIMER

Materi tulisan ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal.



Sumber: BEI & Stockwatch

Tunas Baru dan Gajah Tunggal Bersiap Rilis *Global Bond* US\$ 670 Juta

Oleh Farid Firdaus

► JAKARTA – PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) menyiapkan rencana penerbitan surat utang global (*global bond*) hingga US\$ 400 juta untuk membiayai kembali (*refinancing*) utang. Aksi serupa juga tengah dirancang oleh PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) dengan target nilai emisi sebesar US\$ 270 juta.

“Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan mencapai kuorum dan pemegang saham memberikan persetujuan atas rencana *global bond*,” kata Sekretaris Perusahaan Tunas Baru Lampung Hardy Phan kepada *Investor Daily*, Senin (15/3).

Hardy belum dapat mengungkapkan secara rinci jadwal penerbitan *global bond*. Berdasarkan prospektus, perseroan berniat membeli kembali *global bond* lama senilai US\$ 250 juta yang jatuh tempo 2023. Selain itu, perseroan berencana melunasi obligasi berkelanjutan I senilai Rp 1,5 triliun yang jatuh tempo 2023 dan 2025.

Perseroan menargetkan *global bond* tenor memiliki jangka waktu lima tahun. Sementara, indikasi tingkat suku bunga terbaik bagi perseroan dalam rentang 6%-8%. Kepastian mengenai tingkat suku bunga akan ditentukan saat *bookbuilding*. Hal ini dengan menimbang tingkat suku bunga di pasar yang merupakan

“Tunas Baru menargetkan *global bond* tenor memiliki jangka waktu lima tahun. Sementara, indikasi tingkat suku bunga terbaik bagi perseroan pada kisaran 6%-8%.”

beban bunga yang masih dapat mendukung kegiatan operasional perseroan. Emiten perkebunan kelapa sawit ini menilai strategi menerbitkan obligasi baru akan mem-

berikan manfaat terhadap kondisi keuangan, memperpanjang profil jatuh tempo utang perseroan, dan melaksanakan rencana sejalan dengan strategi bisnis yang disusun perseroan.

Lebih lanjut, manajemen juga mengharapkan likuiditas keuangan terjaga mengingat obligasi baru ini memiliki tenor yang lebih panjang daripada obligasi dan fasilitas kredit yang ada saat ini. “Meningkat tingkat suku bunga obligasi baru tetap dan pembayaran pokok obligasi tidak teramortisasi selama periode obligasi, diharapkan nantinya perseroan dapat lebih memaksimalkan penggunaan dana itu untuk meningkatkan pertumbuhan laba,” jelas manajemen.

Gajah Tunggal

Pada 15 Maret, Gajah Tunggal juga menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait persetujuan atas rencana penerbitan *global bond* US\$ 270 juta. Namun, perseroan belum memberikan pernyataan terkait hasil RUPSLB kepada *Investor Daily* hingga berita ini diturunkan.

Berdasarkan prospektus, perseroan menargetkan jatuh tempo *global bond* baru secepat-cepatnya pada 2026 atau jangka waktu lain yang ditentukan direksi perseroan. Sedangkan tingkat suku bunga akan diumumkan kemudian atau maksimal 9% bergantung kondisi pasar. Perseroan berniat menggunakan emisi obligasi untuk membiayai kembali *senior secured notes* US\$ 250 juta yang jatuh tempo pada 10 Agustus 2022.

Manajemen Gajah Tunggal menjelaskan, penerbitan surat utang baru akan membuat

posisi likuiditas perseroan lebih bagus, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mengingat surat utang baru akan memperpanjang jatuh tempo kewajiban perseroan dari jangka pendek menjadi jangka panjang.

Sebagai informasi, kewajiban *senior secure notes* US\$ 250 juta sebelumnya diterbitkan Gajah Tunggal pada 10 Agustus 2017, kemudian telah diubah berdasarkan *first supplemental indenture* 8 Januari 2019. Surat utang ini memiliki tingkat bunga 8,375%.

Tahun lalu, Gajah Tunggal membukukan laba bersih Rp 320,37 miliar, meningkat 19,05% dibandingkan 2019 sebesar Rp 269,1 miliar. Sedangkan penjualan turun 15,69% menjadi Rp 13,43 triliun pada 2020 dibandingkan 2019 sebesar Rp 15,93 triliun.

Lonjakan laba bersih tersebut didukung penurunan beban penjualan, umum dan administrasi, dan beban keuangan. Keuntungan juga ditopang oleh raihain keuntungan lain-lain bersih senilai Rp 102,74 miliar. Adapun dengan kas dan setara kas perseroan akhir 2020 melonjak dari Rp 635,18 miliar menjadi Rp 1,04 triliun. Sedangkan jumlah liabilitas perseroan turun dari Rp 12,62 triliun menjadi Rp 10,92 triliun.

Tahun ini, Gajah Tunggal mengalokasikan belanja modal (*capital expenditure/capex*) US\$ 30-40 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung kinerja perseroan. Belanja modal tersebut akan difokuskan untuk perawatan dan peremajaan mesin-mesin serta alat berat. Selain itu, *capex* juga digunakan untuk pelunasan akuisisi tanah PT Softex Indonesia.

Laba Bersih Antam Melesat 492%

JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam membukukan lonjakan laba bersih sebesar 492% menjadi Rp 1,14 triliun pada 2020 dibandingkan 2019 yang sebesar Rp 193,85 miliar. Sedangkan penjualan perseroan tahun lalu turun 16,33% menjadi Rp 27,37 triliun dibandingkan 2019 yang senilai Rp 32,71 triliun.

Peningkatan laba bersih tersebut didukung oleh penurunan beban pokok penjualan menjadi Rp 22,89 triliun atau turun 19,01% dari sebelumnya Rp 28,27 triliun. Alhasil, laba kotor perseroan sebesar Rp 4,47 triliun atau naik 0,64% dari sebelumnya Rp 4,44 triliun.

Jumlah beban usaha perseroan sepanjang tahun 2020 juga turun 30,01% menjadi Rp 2,44 triliun dibandingkan periode 31 Desember 2019 yang mencatatkan sejumlah Rp 3,49 triliun. Raihain ini diperoleh dari beban umum

dan administrasi sebesar Rp 1,91 triliun serta beban penjualan dan pemasaran sejumlah Rp 533,06 miliar pada akhir tahun 2020.

Lebih lanjut, laba usaha perseroan sebesar Rp 2,03 triliun atau naik 112% dari akhir tahun 2019 yang mencatatkan sejumlah Rp 955,61 miliar. Sementara, laba sebelum pajak penghasilan dicatatkan sebesar Rp 1,64 triliun atau naik 138% dari sebelumnya Rp 687,03 miliar.

Hingga 31 Desember 2020, total aset perseroan mencapai Rp 31,72 triliun, naik 5,08% dari 31 Desember 2019 yakni Rp 30,19 triliun. Liabilitas sebesar Rp 12,69 triliun, naik 5,21% dari sebelumnya Rp 12,06 triliun dan total ekuitas naik 4,99% menjadi Rp 19,03 triliun dari sebelumnya Rp 18,13 triliun.

Di sisi lain, perseroan memproyeksikan kinerja produksi maupun komoditas tumbuh positif pada 2021. Untuk jenis produk feronikel,

pihaknya menargetkan volume produksi dan penjualan mencapai 26.000 ton nikel (TNI). Jumlah ini relatif stabil apabila dibandingkan dengan capaian produksi dan penjualan pada tahun 2020 lalu yakni masing-masing sebesar 25.970 TNI dan 26.163 TNI.

“Target produksi tersebut sejalan dengan optimalisasi yang perseroan lakukan pada produksi feronikel Pomalaa di pabrik yang berlokasi di Sulawesi Tenggara,” jelas Sekretaris Perusahaan Antam Kunto Hendrapawoko dalam keterangan resmi.

Untuk komoditas bijih nikel, Antam menargetkan total produksi mencapai 8,44 juta *wet metric ton* (WMT). Peningkatan ini nantinya akan digunakan oleh perseroan sebagai bahan baku pabrik feronikel dan juga mendukung penjualan kepada pelanggan domestik.

Adapun, pihaknya menargetkan komoditas bijih nikel pada tahun ini dapat terjual sebanyak 6,71 wmt, atau naik 104% dibandingkan penjualan di tahun 2020 yaitu 3,30 juta wmt (*unaudited*). Membayukannya *outlook* pertumbuhan industri pengolahan nikel dalam negeri menjadi sebab perseroan meningkatkan target penjualan.

Kemudian, pada komoditas ketiga yakni emas, Antam memproyeksikan produksi mencapai 1,37 ton emas yang akan dikontribusi dari tambang emas Pongkor dan Cibaliung yaitu 18 ton. Untuk memuluskan rencana itu, perseroan berfokus pada pengembangan basis pelanggan logam mulia di pasar dalam negeri.

“Target tersebut meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi pada emas dan pertumbuhan permintaan emas di pasar domestik yang terus naik,” ujarnya. (bil)

PT BURSA EFEK INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Lantai 6, Jl Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN				
TANGGAL 31 DESEMBER 2020					UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020					UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020				
(Disajikan dalam Rupiah)					(Disajikan dalam Rupiah)					(Disajikan dalam Rupiah)				
ASET	31 Desember 2020	31 Desember 2019	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2020	31 Desember 2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK			PENDAPATAN				ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Kas dan setara kas	1.562.518.995.801	1.599.732.306.768	Liabilitas jangka pendek	2.664.593.962.200	2.020.086.755.800	Pendapatan Usaha Terkait Transaksi Bursa				Penerimaan kas dari pelanggan	1.434.156.340.154			
Investasi	1.025.717.792.654	1.338.859.346.816	Utang penyelesaian transaksi efek	227.270.297.126	9.917.917.394	Jasa transaksi efek	792.359.113.699	789.885.104.366		Pembayaran kas kepada:				
Plutang penyelesaian transaksi efek	2.664.993.962.200	2.020.086.755.800	Utang jasa transaksi	446.100.324.905	208.327.257.354	Jasa kliring	400.444.254.306	398.286.387.498		Pemaskok	(401.243.283.863)			
Plutang usaha, neto	862.995.817.242	395.404.459.137	Utang pajak	152.681.170.305	96.545.846.851	Jasa percatatan	208.516.715.694	205.038.027.174		Karyawan	(441.100.898.341)			
Plutang lain-lain, neto	32.360.338.543	38.587.558.453	Utang lain-lain	7.668.931.442	28.027.633.106	Jasa informasi dan fasilitas lainnya	144.883.689.395	93.845.362.758		Pendanaan biaya tahunan OJK	(222.999.852.131)			
Pajak dibayar dimuka	11.091.874.136	7.815.532.740	Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	3.156.875.329	-	Jumlah Pendapatan Usaha Terkait Transaksi Bursa	1.546.203.771.094	1.487.054.881.796		Pendanaan penyelesaian transaksi marjin	(107.524.714.009)			
Utang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian lancar	29.126.247.844	37.868.373.811	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.524.117.811.599	2.572.869.131.793	Pendapatan Usaha dari Bukan Transaksi Bursa				Pembayaran pajak penghasilan	(83.679.525.874)			
Jumlah Aset Lancar	6.788.405.028.420	5.486.354.333.525	LIABILITAS JANGKA PANJANG			Pendapatan teknologi informasi	32.926.686.494	24.683.127.201		Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	157.608.065.936			
			Liabilitas dana pengaman	1.104.267.618	1.070.293.036	Pendapatan jasa riset, edukasi, dan data harga pasar	23.594.581.932	24.229.521.502						
ASET TIDAK LANCAR			Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	82.479.414.304	5.000.000.000	Pendapatan sertifikasi	8.900.263.225	14.459.473.827		ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Dana cadangan ganti rugi pemodal	160.789.932.000	157.169.300.000	Utang kepada pihak berelasi	50.000.000.000	-	Lainnya	12.078.651.053	5.676.996.691		Pendapatan hasil rekasa dana	14.370.741.560			
Ases dana pengaman	1.104.267.618	1.070.293.036	Liabilitas imbalan kerja	120.995.134.570	130.311.890.685	Jumlah Pendapatan Usaha dari Bukan Transaksi Bursa	77.500.182.704	69.049.119.221		Pendapatan dividen	4.209.140.000			
Dana disisihkan sebagai cadangan jaminan	158.371.226.642	153.154.830.453	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	204.578.816.492	181.382.183.721	Pendapatan investasi				Pelepasan investasi	2.606.481.292.879			
Plutang lain-lain	50.866.564.145	55.101.130.356	JUMLAH LIABILITAS	3.728.696.628.091	2.754.251.315.514	Pendapatan (keuntungan) Amortisasi aset baik guna	795.067.606	(5.408.819.923)		Pembelian investasi	(2.810.891.084.769)			
Investasi pada entitas asosiasi	879.472.377.972	776.264.685.415	EKUITAS			Bagian laba bersih entitas asosiasi	85.456.699.629	117.633.053.132		Penambahan investasi pada entitas asosiasi	(13.000.000.000)			
Utang muka dan biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian lancar	88.609.289	5.406.194.972	Liabilitas dana pengaman	16.875.000.000	16.875.000.000	Penghasilan bersih entitas asosiasi	9.142.550.659	11.181.939.123		Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	(47.502.810.246)			
Aset pajak tangguhan, neto	37.651.110.906	498.470.684.085	Modal dasar - 200 saham	6.215.000.000	6.215.000.000	Penghasilan lain-lain	21.573.270.535	18.761.676.811		Penerimaan bunga dan pendapatan lainnya	134.936.818.215			
Aset tetap, neto	576.110.125.779	498.470.684.085	Modal ditempatkan dan disetor - 125 saham	16.875.000.000	16.875.000.000	Jumlah Pendapatan	1.923.500.426.324	1.911.676.904.758		Kontribusi cadangan jaminan	(5.216.396.189)			
Ases hak guna, neto	120.816.718.490	-	Tambahan modal disetor	6.215.000.000	6.215.000.000	LABA BERSIH TAHUN BERJALAN				Perolehan saham	(127.061.882.205)			
Goodwill	27.286.704.986	-	Saham diperoleh kembali	(2.700.000.000)	(2.565.000.000)	BEBAN				Penerimaan dari penjualan aset tetap	44.205.000			
Aset lain-lain	37.590.143.485	13.817.178.449	Penghasilan komprehensif lain	4.693.204.504.481	4.186.693.548.045	Gaji dan tunjangan	569.803.616.436	573.568.932.992		Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(243.629.975.755)			
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.050.147.781.312	1.715.384.898.385	Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	4.768.674.058.975	4.235.678.641.142	Beban kontribusi tahunan ke OJK	231.930.565.664	223.058.232.268						
JUMLAH ASET	8.838.552.809.732	7.201.739.231.910	Keuntungan non-pengendalian	341.182.122.666	211.609.275.254	Penyusutan aset tetap	92.596.826.251	74.906.787.881		ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
			Jumlah Ekuitas	5.109.856.181.641	4.447.487.916.396	Pajak penghasilan	72.407.195.478	161.134.527.120		Pembayaran liabilitas sewa	(29.944.041.148)			
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.838.552.809.732	7.201.739.231.910	Sub-jumlah	43.921.219.711	120.639.769.500		Perolehan kembali saham	(135.000.000)			
						LABA BERSIH TAHUN BERJALAN				Setoran modal non-pengendalian kepada entitas anak	78.888.000.000			
						PENGHASILAN KOMPRESHENSIF LAIN				Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	48.808.598.852			
						Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					82.980.231.000			
						Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	24.105.663.348	(2.900.455.765)		KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(37.213.310.967)			
						Sub-jumlah	18.812.367.024	(2.343.086.609)		KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.599.732.306.768			
						Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.562.518.995.801			
						Keuntungan belum terealisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	39.898.896.602			1.599.732.306.768			
						Keuntungan belum terealisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tangguhan								
						Sub-jumlah	28.039.478.223	39.898.896.602						
						JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESHENSIF TAHUN BERJALAN	534.262.297.255	482.703.073.614						
						LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
						Pemilik Entitas Induk	489.380.972.390	449.314.003.293						
						Keuntungan non-pengendalian	(1.970.520.382)	(4.166.739.672)						
						Laba bersih tahun berjalan	487.410.452.008	445.147.263.621						
						JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:								
						Pemilik Entitas Induk	534.523.060.285	481.616.121.291						
						Keuntungan non-pengendalian	(260.763.030)	1.086.952.323						
						Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	534.262.297.255	482.703.073.614						
						LABA PER SAHAM DASAR	4.616.801.626	4.160.314.845						

Jakarta, 16 Maret 2021

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Timah Siapkan Strategi untuk Bayar Utang Rp 4,56 Triliun

Oleh Farid Firdaus

▶ JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) berkomitmen melunasi utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan senilai Rp 4,56 triliun. Adapun sebagai salah satu strategi melunasi utang tersebut, perseroan terus menjajaki *shareholder loan* senilai US\$ 100 juta kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Hingga akhir 2020, Timah memiliki total liabilitas Rp 9,57 triliun, turun 36,62% dibandingkan akhir 2019 sebesar Rp 15,1 triliun. Total pinjaman yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan terdiri atas pinjaman bank

jangka pendek senilai Rp 3,8 triliun dan liabilitas *supplier financing* senilai Rp 759,02 miliar.

Adapun kas dan setara kas Timah tercatat hanya Rp 807,30 miliar pada akhir 2020, turun 49,52% dibandingkan

2019 sebesar Rp 1,59 triliun. Di sisi lain, perseroan mampu memangkas beban keuangan 22,3% menjadi Rp 607,37 miliar pada tahun lalu dibanding tahun sebelumnya Rp 781,99 miliar.

Investor Relation Timah Listi Witani mengatakan, strategi pelunasan utang perseroan akan bersumber dari pendapatan timah, yakni mengubah *inventory* menjadi logam, sehingga bisa dijual dan menghasilkan *cash* untuk pelunasan utang. Selanjutnya, sumber dana juga dicari dari restitusi pajak. Tak lupa, perseroan melanjutkan upaya-upaya efisiensi.

"Timah tentunya memiliki komitmen untuk melunasi utang jatuh tempo, tapi kita lihat ke depannya, tergantung dari pendapatan. Pinjaman baru dari bank tidak ada, sementara yang dengan MIND ID masih proses," jelas dia kepada *Investor Daily*, Senin (15/3).

Selengkapnya, Direktur Keuangan Timah Wibisono mengatakan, pihaknya mengusulkan *shareholder*

loan senilai US\$ 100 juta dengan target bunga di bawah 2,5% dan tenor pinjaman sekitar 1 tahun dengan periode yang dapat diperbaharui. Penjakatan pinjaman tersebut telah diusulkan sejak kuartal IV-2020.

Pinjaman bakal dimanfaatkan untuk mengganti sebagian utang kredit modal kerja berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) menjadi *shareholder loan*. Langkah ini dinilai sebagai strategi *natural hedge*. Sehingga ketika ada gejolak yang tinggi pada nilai tukar, maka imbasnya diharapkan tidak begitu besar ke posisi laba dan rugi.

Selama 2020, pandemi Covid-19 yang memicu penurunan harga komoditas membuat pendapatan Timah turun 21,33% menjadi Rp 15,21 triliun, dibanding 2019 sebesar Rp 19,34 triliun. Namun, perseroan berhasil mengurangi rugi bersih 44,28% menjadi Rp 340,59 miliar, dari sebelumnya Rp 611,28 miliar.

Ekspansi

Selengkapnya, Direktur Utama Timah

Mochtar Riza Pahlevi optimistis, pembangunan *Top Submerged Lance* (TSL) *Ausmelt Furnace* bisa rampung akhir 2021, dan akan dilakukan *commissioning* pada awal 2022. Per Maret 2021, proses pembangunan TSL *Ausmelt Furnace* telah mencapai 44%. Progress ini melebihi target awal yang direncanakan yakni 40%.

Seperti diketahui, pengerjaan proyek TSL *Ausmelt Furnace* yang melibatkan PT Wijaya Karya Tbk (WIKI) Tbk dan Outotec Pty Ltd ini, dibangun di kawasan Unit Metalurgi Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. "Progres proyek TSL *Ausmelt Furnace* sudah 44% sampai dengan Februari, ini melebihi dari rencana 40%. Melihat kondisi ini, kita optimistis *commissioning* bisa dilaksanakan pada bulan Januari 2022," kata Riza dalam keterangan resmi, baru-baru ini.

Berdasarkan rencana awal, kata Riza, proyek *smelter* ini ditargetkan selesai pada Januari 2022. Namun, melihat

progres di lapangan, pihaknya optimistis, proyek senilai Rp 1,2 triliun ini bisa rampung akhir tahun 2021. "Kalau berdasarkan kontrak, proyek bersama Wika ini berlangsung selama 24 bulan, yang dimulai Januari 2020. Namun, sesuai dengan progres ini, kami optimistis di Desember 2021 bisa selesai," tambah dia.

Sembari menyiapkan infrastruktur, menurut Riza, perseroan juga mulai mengumpulkan sumber daya manusia andal yang akan dilatih selama satu tahun untuk mengoperasikan TSL *Ausmelt Furnace*. Teknologi TSL ini merupakan babak baru transformasi teknologi dalam pengolahan timah. Penggunaan teknologi *ausmelt* diyakini dapat menekan biaya produksi.

TSL tersebut dinilai memiliki banyak keunggulan, di antaranya efisiensi biaya pokok produksi, proses peleburan leleh baik dan waktu lebih singkat sehingga kapasitas lebih tinggi, kemudahan dalam pengoperasian, dan teknologi TSL *Ausmelt* lebih ramah lingkungan.



PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190, Indonesia



LAPORAN POSISI KEUANGAN			
TANGGAL 31 DESEMBER 2020			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	1.222.239.208.936	1.010.649.823.184	
Kas yang dibatasi penggunaannya	51.528.391.110	40.979.436.431	
Investasi	681.186.412.714	654.182.148.692	
Piutang usaha	50.939.357.615	38.632.960.219	
Piutang lain-lain - bagian lancar	16.815.570.186	9.978.858.457	
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian lancar	5.074.247.944	7.303.393.104	
Total Aset Lancar	2.027.783.188.505	1.761.726.620.087	
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi di saham	287.198.823.540	217.609.797.480	
Aset tetap	243.669.276.483	254.423.696.798	
Aset hak - guna	16.913.342.055	-	
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian lancar	537.361.110	1.325.694.443	
Uang jaminan	852.503.368	852.265.150	
Piutang lain-lain - setelah dikurangi bagian lancar	1.050.351.451	786.317.475	
Piutang dari pihak berelasi	-	50.000.000.000	
Uang muka setoran modal	3.333.000.000	-	
Total Aset Tidak Lancar	553.554.658.017	524.997.717.346	
TOTAL ASET	2.581.337.846.522	2.286.724.391.433	
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	26.493.594.529	21.768.944.379	
Utang pajak	67.663.548.279	47.091.010.435	
Utang lain-lain	36.747.078.094	36.028.159.251	
Beban akrual	5.289.473.687	5.497.807.020	
Pendapatan diterima dimuka - bagian jangka pendek	4.758.923.292	-	
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	-	-	
Total Liabilitas Jangka Pendek	140.952.617.881	110.385.921.085	
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - neto	4.855.199.144	1.306.723.906	
Liabilitas imbalan kerja	37.116.507.000	38.998.397.000	
Pendapatan diterima dimuka - bagian jangka panjang	405.263.152	552.631.578	
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	8.944.497.452	-	
Total Liabilitas Jangka Panjang	51.321.466.748	40.857.752.484	
Total Liabilitas	192.274.084.629	151.243.673.569	
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp5 juta per saham	-	-	
Modal dasar - 12.000 saham	30.000.000.000	30.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor - 6.000 saham	3.254.699.418	3.254.699.418	
Agio saham	35.518.424.127	13.083.366.485	
Penghasilan komprehensif lain	2.320.290.638.348	2.089.142.651.961	
Saldo laba	-	-	
Total Ekuitas	2.389.063.761.893	2.135.480.717.864	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.581.337.846.522	2.286.724.391.433	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL					
31 DESEMBER 2020					
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
	Modal saham	Agio saham	Penghasilan (rugi) Komprehensif lain	Saldo laba	Jumlah ekuitas
Saldo per 31 Desember 2018	30.000.000.000	3.254.699.418	(4.091.710.550)	1.819.261.821.760	1.848.424.810.628
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	271.093.766.201	271.093.766.201
Penghasilan komprehensif lain:	-	-	-	(1.212.936.000)	(1.212.936.000)
Pengkuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	-	-	-	17.175.077.035	17.175.077.035
Keuntungan belum terealisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2019	30.000.000.000	3.254.699.418	13.083.366.485	2.089.142.651.961	2.135.480.717.864
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	227.721.150.767	227.721.150.767
Penghasilan komprehensif lain:	-	-	-	3.426.835.620	3.426.835.620
Pengkuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	-	-	-	22.435.057.642	22.435.057.642
Keuntungan belum terealisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2020	30.000.000.000	3.254.699.418	35.518.424.127	2.320.290.638.348	2.389.063.761.893

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN			
KOMPRESIF LAIN			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL			
31 DESEMBER 2020			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
PENDAPATAN			
Pendapatan usaha	425.548.517.741	467.538.515.015	
Pendapatan investasi	184.328.560.748	248.218.135.970	
Keuntungan atas bank pembiayaan dan bank administrasi rekening dana nasabah	10.918.201.757	8.482.894.740	
Keuntungan atas selisih kurs bersih	143.464.708	-	
Lainnya - bersih	32.505.340.717	14.863.853.343	
Total Pendapatan	653.444.085.671	739.103.399.068	
BEBAN			
Beban Usaha			
Saji, honor dan tunjangan	127.628.452.354	123.675.903.599	
luran tahunan OJK	63.832.277.661	70.130.777.252	
Penyusutan	54.257.042.908	49.075.018.705	
Pemeliharaan dan perbaikan	40.368.394.927	35.605.273.037	
Umum dan administrasi	28.249.340.965	50.874.257.388	
Pengembangan usaha dan pasar modal	25.842.412.666	48.517.549.178	
Beban konsultan	12.206.316.013	7.213.681.723	
Amortisasi aset hak guna	9.148.706.009	-	
Total Beban Usaha	361.530.943.503	385.092.460.892	
Beban lain - lain			
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	2.121.208.659	4.166.739.199	
Kerugian atas selisih kurs - bersih	557.399.018	1.089.203.203	
Lainnya - bersih	2.678.607.677	5.255.942.393	
Total Beban	364.209.551.180	390.348.403.285	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	289.234.534.491	348.754.995.783	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	289.234.534.491	348.754.995.783	
Beban Pajak Final	32.410.773.946	44.916.047.988	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	256.823.760.545	303.838.947.795	
Beban Pajak Penghasilan	29.102.608.778	32.745.181.594	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	227.721.150.767	271.093.766.201	
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4.393.379.000	(1.617.248.000)	
Pengkuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti	(966.543.380)	404.312.000	
Pajak penghasilan terkait	3.426.835.620	(1.212.936.000)	
Total Penghasilan Komprehensif Lain	22.435.057.642	17.175.077.035	
Total Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	25.861.893.262	15.962.141.035	
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	253.583.044.029	287.055.907.236	

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Bagian rugi bersih entitas asosiasi Kerugian atas selisih kurs - bersih Lainnya - bersih

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Keuntungan bersih dari perubahan nilai wajar atas aset yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Keuntungan bersih dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual

TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN

Catatan:
1. Informasi keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di atas, diambil dari Laporan Keuangan 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), yang dalam laporannya tanggal 8 Maret 2021 menyatakan opini audit tanpa modifikasi.
2. Informasi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut di atas, diambil dari laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), yang dalam laporannya tanggal 6 Maret 2020 menyatakan opini audit tanpa modifikasi.
Beberapa akun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 di atas telah direklasifikasi sehingga sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Kurs per 31 Desember 2020 1 US\$ = Rp14,105, dan per 31 Desember 2019 1 US\$ = Rp13,901.

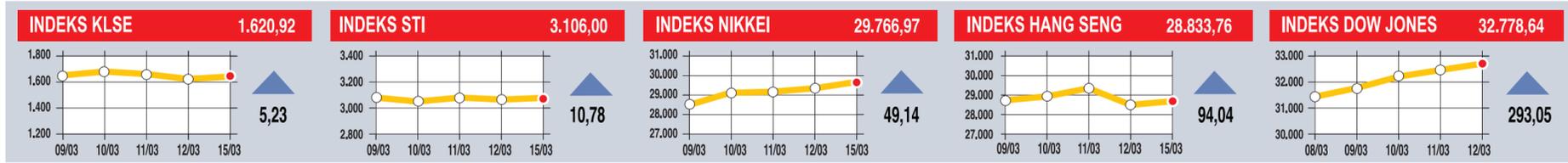
LAPORAN ARUS KAS			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL			
31 DESEMBER 2020			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari jasa kustodian sentral	320.865.364.649	323.391.575.090	
Penerimaan dari penyelesaian transaksi bursa	117.146.653.022	130.765.764.618	
Penerimaan dari jasa S-invest	11.506.424.945	14.039.245.747	
Pembayaran untuk beban usaha dan aktivitas operasi lainnya	(105.151.848.438)	(186.042.401.062)	
Pembayaran gaji, honor dan tunjangan	(128.425.165.956)	(118.254.475.599)	
Pembayaran pajak penghasilan	(4.981.596.696)	(28.407.265.477)	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	212.959.813.526	135.492.443.317	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan dari pendapatan bunga	139.051.001.611	188.239.165.476	
(Penurunan) kenaikan uang jaminan	(238.218)	(182.016.295)	
(Penurunan) kenaikan kas yang dibatasi penggunaannya	(10.548.954.679)	(11.314.577.125)	
Pembayaran atas perolehan aset tetap	(29.564.972.466)	(24.940.490.819)	
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	(73.333.000.000)	(83.250.000.000)	
Hasil penjualan aset tetap	30.000.000	142.000.000	
(Akuisisi) pelepasan aset keuangan - investasi	(27.004.264.022)	(69.067.904.157)	
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.370.427.774)	(273.822.920)	
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	211.589.385.752	135.218.620.397	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.010.649.823.184	875.431.202.787	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.222.239.208.936	1.010.649.823.184	

Jakarta, 16 Maret 2021
Direksi PT KSEI

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
TANGGAL 31 DESEMBER 2020			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	718.328.379.165	619.541.301.082	
Investasi	287.191.970.525	294.089.169.965	
Piutang penyelesaian transaksi efek	2.664.593.962.200	2.020.086.755.800	
Piutang usaha	95.186.555.280	59.396.411.816	
Piutang lain-lain	3.944.165.772	5.539.726.061	
Uang muka dan biaya dibayar di muka	11.413.865.436	18.161.194.613	
Total Aset Lancar	3.760.658.898.378	3.016.814.559.337	
ASET TIDAK LANCAR			
Dana pengamanan	1.104.267.618	1.070.293.036	
Dana disisihkan sebagai cadangan jaminan	158.371.226.642	153.154.830.453	
Investasi di saham	315.858.803.490	243.269.777.430	
Aset tetap	132.609.868.330	117.319.666.055	
Aset hak - guna	32.856.125.428	-	
Aset pajak tangguhan - neto	5.657.527.787	5.266.577.376	
Piutang lain-lain	1.665.379.533	2.901.899.960	
Uang muka setoran modal	3.333.000.000	-	
Piutang dari pihak berelasi	6.671.564.961	50.000.000.000	
Aset lain-lain	-	6.494.944.474</	



Panen Laba Lonsum Belum Berakhir

Oleh Parluhutan Situmorang

PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) atau Lonsum berhasil mencetak pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan pada 2020 hingga melampaui estimasi sejumlah analis. Pertumbuhan tersebut diperkirakan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu mendorong para analis mempertahankan rekomendasi beli saham emiten perkebunan Grup Salim ini.



Benny Tjoeng

Presiden Direktur PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum)

Diangkat menjadi presiden direktur Lonsum berdasarkan hasil keputusan RUPST tahun 2009 dan diangkat kembali menjadi presiden direktur berdasarkan RUPST tahun 2010, 2013, 2016, dan 2019. Benny memulai karier sebagai *senior auditor* di SGV Prasetyo Utomo Co (1984-1989), kemudian bergabung dengan PT United Tractors Tbk (UNTR) sebagai kepala departemen akuntansi (1990-1993), dan kepala divisi akuntansi dan anggaran PT Astra International Tbk (ASII) (1993-1996).

Benny juga pernah menjabat sebagai direktur PT Astra Graphia Tbk (ASGR) (1996-1997), direktur PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), dan memangku berbagai jabatan komisaris di beberapa anak perusahaan Astra Agro (1996-2000). Benny pun pernah diangkat menjadi wakil presiden direktur Astra Agro (2000-2005) dan presiden direktur PT Astra Sedaya Finance (2005-2008).

Benny Tjoeng lulus sarjana akuntansi di Akademi Akuntansi Jayabaya dan meraih gelar sarjana ekonomi jurusan manajemen keuangan di Universitas Indonesia. Tahun 2017, dia berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan, *workshop* dan seminar, termasuk "New Business Models, Evolving Business Models and Strategy in the Years Ahead" pada Desember 2017.



Analisis BRI Danareksa Sekuritas Andreas Kenny mengungkapkan, berlanjutnya pertumbuhan kinerja Lonsum tahun ini bakal ditopang oleh rata-rata harga jual minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) yang diprediksi naik dan peningkatan volume penjualan komoditas tersebut.

"Kami merevisi naik proyeksi rata-rata harga jual CPO dari 2.900 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.200 ringgit Malaysia per ton atau setara dengan Rp 9.000 per kilogram (kg). Hal tersebut diharapkan membuat laba bersih perseroan kembali melonjak dengan target Rp 784 miliar pada 2021," tulis Andreas dalam risetnya.

Sebab itu, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham LSIP dengan target harga direvisi naik dari Rp 1.750 menjadi Rp 1.850. Target harga tersebut telah mempertimbangkan peningkatan kinerja keuangan perseroan tahun ini.

Adapun laba bersih Lonsum tahun ini diperkirakan melonjak menjadi Rp 784 miliar dibandingkan realisasi tahun

lalu Rp 696 miliar. Perkiraan laba bersih 2021 itu direvisi naik dari perkiraan semula Rp 460 miliar. Pendapatan perseroan juga diharapkan meningkat menjadi Rp 4,03 triliun pada 2021 dibandingkan perolehan tahun 2020 senilai Rp 3,53 triliun. Target tersebut pun direvisi naik dari semula Rp 3,73 triliun.

Sedangkan target volume penjualan CPO perseroan pada 2021 direvisi turun dari 362 ribu ton menjadi 353 ribu ton. Namun, volume penjualan kernel direvisi naik 3,1% dari 99 ribu ton menjadi 102 ribu ton. Perkiraan penjualan karet dipertahankan sebanyak 8.000 ton.

Tahun lalu, Lonsum membukukan lonjakan laba bersih sebesar 174,1% menjadi Rp 696 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp 254 miliar. Sedangkan pendapatan turun 4,4% menjadi Rp 3,53 triliun dari Rp 3,69 triliun. Lonjakan laba bersih sejalan dengan peningkatan laba operasional hingga 303,1% menjadi Rp 810,1 miliar dari Rp 201 miliar.

"Realisasi laba bersih tersebut telah melampaui estimasi BRI Danareksa Sekuritas atau

merefleksikan 162% dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020. Realisasi itu juga 174,1% dari konsensus analis," jelas Andreas.

Menurut dia, lonjakan laba bersih ditopang oleh peningkatan rata-rata harga jual CPO berkisar 25,7% menjadi Rp 8.563 per kg pada tahun lalu. Kenaikan harga jual tersebut mampu mengkompensasi penurunan volume penjualan CPO perseroan yang sebesar 22,2% pada 2020.

Kenaikan harga jual berdampak pada peningkatan margin keuntungan kotor (*gross margin*) dari 15,2% menjadi 30,4%. Begitu juga dengan margin keuntungan bersih (*net margin*) melambung dari 6,9% menjadi 19,7%. Hal itu membuat laba bersih perseroan melonjak pada 2020.

Pandangan senada diungkapkan oleh analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Andy Wibowo Gunawan. Menurut dia, realisasi kinerja keuangan Lonsum sepanjang 2020 telah melampaui perkiraan. Lonjakan laba bersih didukung oleh penurunan beban pokok penjualan (COGS), seiring dengan penurunan biaya produksi.



Prospek LSIP
BRI Danareksa Sekuritas

Rekomendasi	: Buy
Target Harga	: Rp 1.850
Harga Terakhir	: Rp 1.505
Potensi Gain	: 22,9%

"Perolehan pendapatan perseroan tahun lalu setara dengan 110,9% dari target yang kami tetapkan. Pencapaian laba bersih telah merefleksikan 189,9% dari target," tulis Andy dalam risetnya.

Dia menyebutkan, Mirae Asset Sekuritas kemungkinan mempertahankan target harga LSIP. Hal itu mempertimbangkan proyeksi rata-rata harga jual CPO tahun ini sebesar 3.000 ringgit Malaysia per ton dan meningkat menjadi 3.200

Ringkasan Kinerja Keuangan PP London Sumatra Indonesia (Lonsum) (dalam miliar Rp)

	2019	2020	2021F	2022F	2023F
Penjualan	3.699	3.537	4.039	4.323	4.086
EBITDA	586	1187	1343	1493	1266
Laba bersih	254	696	784	908	717
EPS (Rp)	37,2	102,1	115	133,1	105,1
Net margin (%)	6,9	19,7	19,4	21	17,5
PER (x)	36,4	13,3	11,8	10,2	12,9
PBV (x)	1,1	1	0,9	0,9	0,9
ROAA (%)	2,5	6,6	7	7,7	5,9
ROAE (%)	3	7,8	8,2	9	6,8
Net gearing (x)	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Kas akhir tahun	1.132	1.959	2.579	3.117	3.640

Sumber: BRI Danareksa Sekuritas

ringgit Malaysia per ton pada 2022.

"Lonsum juga didukung oleh beberapa katalis positif, yaitu neraca keuangan yang kuat dengan posisi kas bersih yang

besar untuk mendukung ekspansi perseroan dalam jangka panjang. Adapun target harga LSIP sebelumnya ditetapkan Rp 1.590 dengan rekomendasi beli," ungkapnya.

PENJUALAN 39% SAHAM INTERMEDIA CAPITAL DISETUJUI

Visi Media akan Dirikan Perusahaan Baru di Bidang Digital dan Konten

JAKARTA – PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) akan mendirikan dua perusahaan baru yang bergerak di bidang pengelolaan digital dan konten. Dua perusahaan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada semester I-2021.

"Saya bertanggung jawab mengurus kedua perusahaan baru tersebut. Semoga dua perusahaan itu bisa meluncur, baik yang bisnis digital dan konten pada semester I tahun ini," kata Direktur Utama PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) Arief Yahya, usai RUPSLB Visi Media Asia di Jakarta, Senin (15/3). Inter-

media Capital merupakan anak usaha Visi Media Asia.

Arief Yahya yang mantan Menteri Pariwisata dan mantan direktur utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) tersebut mengatakan, untuk bertahan di era digital, tak ada cara lain yang ditempuh, kecuali melakukan transformasi digital. Digital bisnis sendiri diharapkan memberikan valuasi 15-20% terhadap kinerja Visi Media Asia sebagai induk usaha Intermedia Capital. Namun, perseroan belum bersedia mengungkap secara detail nilai investasinya.

"Investasinya belum dihitung, tapi kami akan memulainya dengan *partnership* dulu. Kami ingin *partnership* jangka panjang, mitra bisnis penyedia teknologi dan kami sebagai pasarnya. Kalau sudah dapatkan *partnership* dengan *digital platform*, maka investasi yang dikeluarkan tentu lebih rendah," ucap Arief. Adapun konten yang akan digeluti terdiri atas tiga fokus utama, yakni olahraga, agama, dan pariwisata. Perseroan juga akan mengakomodasi para *influencer* untuk pengembangan tersebut. Presiden Direktur Visi Me-

dia Asia Anindya Novyan Bakrie menyebutkan, perseroan menganggarkan belanja modal (*capital expenditure/capex*) sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut dikhususkan untuk pengembangan konten dan digital. "Angka tersebut baik untuk jadi modal, untuk kerja sama dengan *influencer* dan digital, kolaborasi tadi akan buat efek lebih besar," pungkasnya.

Lepas 39% Saham

Sementara itu, pemegang saham berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (RUPSLB) Visi Media Asia menyetujui penjualan 39% saham Intermedia Capital, perusahaan induk stasiun televisi ANTV.

Besaran saham yang dilepas emiten media Grup Bakrie itu setara dengan 15,29 miliar saham kepada Reliance Capital International Limited (RCIL), pihak yang disetujui kreditor untuk melaksanakan jual beli saham tersebut. Penjualan saham Intermedia Capital senilai US\$ 171,8 juta atau setara dengan Rp 2,43 triliun atau Rp 158 per saham. "Penjualan 39% atau Rp

2,4 triliun akan dilaksanakan bulan ini juga," kata Anindya.

Transaksi penjualan saham Intermedia Capital merupakan bagian dari skema penyelesaian atau pelunasan seluruh utang Grup VIVA berdasarkan *Debt Settlement Agreement (DSA)* yang ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2020 yang lalu. Di dalam DSA, Grup VIVA dan para kreditor telah menyetujui empat hal sebagai berikut.

Pertama, posisi akhir total pinjaman pokok VIVA yang terutang sebesar US\$ 239,76 juta yang terdiri dari utang pokok

berdasarkan *Junior Facility Agreement* sebesar US\$ 78,37 juta dan utang pokok berdasarkan *Senior Facility Agreement* sebesar US\$ 161,39 juta.

Kedua, sebagian utang *Senior Facility* yang menjadi tanggung jawab ANTV akan diselesaikan melalui fasilitas *refinancing* yang akan diperoleh ANTV dari perbankan nasional sebesar Rp 960 miliar atau setara dengan US\$ 67,94 juta (*cash settlement*) dengan asumsi kurs tukar US\$ 1 sebesar Rp 14.130, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 10 Desember 2020. (Iov)

Wika Gedung Cetak Laba Bersih Rp 156,3 M

JAKARTA – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGA) membukukan laba bersih senilai Rp 156,34 miliar hingga akhir 2020, turun 65,36% dari realisasi tahun 2019 yang sebesar Rp 451,36 miliar. Penurunan tersebut seiring dengan terpanya-nya pendapatan perseroan sebesar 37,7% menjadi Rp 2,81 triliun dari Rp 4,56 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan yang dipublikasikan pada Senin (15/3), beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp 2,59 triliun hingga akhir 2020 atau turun 39,02% dibandingkan tahun 2019 yang senilai Rp 4,10 triliun. Penurunan tersebut membuat laba kotor turun 54,4% menjadi Rp

212,06 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 465,17 miliar.

Dari sisi ekuitas, perseroan mencatatkan sebesar Rp 2,16 triliun atau turun 10,74% dari pencapaian akhir tahun 2019 sebesar Rp 2,42 triliun. Adapun total kewajiban tercatat sebesar Rp 3,88 triliun atau tumbuh 3,98% dari sebelumnya Rp 3,73 triliun.

Hasilnya, aset perseroan tercatat sebesar Rp 6,08 triliun atau turun 1,87% dibanding akhir tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp 6,19 triliun. Adapun arus kas diperoleh dari aktivitas operasi tercatat sebesar Rp 101,47 miliar, turun 27,33% dari Rp 139,27 miliar.

Tahun lalu, perseroan mem-

peroleh kontrak baru sebesar Rp 3,04 triliun atau merefleksikan 88,2% dari target revisi kontrak baru 2020 sebesar Rp 3,44 triliun. Dari perolehan itu, realisasi kontrak dihadapi (*order book*) hingga Desember 2020 menjadi Rp 14,5 triliun atau telah mencapai 99,3% dari target revisi *order book* 2020 sebesar Rp 14,6 triliun.

Kontrak baru terdiri atas proyek pemerintah yang menyumbang sekitar 41% terhadap kontrak baru perseroan. Sisanya bersumber dari proyek BUMN sekitar 42% dan swasta 17% dengan tipe proyek, kantor 27%, fasilitas umum 52%, komersial 19%, dan residensial 2%.

"Pandemi Covid-19 menyebab-

kan perlambatan di hampir seluruh sektor usaha di Indonesia, termasuk di bisnis konstruksi gedung yang berimbas pada penurunan dan mundurnya tender-tender pada 2020," ujar Direktur Utama Wika Gedung Nariman Prasetyo.

Tahun ini, anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tersebut membidik kontrak dihadapi atau *order book* sebesar Rp 15,52 triliun. Target kontrak dihadapi terdiri atas target kontrak baru Rp 4,22 triliun dan *carry over* tahun 2020 sebesar Rp 11,3 triliun. Sementara itu, target kontrak baru 2021 sebesar Rp 4,22 triliun atau naik 22,63% dari target revisi kontrak baru 2020 sebesar Rp 3,44 triliun. (Iov)



Saham Sektor Industri Dasar

Karyawati melihat pergerakan harga saham melalui layar monitor, di Jakarta. Pelemahan indeks pada perdagangan Senin (15/3/2021) akibat penurunan sebagian besar sektor saham, seperti saham industri dasar melemah 1,25%, infrastruktur 1,05%, keuangan 0,83%, pertambangan 0,76%. Sedangkan sektor pertanian alami penguatan 1,01%, perdagangan dan jasa mencapai 1,01%, dan saham sektor aneka industri menguat 0,99%.

18 FINANCIAL DATA



Stock Widget Pilihan Tepat Emiten Indonesia.

Gunakan Stock Widget untuk Menampilkan Informasi Harga Saham Perusahaan Anda di Website.

Desain Menarik, Warna Sesuai Identitas Perusahaan dan Bebas Memilih Informasi yang Ingin Ditampilkan.

Informasi lebih lanjut hubungi (021) 5151669 atau email: sales@limas.com



PERDAGANGAN SAHAM BURSA EFEK INDONESIA

15 MARET 2021

KODE	NAMA SAHAM	HARGA SAHAM (Rp)		▲/▼ (Rp)	VOL	NILAI (Rp)	KAPITALISASI PASAR
		SBL	PNT				
BBCA	Bank Central Asia Tbk.	33.825	33.325	-500	11.483.200	384.973.365.000	813.411.926.167.500
BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	4.580	4.570	-10	86.801.300	398.274.686.000	558.053.448.183.000
TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	3.450	3.380	-70	50.077.300	170.078.936.000	334.830.292.108.000
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	6.725	6.650	-75	39.961.200	267.083.512.500	307.229.999.986.700
UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	6.700	6.575	-125	12.546.500	82.944.205.000	250.836.250.000.000
ASII	Astra International Tbk.	5.475	5.525	50	48.489.500	269.370.292.500	223.671.631.098.500
TPJA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	10.575	10.525	-50	3.298.800	34.703.487.500	187.697.800.736.500
HMSJ	H.M. Sampoerna Tbk.	1.435	1.435	0	43.904.900	63.177.933.500	166.916.440.351.500
EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.	2.150	2.260	110	21.429.300	48.210.271.000	127.553.435.929.200
ARTO	Bank Jago Tbk.	11.375	10.850	-525	7.194.300	79.021.205.000	117.451.091.817.850
BNNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	6.150	6.325	175	66.884.800	420.920.527.500	116.773.224.573.225
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	6.775	6.650	-125	5.236.300	35.144.957.500	109.046.700.000.000
BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.	2.620	2.600	-20	24.931.000	65.517.154.000	105.611.547.527.200
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	8.375	8.500	125	9.366.100	80.177.200.000	99.126.218.000.000
BRPT	Barito Pacific Tbk.	1.060	1.025	-35	33.309.600	34.882.882.000	95.723.548.893.725
SMMA	SinarMas Multiartha Tbk.	13.500	13.500	0	7.400	99.375.000	85.963.473.679.500
UNTR	United Tractors Tbk.	21.225	21.100	-125	3.942.900	83.491.247.500	78.705.851.369.600
KLBF	Kalbe Farma Tbk.	1.595	1.585	-10	43.715.300	69.567.681.500	74.297.068.544.350
INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	13.325	13.200	-125	4.260.700	56.091.520.000	72.216.974.821.200
GGRM	Gudang Garam Tbk.	36.225	36.200	-25	1.050.000	37.988.787.500	69.651.985.600.000
MEGA	Bank Mega Tbk.	9.975	9.900	-75	11.000	109.655.000	68.251.968.447.300
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	11.425	11.125	-300	5.158.000	58.041.810.000	65.988.160.000.000
BNLI	Bank Permata Tbk.	2.320	2.290	-30	208.600	480.415.000	63.575.694.051.770
MYOR	Mayora Indah Tbk.	2.800	2.760	-40	6.570.300	18.028.258.000	61.710.011.241.000
TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.	1.240	1.195	-45	34.037.100	40.833.709.000	60.962.476.875.000
MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.	2.490	2.470	-20	39.246.300	97.509.567.000	56.574.981.513.050
ANTM	Aneka Tambang Tbk.	2.420	2.340	-80	371.987.500	872.599.777.000	56.231.989.456.500
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	6.375	6.400	25	7.742.700	49.728.357.500	56.194.729.600.000
TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk.	2.100	2.110	10	22.098.200	46.377.264.000	47.806.268.828.950
POLL	Pollux Properti Indonesia Tbk.	5.900	5.700	-200	2.784.000	16.031.487.500	47.417.294.520.000
INCO	Vale Indonesia Tbk.	4.640	4.710	70	51.202.800	237.880.695.000	46.800.155.371.200
INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	13.100	12.625	-475	7.379.200	94.002.927.500	46.475.550.199.875
DNST	Indoritel Makmur Internasional Tbk.	3.260	3.250	-10	4.900	15.736.000	46.098.000.000.000
TCPI	Transcoal Pacific Tbk.	9.150	9.125	-25	15.156.000	138.435.855.000	45.625.000.000.000
BYAN	Bayan Resources Tbk.	13.600	13.000	-600	1.700	22.220.000	43.333.335.500.000
TJIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	13.750	13.175	-575	4.787.000	63.621.495.000	41.016.720.534.750
AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	985	980	-5	2.593.500	2.514.080.000	40.694.011.666.000
MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	2.830	2.850	20	22.461.700	63.854.394.000	40.602.096.075.000
ADRO	Adaro Energy Tbk.	1.210	1.235	25	173.813.000	215.526.699.500	39.502.663.070.000
MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk.	5.925	5.525	-400	189.500	1.051.312.500	37.371.578.426.325
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	4.410	4.140	-270	44.187.900	62.275.871.000	34.180.526.556.360
BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.	1.420	1.420	0	2.269.939.700	99.940.475.000	31.951.551.978.264
PTBA	Bukit Asam Tbk.	2.730	2.740	10	27.693.700	76.051.401.000	31.566.606.345.000
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	4.470	4.310	-160	5.855.300	25.305.859.000	31.281.424.872.000
ISAT	Indosat Tbk.	5.650	5.625	-25	3.364.200	19.120.457.500	30.565.875.937.500
BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	3.160	3.130	-30	960.900	3.013.013.000	30.285.308.277.330
DCII	DCI Indonesia Tbk.	12.225	12.225	0	0	0	29.141.293.627.500
PWON	Pakuwon Jati Tbk.	1.225	1.225	0	595	63.704.800	38.289.216.000
BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.	1.110	1.150	40	28.430.600	32.578.006.500	28.612.334.391.250
BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.	3.890	3.740	-150	4.532.300	17.138.696.000	28.523.719.620.000
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	1.595	1.615	20	17.443.800	28.411.638.000	27.697.250.000.000
PNBO	Bank Pan Indonesia Tbk.	1.115	1.135	20	2.807.600	3.183.041.000	27.055.728.207.730
AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agriponia Tbk.	1.245	1.275	30	192.121.400	244.706.533.500	26.940.568.093.200
BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	1.270	1.270	0	23.622.000	30.109.388.000	26.887.634.581.240
SCMA	Surya Citra Media Tbk.	1.745	1.750	5	6.277.800	10.987.962.000	25.863.409.776.750
MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.	27.250	27.250	0	0	0	25.838.286.500.000
FREN	Smartfren Telecom Tbk.	92	91	-1	842.047.800	76.225.079.000	23.956.891.231.910
SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.	785	785	0	7.408.800	5.806.739.500	23.550.000.000.000
BTPN	Bank BTPN Tbk.	2.890	2.900	10	38.900	112.804.000	23.391.557.936.900
EXCL	XL Axiata Tbk.	2.150	2.150	0	11.779.100	25.272.577.000	23.058.050.768.400
CASA	Capital Financial Indonesia Tbk.	388	408	20	35.900	13.965.400	22.226.311.465.944
CTRA	Ciputra Development Tbk.	1.205	1.190	-15	18.836.800	22.406.779.000	22.086.761.042.430
AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	11.300	11.375	75	3.955.900	45.800.547.500	21.893.329.787.875
JJFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	1.850	1.855	5	29.739.900	56.019.064.000	21.752.796.997.875
BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1.975	1.970	-5	29.851.500	59.330.547.000	20.653.677.000.000
NISP	Bank OCBC NISP Tbk.	900	900	0	600.000	540.842.000	20.444.198.428.800
WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	1.415	1.435	20	44.067.300	63.348.867.000	19.478.619.685.000
MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.	9.050	9.150	100	13.700	125.077.500	19.279.050.000.000
FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.	7.600	7.600	0	0	0	18.831.954.781.200
KAEF	Kimia Farma Tbk.	3.230	3.200	-30	2.320.300	7.446.631.000	17.772.999.996.800
UIJT	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.	1.515	1.525	10	415.000	631.984.000	17.619.130.200.000
BBKP	Bank KB Bukopin Tbk.	545	535	-10	90.669.000	48.675.839.500	17.392.916.591.985
MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	655	650	-5	25.955.300	17.042.746.500	16.338.550.313.800
MWNC	Media Nusantara Citra Tbk.	1.085	1.065	-20	47.611.000	51.002.587.500	16.028.023.911.150
SMRA	Summarecon Agung Tbk.	1.040	1.045	5	41.767.000	43.564.831.500	15.075.986.855.600
BBJR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	1.535	1.570	35	14.129.600	22.141.601.000	15.070.945.358.780
WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1.640	1.675	35	31.643.500	52.799.209.500	15.024.668.548.100
GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2.550	2.550	0	0	0	15.000.000.150.000
LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	206	208	2	42.139.900	8.800.407.000	14.746.787.820.752
SRGT	Saratoga Investama Sedaya Tbk.	5.450	5.400	-50	1.180.000	6.398.440.000	14.650.021.800.000
AKRA	AKR Corporindo Tbk.	3.590	3.590	0	16.771.600	60.789.047.000	14.412.754.762.800
TINS	Timah Tbk.	2.040	1.900	-140	205.586.100	395.512.136.500	14.150.731.562.600
HRUM	Harum Energy Tbk.	5.375	5.200	-175	7.194.300	37.720.985.000	14.058.824.000.000
SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.	1.755	1.815	60	747.200	1.368.164.500	13.908.163.500.000
MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.	815	815	0	32.579.700	26.596.793.500	13.529.000.000.000
ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	11.550	11.825	275	3.275.900	38.500.172.500	13.361.363.125.000
BANK	Bank Net Indonesia Syariah Tbk.	2.450	2.650	200	73.672.300	191.428.507.000	13.250.000.000.000
KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk.	675	680	5	87.305.500	60.132.837.500	13.155.549.892.000
BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk.	815	785	-30	98.435.400	78.347.200.000	12.534.185.761.700
BSIM	Bank Sinarmas Tbk.	750	725	-25	7.694.700	12.528.508.119.150	12.488.807.845.200
MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk.	1.360	1.360	0	0	0	12.488.807.845.200
BITM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.	835	840	5	20.056.000	16.755.552.000	12.466.888.204.840
HEAL	Medikaloka Hermina Tbk.	4.120	4.100	-20	610.400	2.522.113.000	12.209.800.000.000
IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk.	9.000	9.000	0	1.500	13.927.500	12.158.144.343.000
GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	1.655	1.645	-10	731.100	1.204.574.000	12.139.409.578.695
CARE	Metro Healthcare Indonesia Tbk.	344	356	12	115.343.200	40.310.040.400	11.837.000.000.000
DMAS	Puradelta Lestari Tbk.	240	242	2	56.513.800	13.632.350.800	11.663.942.886.200
RMBA	Bentoel Internasional Investama Tbk.	318	318	0	25.700	8.173.400	11.575.561.327.500
POWR	Cikarang Litrindo Tbk.	700	710	10	5.622.100	3.985.454.500	11.421.880.760.000
IPTV	MNC Vision Networks Tbk.	276	274	-2	10.102.500	2.775.594.200	11.374.848.806.486
CITA	Cita Mineral Investing Tbk.	2.900	2.860	-40	29.200	84.005.000	11.326.633.175.000
SMAR	Smart Tbk.	3.860	3.890	30	4.300	16.644.000	11.172.832.193.740
TRIO	Trioksel Oke Tbk.	4.260	4.260	0	0	0	11.079.192.718.770
LISIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	1.500	1.505	5	74.525.700	113.386.770.500	10.268.410.267.325
SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	1.050	1.070	20	21.103.500	22.920.819.500	10.191.750.000.000
CMNP	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	1.800	1.870	70	367.600	674.448.000	10.156.433.602.920
KPIG	MNC Land Tbk.	124	125	1	38.243.600	4.713.204.000	10.078.215.833.000
STTP	Siantar Top Tbk.	0	0	0	0	0	9.923.250.000.000
LINK	Link Net Tbk.	3.360	3.380	20	2.106.400	7.118.598.000	9.677.600.735.920
PTPP	PP (Persero) Tbk.	1.525	1.555	30	19.190.100	29.821.455.500	9.640.840.385.470
DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	12.475	12.475	0	0	0	9.612.640.192.000
APIC	Pacific Strategic Financial Tbk.	800	815	15	10.354.800	8.362.197.000	9.589.545.492.720
SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	960	965	5	11.094.200	10.766.959.000	9.584.895.634.240
GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	346	370	24	128.491.600	47.138.581.200	

2 FINANCIAL DATA

INVESTOR DAILY

INDONESIA GOVERNMENT BOND CURVE

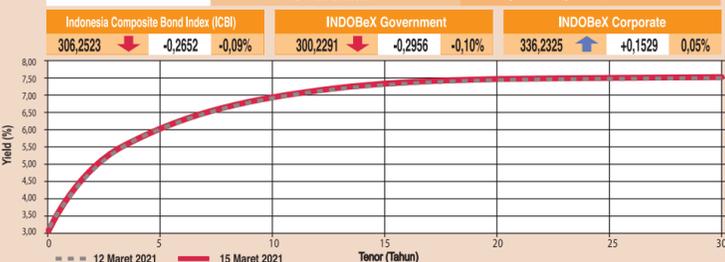
15 MARET 2021



PENILAI HARGA EFEK INDONESIA (PHEI) INDONESIA GOVERNMENT BOND YIELD CURVE & INDONESIA BOND INDEXES

15 Maret 2021

(INDOBEX) - Total Return



Benchmark SUN

Tenor	Seri	Fair Price(%)	YTM(%)	Kupon(%)
5.09	FR0086	102,4056	5,8497	5,5000
9.93	FR0087	101,1750	6,8299	6,5000
19.10	FR0083	100,5345	7,4461	7,5000

Obligasi Negara Ritel & Sukuk Negara Ritel

Nama Obligasi	Seri	Kupon (%)	Jatuh Tempo	TTM (Tahun)	Fair Price (%)	Change (bps)	15 Mar 2021	12 Mar 2021	Change	
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORH015	ORH015	8,2500	15-Oct-21	0,59	102,5841	102,5978	-1,37	3,7643	3,8070	-0,04
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORH016	ORH016	6,8000	15-Oct-22	1,59	103,9630	103,9170	4,60	4,2084	4,2514	-0,04
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORH017	ORH017	6,4000	15-Jul-23	2,33	102,8868	102,8925	-0,58	5,0853	5,0874	0,00
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORH018	ORH018	5,7000	15-Oct-23	2,59	101,1676	101,1198	4,78	5,2159	5,2371	-0,02
Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORH019	ORH019	5,5700	15-Feb-24	2,92	99,1953	99,1977	-0,24	5,8709	5,8691	0,00
Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	SR011	8,0500	10-Mar-22	0,99	104,0477	104,0413	0,65	3,8617	3,9009	-0,04
Sukuk Negara Ritel Seri SR-012	SR012	6,3000	10-Mar-23	1,99	102,7174	102,7529	-3,55	4,8621	4,8492	0,01
Sukuk Negara Ritel Seri SR-013	SR013	6,0500	10-Sep-23	2,49	102,0129	101,9913	2,16	5,1854	5,1971	-0,01

SAHAM PENCETAK GAIN TERBESAR

15 MARET 2021

KODE	NAMA	SBL	PNT	PRB	PRB%	VOLUME	NILAI	FREK
BESJ	Berkah Beton Sadayk Tbk.	182	244	62	34,07	209.200	51.044.800	69
NDRA	Nusantara Alamiata Tbk.	191	256	65	34,03	554.500	140.959.400	39
USSA	Pakuan Tbk.	284	354	70	24,65	613.900	213.268.200	209
ESAA	Surya Esa Perkasa Tbk.	220	274	54	24,55	269.813.600	69.554.431.400	10.299
PUDP	Pudji Prestige Tbk.	270	336	64	23,44	131.400	43.426.400	99
SRJA	Selanjarsaya Anugrahjaya Tbk.	208	258	50	24,04	5.287.800	1.309.053.000	1.131
ZBRA	Zebra Nusantara Tbk.	143	176	33	23,08	122.060.900	21.275.114.400	10.318
DARA	Duta Indah Tbk.	280	344	64	22,86	570.400	195.851.400	289
YNSA	Yonarmata Hoesapersada Tbk.	470	550	80	17,62	19.800	9.831.000	7
SKEM	Sekar Bumi Tbk.	312	362	50	16,03	3.600	1.175.200	23

SAHAM PENCETAK LOSS TERBESAR

15 MARET 2021

KODE	NAMA	SBL	PNT	PRB	PRB%	VOLUME	NILAI	FREK
PLAN	Planet Pengendiri Jaya Tbk.	48	44	-4	-8,33	55.259.800	2.501.012.900	4.497
INPS	Indah Peka Sertosa Tbk.	3.580	3.330	-250	-6,98	900	2.997.000	61
MPOD	Maha Progeni Indonesia Tbk.	860	800	-60	-6,98	35.100	291.101.500	39
AMAR	Bank Amar Indonesia Tbk.	402	374	-28	-6,97	14.977.000	5.612.467.000	1.635
BGTG	Bank Gemana Tbk.	230	214	-16	-6,96	917.800	1.964.049.200	509
PGI	Pengembangan Galia Lestari Indah Tbk.	230	214	-16	-6,96	184.600	41.946.400	102
BVIC	Bank Victoria International Tbk.	288	268	-20	-6,94	2.788.200	5.477.600	269
BKCI	Midi Utama Indonesia Tbk.	240	220	-20	-6,94	28.800	66.554.000	24
MTSA	Mesa Epa Tbk.	170	154	-16	-6,94	189.210	22.905.300	87
VRMA	Verena Multi Finance Tbk.	159	148	-11	-6,92	207.200	31.577.800	53

KURS TRANSAKSI BI

15 MARET 2021

MATA UANG	NILAI	KURS JUAL	KURS BELI
AUD	1	11.236,55	11.231,27
BND	100	10.769,41	10.659,87
CAD	1	11.518,35	11.402,83
CHF	1	15.603,78	15.493,18
CNH	1	2.226,88	2.227,36
EUR	1	2.227,74	2.226,47
DKK	1	2.225,41	2.223,10
GBP	1	17.295,32	17.173,56
HKD	100	20.194,01	20.177,45
JPY	100	13.284,46	13.149,85
KRW	1	12,75	12,75
UAH	1	47.816,12	47.910,63
MYR	1	3.512,37	3.522,14
NOK	1	1.714,63	1.698,87
NZD	1	10.427,74	10.433,21
PHP	1	4.238,98	4.252,84
SGD	1	2.982,80	2.982,99
SEK	1	1.709,11	1.708,25
USD	1	10.769,41	10.659,87
THB	1	471,53	469,53
VND	1	14.442,86	14.450,09
USD	1	0,63	0,62

SUKU BUNGA PENJAMINAN LPS

1 OKT 2020-29 JAN 2021

BANK UMUM	RUPIAH	US\$
BPR	6,00%	1,75%
	8,50%	4,75%

SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA

15 MARET 2021

NAMA BANK	1 Bulan (Rp/US\$)	3 Bulan (Rp/US\$)	6 Bulan (Rp/US\$)	1 Th (Rp/US\$)
BRI <100 < 100 USD	4.250,45	4.250,45	4.250,45	4.250,60
MANDIRI < Rp 100 > USD 1 juta sd < 10 juta	3.000,30	3.000,30	3.000,45	3.000,45
BNI > Rp 5 M > USD 100.000	3.500,45	3.500,45	3.500,45	3.500,75
DANAMON	6.500,25	6.500,25	6.500,25	6.500,25
PERMATA	4.500,25	4.500,25	4.500,25	4.500,25
BKA < Rp 2 M < US\$ 100.000	2.900,13	2.900,13	2.900,18	2.900,18
MAYBANK	4.250,25	4.250,25	4.250,25	4.250,25
ANK PAMN	1.861,48	1.861,48	1.861,48	1.861,48
CITIBANK N.A.	4.500,10	4.500,15	4.500,30	4.500,30
HSBC	4.500,10	4.500,15	4.500,30	4.500,30
BDA	4.500,10	4.500,10	4.500,10	4.500,10
HONGKONG	2.0540,20	2.0540,20	2.0540,20	2.0540,20
STANDARD	1.5250,02	1.5250,02	1.5250,02	1.5250,02
INDONESIA	3.6230,05	3.6230,05	3.6230,05	3.6230,05
BTN	4.250,05	4.250,05	4.250,05	4.250,05
Bank Bukopin	5.250,75	5.250,75	5.250,75	5.250,75
Bank KB Bumiputera	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bank DKI <= Rp 1 M	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bank of Indonesia	7.002,50	7.002,50	7.002,50	7.002,50
Mutual Bank	7.6251,875	7.6251,875	7.6251,875	7.6251,875
Bank Artha Graha Internasional	5.251,00	5.251,00	5.251,00	5.251,00
Bank Bintang Manunggal	7,75	7,75	7,75	7,75
Bank CIBC NIS >= Rp 1 R.	7,00	7,00	7,00	7,00
Bank Kesawan	5,750,75	5,750,75	5,750,75	5,750,75
Bank BTN	6,875	6,875	6,875	6,875
Bank Mayapada	5,50	5,50	5,50	5,50
Bank Sahabat Sampemo < Rp 100 Tr	7,25	7,25	7,25	7,25
Bank BIB	6,251,00	6,251,00	6,251,00	6,251,00

DAFTAR SAHAM PEFINDO25

15 MARET 2021

KODE	NAMA	SEBELUM	PENUTUPAN	VOLUME	NILAI
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	1.595	1.615	17.443.800	28.411.638.000
AKRA	AKR Corporindo Tbk.	3.590	3.590	16.771.600	60.789.047.000
PGAS	Pacific Strategic Financial Tbk.	815	815	10.254.800	8.262.197.800
ASTA	Adi Sarana Amarta Tbk.	1.715	1.845	91.528.800	170.588.780.000
BESS	Bekas Fajar Industrial Estate Tbk.	164	164	287.832.400	4.677.832.400
BULL	Buana Lintas Lautan Tbk.	312	312	416.345.300	131.491.884.000
ELSA	Elnusa Tbk.	392	396	70.412.300	27.708.853.400
HEAL	Medikaloka Hermina Tbk.	4.120	4.100	61.400.400	2.522.113.000
ITMG	Indo Tambora Energy Megah Tbk.	11.350	11.825	3.275.900	38.500.172.500
GOLO	Kalbe Farma Tbk.	1.595	1.585	43.713.300	69.567.681.500
LINK	Link Net Tbk.	3.360	3.380	1.106.400	6.138.594.000
MARI	Mitra Adiperkasa Tbk.	615	615	32.579.700	26.596.739.000
MOKA	Merdeka Copper Gold Tbk.	2.480	2.470	39.246.300	97.509.567.000
MIRA	Mitra Kelarga Kayasestah Tbk.	3.830	2.850	22.461.700	63.854.394.000
MCMA	Media Nusantara Citra Tbk.	1.085	1.065	4.771.000	51.002.587.500
PISA	Bukit Asam Tbk.	2.730	2.740	27.629.700	76.051.884.000
SCMN	Sunga Citra Media Tbk.	1.045	1.075	6.277.800	10.987.962.000
SIDO	Industri Jambu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.	785	785	7.408.800	5.806.739.500
SMAN	Selamatempu Tbk.	1.315	1.315	7.98.100	1.060.212.000
SSMS	Savitri Sembemas Sarana Tbk.	1.090	1.070	21.103.500	22.920.819.500
TOTL	Total Bangun Persada Tbk.	358	356	787.300	282.474.800
UNIV	Unilever Indonesia Tbk.	6.700	6.575	12.546.500	82.944.205.000
WGEJ	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	232	232	37.472.000	8.632.696.250
WTON	Integra Industriobinet Tbk.	750	750	68.359.000	52.175.647.500
WOOD	Wijaya Karya Beton Tbk.	340	348	11.391.500	3.961.621.400

JAKARTA-BBI

Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 15 Maret 2021:

KOMODITAS	BULAN	HARGA PENYELESAIAN	PERUBAHAN	VOLUME
Berjangka Olein (Rp/Kg)				
OLE	MAR21	12.530	0	70
OLE	JUN21	12.130	-10	100
OLE	MAY21	12.180	-10	280
OLE	JUL21	11.950	-10	100
OLE	AUG21	11.850	-10	100
Berjangka Emas (Rp/Gram)				
GOL	MAR21	805.650	0	12.200
GOL	MAR21	704.100	0	1.000
GOL	MAY21	714.500	0	1.000
GOL100	MAR21	806.650	0	12.200
GOL100	MAY21	806.500	0	1.000
GOL250	MAR21	806.150	0	12.200
GOL250	APR21	809.950	360	6.750
GOL250	MAY21	808.200	394	4.850
Berjangka Kakao - CCS (Rp/Kg)				
CCS	MAR21	30.850	0	-240
CCS	MAY21	30.990	0	-40
CCS	JUL21	31.190	0	80
CCS	SEP21	31.090	0	80
CCS	DEC21	30.980	0	80

Harga beberapa komoditas di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pada 12 Maret 2021:

KODE	TPE	JATUH TEMPO	TTM	TERRINGGI	TERRENDAH	PENUTUPAN	FREK	VOLUME	TOTAL
ADMFO4BCN6	Outright	4-Oct-2022	1,55	104,10	100,50	100,50	2	1,10	1,11
ADMFO4CN2	Outright	23-Jan-2023	2,86	109,50	109,50	109,50	1	0,50	0,50
ADMFO4DN2	Outright	21-Mar-2023	2,01	101,00	101,00	101,00	1	0,30	0,30
ADMFO5BCN1	Outright	7-Jul-2023	2,31	102,10	102,10	102,10	1	0,30	0,31
ADMFO4BCN1	Outright	15-May-2021	2,1						

Nick Potts / POOL / AFP



Derby London Utara Jadi Milik Arsenal

Bek Arsenal asal Portugal, Cedric Soares, berbaring di lapangan di bawah tembok pertahanan ketika menghadapi tendangan bebas ke gawang timnya, saat pertandingan sepak bola Liga Primer Inggris antara Arsenal dan Tottenham Hotspur (Spurs) di Stadion Emirates di London, Inggris, Minggu (14/3/2021) malam waktu setempat. Arsenal jadi pemenang di "Derby London Utara" usai menang dengan skor 2-1.

Arteta Nilai Arsenal Layak Menang

JAKARTA - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta menilai tim asuhannya layak menang atas Tottenham Hotspur. Arteta menilai Arsenal tampil dominan dalam laga yang berlangsung di Emirates Stadium, Minggu (14/3) malam WIB tersebut.

"Kami tim yang lebih baik. Kami sangat dominan dan percaya diri. Terlepas dari 10 menit terakhir, saya kira kami luar biasa," ujar Arteta seperti dilansir situs resmi klub.

Arsenal tertinggal lebih dahulu lewat gol Erik Lamela pada menit ke-33. Klub berjuluk Meriam London itu baru bisa menyamakan kedudukan lewat Martin Odegaard pada menit ke-44. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Kemenangan menjadi milik Arsenal setelah Alexandre Lacazette sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-62. Pada menit ke-74, Tottenham harus bermain dengan 10 orang usai Erik Lamela diusir walis.

Arteta menganggap, Arsenal sangat agresif dalam laga tersebut. Meski harus tertinggal lebih dahulu, pelatih asal Spanyol itu tetap memuji penampilan anak asuhnya.

"Bermain agresif saat membuat peluang dan merebut bola, bermain dengan karakter, itu hebat," kata Arteta.

Namun, kemenangan atas Tottenham tidak mengubah posisi Arsenal di tabel klasemen. Lacazette dan kawan-kawan. bertahan di posisi ke-10 dengan nilai 41 poin.

Sementara itu, Tottenham menempati posisi ketujuh. Pasukan Jose Mourinho mengumpulkan nilai 45 poin dari 28 pertandingan.

Kunci Kemenangan

Sementara itu, Martin Odegaard menjadi salah satu kunci kemenangan 2-1 Arsenal atas Tottenham Hotspur. Gol pemain asal Norwegia itu menjadi awal hasil positif di Emirates Stadium, Minggu (14/3) malam tersebut dalam lanjutan Liga Primer.

"Ini mimpi yang menjadi kenyataan dan juga ini kemenangan besar dalam laga derby. Jadi saya senang untuk tim. Kemenangan ini untuk fans dan semoga mereka senang dengan kami. Saya kira kami mendominasi pertandingan dari awal. Setelah kartu merah, pertandingan sedikit berubah," kata Odegaard. (rw)

Raya and the Last Dragon Kuasai Puncak Box Office



LOS ANGELES - Film petualangan animasi Disney, *Raya and the Last Dragon* bertengger di puncak box office kawasan Amerika Serikat dan Kanada.

Raya and the Last Dragon berada di posisi teratas setelah mengumpulkan pendapatan tertinggi di kawasan tersebut sebesar US\$ 5,5 juta atau setara Rp 78,9 miliar (kurs Rp 14.354) dari 2.163 bioskop selama akhir pekan. Penjualan tiket tersebut turun 35% dibandingkan akhir pekan sebelumnya.

Seperti dilansir *Reuters*, angka itu mendorong total keseluruhan pendapatan menjadi US\$ 15,8 juta di dalam negeri. *Raya and the Last Dragon* telah menghasilkan US\$ 36 juta lagi di box office internasional untuk penjualan global sebesar US\$ 52,6 juta.

Film Warner Bros, *Tom and Jerry* menempati posisi kedua dengan menarik pendapatan sebesar US\$ 4 juta dari 2.454 lokasi pada akhir pekan ketiga penayangannya. Film yang dibintangi oleh Chloe Grace Moretz, Colin Hanks dan Michael Pena itu telah meraup US\$ 28 juta di kawasan AS dan Kanada.

Di tempat ketiga, *Chaos Walking*, produksi Lionsgate, menghasilkan US\$ 2,25 juta dari 1.995 bioskop. Secara total, film *thriller* fiksi ilmiah yang dibintangi Daisy Ridley dan Tom Holland ini menghasilkan US\$ 6,9 juta. Secara internasional, film tersebut menambahkan US\$ 1,5 juta dari 33 negara, sehingga total kumulatifnya di luar negeri menjadi US\$ 5 juta.

Sementara itu, *Boogie* sebuah drama dari Focus Features, mendarai di posisi keempat dengan US\$ 730 ribu dari 1.272 bioskop. Film tentang keajaiban bola basket, *Queens* yang ditulis dan disutradarai oleh koki dan penulis Eddie Huang, telah menghasilkan total pendapatan US\$ 2,2 juta hingga saat ini di kawasan Amerika Utara tersebut.

Sedangkan, *The Croods: A New Age* लेकर kembali lima besar, menghasilkan US\$ 520.000 dari 1.440 layar. Petualangan animasi Universal, yang memulai debutnya secara teatrikal November lalu, telah mengumpulkan US\$ 54,3 juta di kawasan AS dan Kanada. (in)

Faktor Genetik Berperan Ciptakan Generasi Stunting

Oleh **Mardiana Maknum**

► JAKARTA – Faktor genetik turut berperan kuat terciptanya generasi *stunting*. Masalah *stunting* bukan sekadar persoalan nutrisi atau kurang gizi.

Demikian hasil penelitian disertasi yang dilakukan oleh Prof Dr dr Aman B Pulungan, Sp.A(K), FAAP, FRCP (Hon.) di Rampasasa, Flores, Nusa Tenggara Timur.

"Faktor genetik juga diprediksi menjadi salah satu yang mempengaruhi tinggi badan populasi yang lebih pendek dari rerata nasional. Lelaki dewasa pada kelompok pigmoid rampasasa mempunyai tinggi badan di bawah 150 cm, sedangkan tinggi badan perempuan dewasa di bawah 140 cm. Penelitian ini menunjukkan bahwa populasi pigmoid tidak mengalami malnutrisi, sehingga perawakan pendek mereka tidak termasuk *stunting*," ujar Prof Dr dr Aman B Pulungan dalam keterangan pers yang diterima *Investor Daily*, di Jakarta, belum lama ini.

Prof Arman mengungkapkan, penggunaan kurva pertumbuhan yang tidak tepat dapat menyebabkan *overdiagnosis stunting* dan *underweight*, terutama pada populasi Asia yang secara umum dianggap lebih pendek dan lebih rendah berat badannya dibandingkan populasi di Eropa dan Amerika.

"Tingginya angka *stunting* di Indonesia dan perhatian pemerintah serta alokasi dana yang tinggi menunjukkan pentingnya akurasi dalam pengukuran pertumbuhan anak," lanjut Prof Arman yang menjabat ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) serta Anggota Majelis Dokter Spesialis Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Berkat penelitian tersebut, Prof Aman

telah dikukuhkan sebagai Guru Besar Ke-16 Ilmu Kesehatan Anak FKUI pada kegiatan Sidang Terbuka dan Upacara Pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) 2021 yang dilakukan secara daring.

Prof Arman memberikan pidato pengukuhan yang berjudul *Penuntasan Stunting pada Anak sebagai suatu permasalahan Multi-Faktorial: Medis, Sosial, Ekonomi, Politik dan Emosional*.

Stunting masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Menurut Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia masih tinggi yakni 30%. *Stunting* merupakan sebuah kondisi tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya.

Penyebab utama *stunting* adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun.

Stunting memiliki dampak terhadap otak dan fisik anak yang sulit berkembang, kognitif, produktivitas dan kesehatan lebih rendah. Tetapi tidak semua anak yang berperawakan lebih pendek mengalami *stunting*.

Penuntasan *stunting* pada anak sebagai suatu permasalahan multifactorial, medis, sosial ekonomi, politik dan emosional. *Stunting* di Indonesia merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. *Stunting*

didefinisikan oleh WHO sebagai tinggi badan di bawah 2 standar deviasi di bawah median tinggi badan menurut usia.

Pada 2013, UNICEF menerbitkan laporan *Improving Child Nutrition* yang menyatakan Indonesia berada di peringkat Ke-5 untuk jumlah anak dengan *moderate* atau *severe stunting*. Hasil data tersebut dihitung berdasarkan kurva standar WHO sehingga mungkin menyebabkan *overestimation* angka *stunting* karena rerata tinggi badan yang tidak representatif terhadap suatu populasi.

Ketika pengukuran ulang data Riskesdas menggunakan kurva nasional, angka *stunting* jauh berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kurva referensi untuk memantau pertumbuhan anak-anak di populasi juga faktor yang penting.

Komprehensif

Masalah *stunting* harus dilihat secara komprehensif, menelaah dari berbagai faktor yang bisa memengaruhinya, termasuk standar pengukuran yang digunakan. *Stunting* erat dikaitkan dengan masalah nutrisi, tetapi hubungan antara nutrisi dan pertumbuhan linear masih diperdebatkan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi berupa peningkatan asupan gizi tidak dapat memperbaiki pertumbuhan linear secara bermakna.

Penelitian yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat menunjukkan pemberian makanan tambahan kepada anak *stunted* tidak menghasilkan kenaikan berat badan dan tinggi badan yang signifikan. Sedangkan, Penelitian di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Bali menunjukkan tidak ada hubungannya ketebalan lipit lemak kulit (indikator nutrisi) dengan tinggi badan. Oleh karena itu, penyebab perawakan pendek anak-anak ini mungkin disebabkan oleh hal lain. "Penggunaan *stunting* sebagai

indikator status gizi dapat mengalihkan perhatian dari masalah lingkungan dan sosial yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan anak karena diskusi mengenai *stunting* terlalu dititikberatkan pada masalah gizi. Para ahli mengemukakan pemikiran bahwa masalah *stunting* bukan hanya nutrisi, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, politik, dan emosional," tegas Prof Arman.

Kesenjangan sosial dan kurangnya kesempatan mobilisasi sosial di suatu populasi diduga lebih berkontribusi pada pendeknya tinggi badan. Studi tentang pertumbuhan anak balita Korea Utara dan Korea Selatan pada 2009 menunjukkan bahwa anak balita di Korea Selatan lebih tinggi 6-7 cm dibandingkan Korea Utara. Populasi Jerman Timur juga lebih pendek jika dibandingkan populasi Jerman Barat sebelum Tembok Berlin diruntuhkan.

Dia menambahkan, berdasarkan berbagai penelitian, dalam mengatasi *stunting* dan meningkatkan kesehatan anak Indonesia perlu melihat faktor sosial, ekonomi, politik, dan emosional. Pencegahan dan deteksi dini sangat penting dalam manajemen gangguan pertumbuhan seperti *stunting*, sehingga sistem yang sudah berjalan di Indonesia berpotensi untuk ditingkatkan, misalnya penggunaan buku KIA dan pemanfaatan Posyandu.

"Dalam mendukung perkembangan digitalisasi dan mempermudah akses layanan kesehatan di daerah rural Indonesia, kehadiran *smartphone* dapat dimanfaatkan untuk kesehatan anak, misalnya penggunaan aplikasi seperti PrimaKu. Aplikasi pemantauan pertumbuhan anak dapat membantu orangtua dalam upaya deteksi dini jika anaknya mengalami gangguan pertumbuhan," tutur Prof Aman yang juga menjabat President of Asia Pacific Pediatric Association (APPA).

Siloam Hospitals Yogyakarta dan Danone Indonesia Sukseskan Vaksinasi Lansia

DI YOGYAKARTA - Siloam Hospitals Yogyakarta bersama Danone Indonesia mendukung percepatan pelaksanaan program vaksinasi lanjut usia (lansia) atau di atas usia 60 tahun di Kota DI Yogyakarta.

Siti Nurtata Rizki, CEO Siloam Hospitals Yogyakarta menyambut baik kolaborasi dengan sektor swasta dalam pelaksanaan vaksinasi lansia. Vaksinasi lansia merupakan salah satu *milestone* yang sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dukungan sektor swasta ini dapat membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Indonesia mengatasi pandemi. "Hal ini juga menambah deretan kolaborasi Danone Indonesia dan Siloam Hospitals Group untuk penanganan pandemi mulai dari pemberian

ventilator, APD, sarana sterilisasi, serta dukungan hidrasi dan hingga makanan bergizi bagi tenaga kesehatan," ungkap dia dalam keterangan pers yang diterima *Investor Daily*, Senin (15/3).

Kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi lansia Kota DI Yogyakarta dilaksanakan salah satunya oleh Siloam Hospitals DI Yogyakarta mulai dari 12 Maret 2021 di Lippo Plaza Jogja. Sebanyak 200 lansia setiap harinya dijadwalkan mendapatkan vaksinasi lansia hingga akhir Maret 2021.

Arif Mujahidin, *Corporate Communication Director* Danone Indonesia menjelaskan melalui visi *One Planet, One Health*, Danone Indonesia bertujuan untuk membawa program kesehatan ke masyarakat dunia. Terkait program vaksinasi, pihaknya ingin membantu

menyukseskan pelaksanaan dukungan kesehatan lansia melalui hidrasi dan nutrisi sehat, penyebaran informasi positif terkait vaksinasi, hingga edukasi kepada masyarakat di Kota DI Yogyakarta.

Dalam pelaksanaannya, Danone Indonesia mendukung program vaksinasi dengan menyediakan masker dan *hand sanitizer*, serta menyebarkan materi edukasi seputar makanan dan minuman bergizi seimbang hingga gaya hidup sehat kepada peserta vaksinasi.

Selama pandemi Covid-19, lanjut Arif, Danone di Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah, berbagai lembaga, rumah sakit, maupun organisasi sosial untuk menyalurkan

bantuan senilai Rp30 Miliar berupa alat pelindung diri, peralatan medis seperti ventilator dan tempat tidur, bantuan nutrisi dan hidrasi bagi tenaga medis, hingga kelompok rentan. Selanjutnya, Danone Indonesia akan terus menjaga kualitas produk, memberikan bantuan serta bekerja sama dengan berbagai pihak agar dapat berkontribusi dan menggerakkan masyarakat untuk saling jaga mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. (in)

Pemerintah Sempurnakan Desain Besar Olahraga Nasional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali untuk menyempurnakan desain besar olahraga nasional. Kebijakan itu ditempuh menyusul *bidding* pemerintah sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 dan menempatkan posisi Indonesia sebagai 10 besar dalam ajang pesta olahraga musim panas itu.

"Saya diberi kesempatan untuk memaparkan desain besar (*grand design*) olahraga nasional di hadapan Bapak Presiden. Pada intinya arahan Bapak Presiden, desain besar ini diterima. Tentu, ada tambahan di sana sini. Ada info dari beberapa menteri yang hadir. Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami, itu semua dirumuskan lagi," ujar Menpora saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/3).

Selama ini, menurut Menpora, Indonesia belum memiliki desain untuk pembinaan prestasi olahraga nasional. Pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Hornas) Ke-37 tahun lalu, Presiden Jokowi telah mem-

rintahkan untuk melakukan sejumlah hal, di antaranya meninjau total ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional, menggunakan *big data*, dan menjadikan *sport science* sebagai unsur utama dalam pembinaan olahraga nasional.

"Atas arahan Bapak Presiden dan perintah beliau ketika itu kepada saya sebagai Menpora, kami segera menyusun desain besar tentang olahraga nasional. Tentu, bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya, dengan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), dengan Komite Olimpiade Indonesia, dan NPC (National Paralympic Committee), serta perguruan tinggi, para akademisi, para praktisi di bidang olahraga," ujar Menpora.

Menpora memaparkan, desain besar olahraga nasional disusun dari hulu hingga hilir, yaitu sejak dari kebugaran masyarakat yang menjadi sumber potensi talenta untuk atlet-atlet nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga merencanakan akan membuat sepuluh sentra pemusatan latihan di beberapa daerah yang disesuaikan dengan potensi yang ada. (nov)



PT KAPUAS PRIMA COAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan akan diadakan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021.

Sesuai dengan ketentuan POJK 32/POJK.04/2014, iklan Pemanggilan untuk Rapat akan dimuat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021.

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Setiap unsur Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 16 Maret 2021
DIREKSI
PT KAPUAS PRIMA COAL Tbk

PT ITAMA RANORAYA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, bertempat di Hotel Grand Malia, Jl. H. R. Ransua Said No. Kavling 10 Setia Budi-Jakarta Selatan 12950.

Pemanggilan untuk RUPS akan dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT (Kualifikasi) Elik Indonesia (SEI) dan situs web Perseroan (Itama.co.id).

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS dan RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan POJK 32/POJK.04/2014, iklan Pemanggilan untuk Rapat akan dimuat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021.

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Setiap unsur Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 16 Maret 2021
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36

PT Insight Investments Management selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 (“Manajer Investasi”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 telah melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 tertanggal 12 Maret 2021.
- Bahwa seluruh Efek berjangka utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 telah jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2021 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 yang telah diterbitkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan, sehingga pada tanggal dilandatanganinya Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36, sebagaimana termaktub dalam Laporan Aktiva dan Kewajiban REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 per tanggal 15 Maret 2021.
- Pada tanggal 16 Maret 2021, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36, kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi PT Insight Investments Management Nomor 158/111/MBD/111/2021 tanggal 16 Maret 2021.
- Pada tanggal 16 Maret 2021, Manajer Investasi melalui surat Nomor 157/111/MBD/111/2021 tanggal 16 Maret 2021 telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 sejak tanggal 16 Maret 2021.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36 di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 16 Maret 2021
Manajer Investasi
REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 36
PT Insight Investments Management
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Moral Hazard Terus Terjadi, OJK Minta LJK Perkuat Tata Kelola

Oleh Nida Sahara

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui terdapat sejumlah tantangan kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya adalah *moral hazard* yang selalu terjadi di lembaga jasa keuangan (LJK). Oleh karena itu, OJK menilai perlu ada penguatan tata kelola yang baik dan menjalankan prinsip prudensial dari internal perusahaan.



Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan, OJK saat ini mengawasi 107 bank umum, lalu sebanyak 1.506 bank perkediteran rakyat (BPR) di seluruh Indonesia, yakni 1.333 industri keuangan nonbank (IKNB). Menurut dia, industri jasa keuangan cukup rentan terjadi *moral hazard*.

Wimboh menyebut, tiga tantangan kebijakan OJK dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yakni, pertama *moral hazard* yang dilakukan oleh pengurus atau pemilik LJK. Kedua, *pricing* produk keuangan yang masih relatif tinggi. Ketiga, literasi keuangan di mana pemahaman konsumen terhadap risiko dan produk LJK masih rendah.

"Namun, tidak jarang masing-masing pihak ada *moral hazard*, misalnya di penyedia produk yang tidak mau lapor ke OJK, karena nanti malah tidak boleh jualan. *Moral hazard* terus terjadi, tidak pernah terhindar dari itu, OJK punya tantangan ke depan," terang Wimboh dalam webinar, Senin (15/3).

Wimboh menjelaskan, OJK cukup kesulitan untuk melakukan monitoring BPR setiap harinya. Sebab, jumlahnya yang sangat banyak dan tersebar, serta belum mengadopsi digital. Sehingga pengawasan BPR menjadi lebih sulit jika tidak dibantu dengan digitalisasi.

Hal tersebut tercermin dari banyaknya BPR yang dicabut izinnya oleh OJK dan dilikuidasi karena melakukan *fraud*. "Kami tahu kalau bank umum *clear* jumlahnya sedikit, lebih transparan. Tapi yang kecil-kecil ini jangkauan jauh, kami awasi digital agar bisa *link* dengan kami, aktivitasnya kami monitor," papar Wimboh.

Menurut dia, BPR pun harus mulai bertransformasi ke arah digital agar tidak tertinggal. Selain itu, supaya memudahkan OJK untuk mengawasi. "Apabila tidak dengan digital akan berat, BPR terlalu kecil, pengurus tidak begitu paham ini, banyak sekali di daerah-daerah BPR yang jangkauannya kami agak sulit monitor *day to day*. Kalau bermasalah ada *fraud* kami *enforce*, kami ganti dana masyarakat melalui LPS (Lembaga Penjamin

MATA UANG	BANK NOTE		T,T		TABUNGAN
	BELI	JUAL	BELI	JUAL	
USD	14.090,00	14.510,00	14.100,00	14.500,00	SIAGA BISNIS 20
SGD	10.466,00	10.860,00	10.476,00	10.850,00	SIAGA BISNIS
AUD	10.810,00	11.228,00	10.820,00	11.218,00	SIAGA BISNIS
JPY	128,32	135,54	128,52	135,34	SIAGA BISNIS
EUR	16.757,00	17.343,00	16.767,00	17.333,00	SIAGA BISNIS
WON	10,98	14,40	11,48	13,90	SIAGA BISNIS

MAKSIMAL DANA PENJAMINAN LPS	
RP 2.000.000.000,-	

Tingkat bunga giro rupiah	
gala kemudahan layanan kami	

Kurs Rupiah

Petugas melintas di depan monitor pergerakan kurs mata uang di Jakarta. Rupiah ditutup melemah 20 poin atau 0,14 persen menjadi Rp14.405 per dolar AS pada Senin 15 Maret 2021 dan Indeks dolar AS naik 0,18 persen menjadi 91,847.

Simpanan)," jelas Wimboh.

Jaga Kepercayaan Masyarakat

Dalam kesempatan itu, pengamat hukum perbankan Aad Rusyd mengungkapkan, kepercayaan masyarakat harus dijaga oleh industri perbankan yang merupakan lembaga intermedial dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Pasalnya, jika kepercayaan masyarakat luntur, akan tersebar rumor dan akan berdampak negatif pada sektor keuangan bahkan bisa berdampak sistemik.

"Setiap saat harus dijaga kepercayaan masyarakat, makanya bank itu perlu dikelola dan dimiliki oleh pihak-pihak yang memenuhi ketentuan. Tidak bisa setiap orang menjadi direksi, tidak bisa setiap orang jadi komisaris atau pemilik bank," papar Aad.

Dia menyebut, berdasarkan Undang-Undang (UU) Perbankan, pemilik bank harus mampu mencukupi permodalan bank, apabila bank mengalami kesulitan permodalan, pemilik harus bisa menyuntikan dana agar bank bisa beroperasi normal.

"Dalam aturan hukum perbankan sekarang, bagi pemegang saham harus punya integritas atau bisa dipercaya dan punya reputasi. Kalau bank mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas harus segera ditangani, bank ini bisnis kepercayaan, kalau sakit akan beredar rumor, OJK harus cepat ambil tindakan meredam risiko likuiditas tadi," terang Aad.

Pihaknya juga menegaskan, *moral hazard* menjadi tantangan utama, terutama di industri perbankan. "Bank itu industri yang aturannya sudah ketat, tapi ada saja yang menikung untuk

melakukan berbagai tindakan yang merugikan perekonomian. *Moral hazard* ini jadi tantangan," ucap dia.

Oleh sebab itu, apabila OJK memberikan perintah tertulis kepada pemegang saham dalam hal meminta penyelesaian karena bank sakit, maka harus dijalankan. "Sebab OJK beri perintah tertulis bukan tiba-tiba, tapi sudah diawasi sejak lama, makanya ada BDP1 dan BDPK. Jadi komitmen harus ada dari pemegang saham pengendali, harus mencari cara agar likuiditas terpenuhi supaya tidak merambat ke masalah solvabilitas," tutur Aad.

Prudential Dukung Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berharap Lembaga Penjamin Polis segera didirikan. Perseroan juga sepakat peran LPP nantinya lebih pada menjamin produk asuransi tradisional.

"Prudential Indonesia berharap agar Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP) dapat segera didirikan dan kami siap untuk sepenuhnya mendukung implementasi LPPP, terutama bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang sehat, demi melindungi kepentingan seluruh nasabah dan mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia," terang *President Director* Prudential Indonesia Jens Reisch kepada *Investor Daily*, Senin (15/3).

Dia menyampaikan, pihaknya juga berharap agar peraturan terkait LPP bisa lebih komprehensif. Namun demikian, peraturan yang dimaksud di antaranya tetap mempertimbangkan masukan dari industri.

Menurut Jens, pendirian lembaga penjamin polis merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan bagi nasabah asuransi apabila terjadi gagal bayar atas manfaat asuransi oleh perusahaan asuransi. Selain itu, jaminan polis bisa melindungi kesalahan pengelolaan investasi yang dapat mempengaruhi likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak



Jens Reisch

pemegang polis.

"Hal ini dapat meningkatkan ketenangan dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa. Kami meyakini lembaga ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri asuransi jiwa dan menjawab kebutuhan nasabah yang kian meningkat saat ini, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan kepada nasabah atas produk asuransi jiwa yang mereka beli," papar dia.

Jens mengatakan, manfaat dari pembentukan LPP itu sejalan dengan komitmen Prudential Indonesia untuk mewujudkan perlindungan kesehatan dan finansial bagi masyarakat luas. Dengan begitu, masyarakat bisa

mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya.

Di samping itu, dia menyatakan bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link* akan mengikuti pergerakan nilai tunai atas dana yang dipilih nasabah sesuai dengan profil risikonya. Dalam hal ini, risiko produk disematkan pada nasabah. Pihaknya mendukung usul Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang berharap peran lembaga penjamin polis hanya menjamin produk tradisional. "Dengan demikian, kami sependapat dengan AAJI bahwa risiko yang akan *di-cover* oleh LPP lebih pada produk tradisional atau non-PAYDI dengan tingkat pengembalian investasi yang digaransi oleh perusahaan asuransi," terang Jens.

Gelar PRURide Indonesia 2021

Sementara itu, Prudential Indonesia bakal menggelar acara *PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride* pada 1-17 Agustus 2021. Perseroan mengusung konsep *sportsfest virtual* dengan menghadirkan berbagai pilihan olahraga favorit selain bersepeda sebagai agenda utamanya.

Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia Luskito Hambali menjelaskan, pihaknya percaya bahwa kunci untuk hidup lebih sehat adalah terus

bergerak aktif dengan semangat yang *infinite* (tidak terbatas). Sejalan dengan semangat perseroan mengajak orang Indonesia hidup lebih aktif dan sehat, agar bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya dengan melakukan *PRURide Indonesia* sebagai ajang sepeda tahunan sejak 2019.

"Dengan konsep *sportsfest virtual*, *PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride* ingin memfasilitasi masyarakat bergerak aktif dan berolahraga sesuai kegemarannya, baik di rumah maupun dari luar rumah. Tidak hanya para pesepeda, kami juga undang para pecinta lari dan jalan, serta para penggemar *Pound Fit*, *Zumba*, *TRX Training*, hingga *Crossfit*," terang Luskito melalui siaran pers, Senin (15/3).

Penyelenggaraan acara tersebut akan didukung pendekatan fleksibilitas dalam partisipasi di tiap kegiatannya, serta *jersey* dengan desain menarik dan keunikan medali. Gelaran *sportsfest* juga terbuka untuk seluruh masyarakat usia 5-75 tahun. Pendaftaran dibuka mulai 15 Maret hingga 30 Juni 2021 (penawaran *early bird* hanya selama 15 Maret-15 April 2021). Info lebih detail mengenai *PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride*, pendaftaran serta mekanisme kegiatan, dapat diakses secara daring di bit.ly/PRURIDEVR2021. (pri)

OCBC NISP Luncurkan Financial Fitness by NYALA

JAKARTA – PT Bank OCBC NISP Tbk meluncurkan solusi keuangan bersama *Financial Fitness by NYALA* dalam rangka mendukung literasi keuangan generasi muda Indonesia. Selain berupa produk keuangan, *Financial Fitness* adalah solusi terintegrasi perseroan dalam melakukan pendampingan.

Direktur Bank OCBC NISP Ka Jit meyakini generasi muda memiliki semangat untuk berhasil. Semangat itu juga yang mendasari perseroan untuk terus berusaha menghadirkan berbagai inovasi, terutama demi mewujudkan kondisi finansial yang sehat (*financially fit*) bagi setiap generasi muda Indonesia.

Namun demikian, tujuan tersebut mesti lebih dulu menjawab tantangan pemikiran tentang ketahanan finansial yang tepat, mulai dari tujuan, proses, serta tahapan untuk mencapainya. Untuk itu, OCBC NISP meluncurkan solusi *Financial Fitness by NYALA* OCBC NISP guna memberdayakan generasi Indonesia agar memiliki kondisi *financially fit*, menggeser *mindset* dari *getting rich* menjadi *getting fit*.

"OCBC NISP menyadari, membangun generasi *financially fit* diperlukan langkah besar, mulai dari meningkatkan pemahaman dasar finansial (*knowledge*), memperbaiki kebiasaan manajemen keuangan yang salah (*behaviour*), dan meluruskan *mindset* terkait finansial yang keliru agar mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat (*attitude*)," ujar Ka Jit, Senin (15/3).

Dia mengungkapkan, OCBC NISP menghadirkan solusi *Financial Fitness* pada 2021 atau bertepatan dengan usia perseroan ke-80. Layanan sekaligus produk keuangan itu

adalah solusi komprehensif dan masif untuk membantu pemerintah membawa Indonesia maju menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045.

Ka Jit menyampaikan, solusi *Financial Fitness* itu lebih dari sekedar produk keuangan. Solusi tersebut merupakan solusi terintegrasi yang menghadirkan program pendampingan mulai dari *Nyala Financial Fitness Squad*, Komunitas Ruang *menyALA*, platform edukasi www.ruangmenyala.com dan *RuangMeNYALA Financial Fitness Gym*. Masing-masing program pendampingan fokus untuk mengedukasi, mengarahkan, mendukung dan membentuk kebiasaan keuangan yang baik.

Menurut dia, terdapat tiga permasalahan utama agar masyarakat, khususnya generasi muda dianggap telah *financially fit* yakni faktor pengetahuan, kebiasaan, dan *mindset*. Hal itu juga didasarkan pada indeks literasi keuangan OJK tahun 2019 yang baru menyentuh level 38,03%.

"Saya berharap solusi *Financial Fitness by NYALA* OCBC NISP ini bisa merangkul masyarakat, khususnya generasi muda, menjadikan mereka *financially fit*. Ini bukan sekedar inisiatif bisnis, melainkan komitmen kami menjalankan *responsible banking* untuk mengajak masyarakat berdaya secara finansial," pungkask Ka Jit.

Sementara itu, *Financial Fitness Director* NYALA OCBC NISP Dedy Corbuzier menuturkan, pihaknya sangat mengapresiasi Bank OCBC NISP yang segera mengambil tindakan nyata dalam mendorong generasi Indonesia lebih melek keuangan, dengan fokus kepada *getting fit before getting rich*. (pri)

Lewat Pintek, AS Dukung Pembiayaan Institusi Pendidikan Indonesia

JAKARTA – Penyelenggara *fintech peer to peer (P2P) lending* PT Pinduit Teknologi Indonesia (Pintek) menjalin kemitraan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) guna mendukung pembiayaan bagi institusi pendidikan di Indonesia. Kerja sama itu khususnya dilakukan dengan *US International Development Finance Corporation* (DFC) dan *US Agency for International Development* (USAID).

Co-Founder dan Direktur Utama Pintek Tommy Yuwono menyampaikan, kemitraan dilakukan dalam rangka membantu lebih banyak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan tinggi maupun pendidikan vokasi, meskipun terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Kolaborasi yang dijalin akan membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk

mendapatkan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan pekerjaan yang lebih baik di kemudian hari.

"Kondisi pendidikan secara keseluruhan pada masa *pandemic* Covid-19 mendorong institusi pendidikan mempersiapkan fasilitasnya untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Pintek, melalui produk pinjaman *Pintek Institutions*, membantu institusi pendidikan baik pendidikan tinggi maupun pendidikan vokasi untuk menyediakan peralatan, meningkatkan fasilitas, dan juga kebutuhan operasionalnya," terang Tommy melalui keterangan tertulis, Senin (15/3).

Sementara itu, *USAID Mission Director* Ryan Washburn menerangkan, krisis Covid-19 telah mengingatkan bahwa kita tidak kebal terhadap risiko dan konsekuensi terhadap guncangan

mendadak terhadap sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan perekonomian. Pihaknya percaya bahwa kolaborasi dengan Pintek dapat membantu rumah tangga maupun lembaga pendidikan dalam mengurangi risiko kerugian dan menjadikannya sebuah solusi.

"Bersama, kami dapat semakin memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia secara keseluruhan, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi anak muda Indonesia untuk mencapai potensi mereka dan menumbuhkan ekonomi," jelas dia.

Sementara itu, *Vice President of the Office of Development Credit* DFC James Polan meyakini, dukungan finansial terhadap lembaga pendidikan dan orang tua adalah fokus penting untuk keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu sangat dibutuhkan dalam upaya

pemulihan akibat Covid-19.

"Kemitraan kami dengan Pintek adalah membuka kesempatan untuk akses pendidikan bagi anak, terutama bagi mereka yang orang tuanya secara langsung terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi. Kami sangat senang melihat perusahaan pemberi pinjaman seperti Pintek dalam menciptakan solusi pembiayaan yang dapat mengatasi tantangan utama saat ini," tutur James.

Adapun *SoCap CEO and Co-Founder* Pintek Ioann Fainsilber menambahkan, pihaknya sangat senang atas kolaborasi dengan USAID dan DFC untuk mendukung pendidikan di Indonesia. "Melalui kolaborasi ini, kami berupaya untuk memberikan layanan keuangan terbaik untuk pendidikan dan seluruh ekosistemnya," imbuh dia. (pri)



Penguatan Struktur Permodalan

Petugas melayani nasabah Bank Muamalat di Jakarta, belum lama ini. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk akan mendapatkan suntikan modal dan tengah merampungkan aksi korporasi dalam rangka revitalisasi serta penguatan struktur permodalan perseroan.

Berdayakan UMKM, BRI Gunakan Pendekatan Edukasi



Sunarso

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menilai paradigma pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diubah ke arah yang lebih baik. Pendampingan UMKM agar tumbuh dan berkembang harus dilakukan melalui pendekatan edukasi alih-alih advokasi.

Melalui pola pendekatan berbasis edukasi, UMKM tidak lagi dipersipikan berada di bawah lembaga maupun individu yang melakukan pendampingan. Namun, UMKM ditempatkan sebagai *partner* setara untuk tumbuh kembang bersama terutama dimasa pandemi saat ini. Alhasil, upaya peningkatan kelas UMKM bisa berjalan lebih efektif.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, edukasi bagi UMKM akan membuat para pelaku usaha mikro dan kecil lebih cepat bertransformasi. Dampaknya, perubahan dan perkembangan itu akan membawa banyak dampak positif bagi

pelaku usaha, lembaga pendamping, serta perekonomian nasional.

“Sungguhnyanya kalau kita bisa edukasi mereka, dan mereka bisa sejajar sama bank, sama lembaga pembiayaan, maka dia akan menjadi gadis cantik yang menjadi rebutan semua bank. Rebutan semua bank itu lah yang akan menurunkan harga, dan bargaining position dari UMKM itu akan naik. Maka sekarang kita fokus saja pada edukasi UMKM,” terang Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (15/3).

Selama ini, pendekatan berbasis edukasi telah dilakukan BRI dalam mendampingi dan memberdayakan UMKM. Mengandalkan lebih dari 36 ribu tenaga *marketing* dan analisis kredit (mantri) di daerah, edukasi terhadap UMKM selalu dilakukan BRI setiap harinya. Dalam melakukan pendampingan, BRI fokus untuk menanamkan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) di diri masing-masing pelaku UMKM dan debitur. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan semangat pelaku usaha agar terus mengembangkan bisnisnya.

Sebagai bank dengan portofolio UMKM sebesar 82,13% dari total kredit, BRI rutin mengedukasi UMKM agar memahami kaidah administrasi dan manajerial bisnis yang sesuai ketentuan. Selain itu, akses merambah pasar, penggunaan teknologi, dan informasi bagi UMKM juga dibuka oleh BRI, agar pelaku UMKM semakin berdaya saing baik di lingkup regional, nasional, dan bahkan internasional. (nid)

UUS BTN Incar Pembiayaan Rp 190 Miliar di Depok

JAKARTA – Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) di Depok menjadi Kantor Cabang Syariah (KCS). Dengan peningkatan status tersebut, perseroan optimistis mampu menyalurkan pembiayaan sekitar Rp 190 miliar sampai 2021 atau naik 18% (*year on year/yooy*) di KCS Depok.

Direktur *Consumer and Commercial Lending* BTN Hirwandi Gagar menjelaskan, pihaknya menargetkan aset KCS Depok tumbuh sekitar 22% pada akhir Desember 2021 menjadi Rp 199 miliar.

Menurut dia, bisnis perseroan di kota-kota penyangga ibu kota mencatatkan kinerja positif meski berada di situasi pandemi. Lima kantor cabang syariah BTN di Jawa Barat, lanjutnya, telah menorehkan kinerja melebihi target. Depok sebagai salah satu kota di Jawa Barat pun mencatat pertumbuhan ekonomi yang cepat ditunjang semakin banyaknya pengembangan perumahan baru dan kawasan pendidikan.

“Kami melihat Depok merupakan kota satelit yang menjadi pusat pemukiman dan pendidikan, karena itu kami berupaya memaksimalkan penggarapan peluang di kedua bidang di kota tersebut dengan meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu Syariah Depok menjadi Kantor Cabang Syariah Depok,” jelas Hirwandi di sela pembukaan KCS BTN Depok, Senin (15/3).

Menurut Hirwandi, ekspansi BTN Syariah di Kota Depok pun

akan sejalan dengan *core business* BTN di sektor perumahan. Ekspansi BTN Syariah ini pun akan selaras dengan strategi memperluas layanan BTN Syariah berbasis digital di segmen pendidikan.

Kantor BTN Syariah tersebut tetap berlokasi di Jalan Margonda Raya Nomor 43B-43D. Hirwandi menyebutkan, dengan peningkatan status layanan kantor cabang tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas untuk melayani kebutuhan nasabah akan produk dan layanan BTN Syariah.

Sementara itu, di Jawa Barat, BTN Syariah telah memiliki lima kantor cabang yakni KCS Bandung, KCS Bogor, KCS Bekasi, KCS Cirebon, dan KCS Tasikmalaya. Kendati berada di masa pandemi, jaringan kantor BTN Syariah tersebut berhasil mencatatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 7,7% secara tahunan (*yooy*) dari Rp 5,99 triliun per Februari 2020 menjadi Rp 6,45 triliun pada bulan yang sama tahun ini. Aset UUS BTN di Jawa Barat tumbuh 15,07% (*yooy*) dari Rp 5,83 per Februari 2020 menjadi Rp 6,71 triliun.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok menunjukkan angkatan kerja di kota satelit tersebut mencapai 68,62% dari total jumlah penduduk di wilayah tersebut yang mencapai 2,4 juta jiwa pada 2019. Dengan jumlah angkatan kerja tersebut, diproyeksikan kebutuhan akan perumahan masih besar untuk segmen pasar produktif di Kota Depok. (ris)



RUPST Bank Mandiri

Dari kiri ke kanan, Wakil Dirut Bank Mandiri Alexandra Askandar, Komisaris Utama Bank Mandiri M. Chatib Basri, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Wakil Komut Andrinof A. Chaniago, saat pembukaan RUPS Tahunan Bank Mandiri 2021 di Jakarta, Senin (15/3/2021). Pemegang saham menyetujui besaran dividen sebesar 60% dari laba bersih tahun 2020 atau Rp 10,27 triliun (sekitar Rp 220 per lembar saham). Dengan memperhitungkan komposisi saham merah putih yang sebesar 60%, maka Bank Mandiri akan menyetorkan dividen sekitar Rp 6,16 triliun ke kas negara. RUPST juga menyetujui pengangkatan Timothy Utama sebagai Direktur Information Technology dan Muhammad Yusuf Ateh sebagai Komisaris.

Bank Mandiri Tebar Dividen Rp 10,27 Triliun

Oleh Nida Sahara

▶ JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui besaran 60% dari laba bersih 2020 atau sekitar Rp 10,27 triliun sebagai dividen dengan nilai Rp 220 per lembar saham. Dengan pembagian dividen tersebut perseroan mengalami penurunan permodalan, sehingga tahun ini rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) akan dijaga pada kisaran 18-20%.

“Dari Rp 10,27 triliun, dengan memperhitungkan komposisi saham merah putih yang sebesar 60%, maka Bank Mandiri akan menyetorkan dividen sekitar Rp 6,16 triliun ke kas negara. Sedangkan sebanyak 40% dari laba bersih tahun lalu akan menjadi laba ditahan,” ungkap Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam konferensi pers hasil RUPST perseroan, Senin (15/3).

Darmawan menjelaskan, besaran dividen tersebut sangat sejalan dengan komitmen manajemen Bank Mandiri untuk bisa berkontribusi secara optimal kepada negara serta keinginan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah, salah satunya dengan layanan *digital banking* andal dan simpel.

Menurut Darmawan, pihaknya optimistis dengan ekspansi digital yang tengah dijalankan karena akan mendukung implementasi fungsi intermediasi Bank Mandiri yang menjadi *core business* perseroan. Melalui Mandiri Digital, perseroan telah mengembangkan layanan dan produk perbankan terbaik yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi dan retail.

Salah satu inisiatif transformasi digital *banking* yang telah dilakukan Bank Mandiri adalah dengan memperkenalkan Livin by Mandiri sebagai penyempurnaan aplikasi Mandiri Online. Livin by

Mandiri diharapkan menjadi *super app* yang memanfaatkan pendekatan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan akses layanan keuangan yang lengkap, termasuk ke *biller* dan produk perusahaan anak sehingga dapat mendukung keinginan perusahaan menjadi salah satu *best digital retail bank* di Tanah Air.

Pada kesempatan itu, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo menjelaskan, dengan pembayaran dividen sebesar 60% dari laba tahun 2020 tentu menggerus permodalan perseroan, namun masih pada level yang cukup tebal.

“Dividen kami bayarkan 60%, saya rasa ini keputusan sangat baik, kita ketahui waktu pemaparan kinerja 2020, CAR kami pada 19,9%. Kemudian, dengan pembagian dividen 60% akan ada koreksi, namun tetap dalam level aman pada Maret (2021) angka CAR kami di 18,9%,” jelas Sigit.

Dia mengungkapkan, sejalan dengan ekspansi bisnis di tahun ini, tentunya permodalan pada akhir tahun juga akan terkoreksi. “Akhir tahun seiring dengan ekspansi kredit, kami akan jaga CAR di kisaran 18,4%, kami berharap secara *bank only* kami bisa jaga CAR 18-20%,” tutur dia.

Sementara itu, pada dua bulan pertama tahun 2021 perseroan mencatatkan perbaikan pertumbuhan kredit, karena



Darmawan Junaidi

debitur mulai menjalankan aktivitas ekonomi dan mulai meminta kredit.

Sigit menyebut, untuk bulan Januari 2021 dibandingkan dengan Desember 2020 masih mengalami penurunan, namun tidak sedalam penurunan tahun sebelumnya. “Sampai Februari kredit sudah menunjukkan pertumbuhan yang baik dari siklus sebelumnya. Pada Januari ada koreksi karena dibanding posisi kredit dari Desember, tapi *good news* tahun ini penurunannya sedikit,” ucap Sigit.

Dia menambahkan, untuk bulan Februari 2021 penyaluran kredit perseroan sudah lebih besar dibandingkan Januari 2021. Menurut dia, hal tersebut mengindikasikan terjadinya pemulihan permintaan kredit. “Pada Februari kami sudah tumbuh dari Januari kami catat pertumbuhan Rp 11 triliun dari Januari, kami punya keyakinan momentum pertumbuhan kita lanjutkan bisa capai sampai akhir tahun,” sambung Sigit.

CKPN Rp 5 Triliun

Di sisi lain, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengatakan, sepanjang tahun 2020 perseroan telah melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,4 triliun dan terjadi penurunan karena debitur mulai bangkit dan membayar kembali, sehingga *outstan-*

ding menjadi Rp 93 triliun.

“Kami sudah sisihkan Rp 4,5 triliun untuk debitur restrukturisasi yang kami perkirakan mungkin tidak bisa pulih, dan tahun ini kami tambah Rp 1 triliun khusus debitur restrukturisasi, sehingga total sekitar Rp 5 triliun kami alokasikan. Jika debitur tidak bisa bangkit, kami sudah siap dengan CKPN jadi tidak ada *shock* nanti,” urai Siddik.

Perubahan Jajaran Pengurus

Sementara dalam RUPST perseroan, pemegang saham memutuskan untuk mengangkat menjadi Timothy Utama menggantikan Rico Usthavia Frans yang telah habis masa jabatannya. Sebelumnya, Timothy Utama merupakan *managing director, head of operations and technology* Citibank. “Pak Rico habis masa jabatannya dari 2015 sampai dengan 2020,” kata Darmawan.

Pada jajaran komisaris, RUPST juga menyepakati penunjukkan Muhammad Yusuf Ateh sebagai komisaris menggantikan Ardan Adiperdana.

Dengan keputusan ini, susunan direksi perseroan adalah Direktur Utama Darmawan Junaidi, Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar, Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin, Direktur Kepatuhan & SDM Agus Dwi Handaya, Direktur *Treasury & International Banking* Panji Irawan, Direktur *Commercial Banking* Riduan, Direktur *Jaringan & Retail Banking* Aquarius Rudianto, Direktur *Operation* Toni Eko Boy Subari, Direktur *Corporate Banking* Susana Indah Kris Indriati, Direktur Hubungan Kelembagaan Rohan Hafas, Direktur Keuangan & Strategi Sigit Prastowo, dan Direktur *Information Technology* Timothy Utama.

Adapun jajaran komisaris perseroan adalah Komisaris Utama M Chatib Basri, Wakil Komisaris Utama Andrinof Chaniago, Komisaris Independen Mohamad Nasir, Komisaris Independen Boedi Armanto, Komisaris Independen Loeke Larasati Agoestina, Komisaris Nawal Nely, Komisaris Faried Utomo, Komisaris Arif Budimanta, Komisaris Rionald Silaban, dan Komisaris Muhammad Yusuf Ateh.

BERITA SATU PRESENTS



MUSYAWARAH DAERAH XVII HIPMI JAYA



CALON KETUA UMUM HIPMI JAYA MASA BAKTI 2021-2024

DEBAT CALON KETUA UMUM HIPMI JAYA

INOVASI KOLABORATIF BANGKITKAN JAKARTA

18 MARET 2021 19.00-21.00 WIB

LIVE BERITASATU & BERITA SATU .COM



1 Andi Indra Hardiansyah Rukman



2 Noor Sona Maesana Mushoniff



3 M. Alipudin